80 *Tahun*

Otobiografi: Prof. Dr. Soediono M. P. Tjondronegoro

Mencari Ilmu
di Tiga Zaman dan Tiga Benua

Sajogyo Institute

2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tjondronegoro, Sediono M. P.
Mencari Ilmu di Tiga Zaman dan Tiga Benua, Otobiografi Prof. Dr. Sediono M. P. Tjondronegoro
Bogor: Penerbit SAINS, 2008
x + 1234 hlm. 15 x 21 cm
ISBN: 083798632-987264986

I. Otobiografi II. Judul III. Ahmad Nashih Luthfi

Cetakan Pertama, April 2008

Penyunting:
Ahmad Nashih Luthfi

Pereka Kulit:
DAN

Penata Letak:
DAN

Penerbit Sains,
Jl. Malabar 22, Bogor, Jawa Barat, 16151.
Telepon/ faximale: (0251) 374048

Daftar Isi

Pengantar Penyunting

Suatu kebahagiaan bagi kami dapat mempelajari dan menerbitkan buku riwayat kehidupan Prof. Dr. Sediono Mommy Poerwodo Tjondronegoro, seorang Guru Besar Sosiologi Pedesaan, Institut Pertanian Bogor. Di dalamnya kita akan mendapat gambaran tentang pergulatan sosok ilmuwan yang telah dimatangkan melalui berbagai bentuk perjuangan; pertempuran fisik bersenjata, bergerak di "bawah tanah", studi di luar negeri, bertahan hidup di negeri orang, berdiplomasi, berdemonstrasi,

sampai dengan perjuangan keilmuan seperti mengajar, meneliti, merumuskan kebijakan dan pendampingan masyarakat. Mozaik kehidupan disinggung pula dalam tulisan ini.

Belajar di luar negeri adalah suatu keberuntungan dan prestasi yang tidak dapat diperoleh dengan mudah masyarakat kita. Beliau mendapat kesempatan itu, menyerap tradisi keilmuan di Eropa (Belanda) lantas dapat membandingkannya dengan tradisi di Amerika ketika belajar di Wisconsin University, hingga bagaimana mentradisikan dan meneguhkan keilmuannya di Indonesia. Pengalaman belajar itu lah yang menjadi fokus tulisan beliau ini.

Beliau merupakan saksi atas pergeseran keilmuan yang ada di IPB. Hal ini diceritakan dengan apik dan kritis. Refleksi atas beberapa tema yang menjadi perhatian beliau (masyarakat pedesaan, agraria, ekologi, dan energi) tersaji di dalamnya. Beliau menegaskan bahwa ilmu sosial di Indonesia hanya akan relevan dan berkembang bila ia mampu memahami pikiran-pikiran masyarakat: masalah, harapan, adat-istiadat dan kebahagiaan apa saja yang ada. Kemampuan itu tidak bisa didapatkan bila hanya mengandalkan bacaan teoritis dan laporan-laporan resmi pemerintah. Maka diperlukan pengalaman langsung dengan terjun ke tengah-tengah masyarakat lapis bawah. Serta ilmu sosial harus didudukkan dalam hubungannya dengan ilmu alam, mengingat interaksi manusia erat dengan lingkungan alam sekitarnya.

Lintasan zaman dan benua yang dilampaui oleh beliau diisi dengan berbagai partikularitas pengalaman. Keunikan dan kekhasan itu memberi landasan bagi cara dan bagaimana perjuangan beliau dirumuskan, khususnya perjuangan seorang ilmuwan sosial di Indonesia. Bagi sebagian generasi kita di abad millenium ini, adanya partikularitas pengalaman itu dipertanyakan. Alih-alih mampu dijadikan alas dari sebuah "garis perjuangan", penyeragaman imajinasi melalui

berbagai bentuk produk masyarakat industrial yang hedonis dan pragmatis, yang setiap hari memasuki ruang-ruang pribadi hanya menghasilkan penunggalan identitas. Tentu saja ini sebuah tantangan. Jangan sampai kita kehilangan imajinasi dalam membangun kolektifitas baru di abad ini. Imajinasi yang sumber-sumbernya kita dapatkan dari pengalaman para pendahulu, tokoh-tokoh senior, dan tentu saja dari lapisan masyarakat langsung dengan segenap ingatan dan pengalaman kolektifitasnya. Keinginan mendekatkan persepsi kelompok "elit" dengan persepsi "massa" itulah yang menjadi semangat penerbitan buku beliau ini, semangat Sajogyo Institut (SAINS), yang semoga semangat tersebut bisa diterima oleh khalayak luas.

Secara khusus buku ini dipersiapkan sebagai kado ulang tahun beliau yang ke-80 tahun. Mengingat buku tentang riwayat pengalaman perjuangan ini ditulis langsung oleh beliau dan dihadirkan kepada kita para pembaca, sepatutnya merasa bahwa beliaulah yang justru menghadiahi kita. Inilah hutang kita dari generasi penerus yang harus ditunaikan. Membaca buku ini berarti menandatangani kontrak hutang itu!

Bogor, 22 Februari 2008

Pengantar Penulis

Senin 26 Oktober dan 29 Oktober pertemuan singkat dengan Prof. Dr. Sajogyo di Pusat Kajian Agraria-IPB mencetuskan gagasan supaya saya menulis pengalaman belajar dan bekerja saya di berbagai negara. Penulisan itu bertujuan agar dapat diteruskan kepada generasi muda.

Karena belum pernah ada pemikiran demikian saya tertegun sebentar dan bertanya, periode mana yang mengandung manfaat untuk pembaca: periode 1928-2008 ataukah 1950-2007? Pilihan pertama merentang mulai dari kelahiran sampai sekarang. Sedangkan pilihan kedua lebih pendek, karena terbatas pada masa studi di tingkat universitas di beberapa negara Barat, dan masa bekerja baik di negeri sendiri maupun di luar negeri.

Jawaban "terserah" mendorong saya untuk memikirkan gagasan itu secara serius, terlebih Prof. Sajogyo mengatakan agar tulisan itu diselesaikan dalam periode Desember 2007 sampai pertengahan Pebruari 2008.

Mungkin dari pengalaman ini, sistim pendidikan tinggi di luar negeri dapat memberi gambaran bagaimana lulusan universitas dibekali menurut tradisi dan budaya Barat. Ini dapat dibandingkan dengan perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia yang pada awalnya (1950) masih mengikuti sistim pendidikan tinggi Belanda. Baru mulai awal 1960-an waktu mahasiswa Indonesia yang dididik di Amerika Serikat sudah mulai menjabat di Indonesia dan secara bertahap mempengaruhi serta mengubah sistem pendidikan tinggi di dalam negeri. Bahkan puluhan tahun kemudian juga sistem di negeri Belanda diubah dan diganti dengan menerapkan sistim Anglo-Amerika. Barangkali juga dewasa ini banyak negara berkembang di Asia meniru sistim tersebut.

Walaupun fokus tulisan ini diusahakan khusus tentang pengalaman pendidikan dan pekerjaan, tentu tidak dapat dipisahkan sama sekali dari pengalaman hidup sebelumnya yang boleh dikatakan turut mempengaruhi pilihan bidang ilmiah dalam studi dan lapangan pekerjaan setelah kembali di tanah air. Misalnya saja perhatian atas penduduk dan daerah pedesaan tidak terlepas dari pengaruh jabatan Ayah yang bekerja

di Pamong Praja dalam zaman penjajahan Belanda/ Hindia Belanda.

Rasanya yang penting adalah mengungkap sikap, alur pikiran dan harapan serta impian penulis ke hari depan masyarakat kita di bumi Indonesia ini. Kesatuan dan persatuan bangsa yang secara sadar mulai kita bangun sejak seratus tahun yang lalu mudah-mudahan dapat dimantapkan oleh generasi yang lahir dan menjadi dewasa menjelang dan dalam millennium ketiga ini. Globalisasi menuntut keterlibatan dan toleransi, tetapi nilai-nilai dasar budaya bangsa harus tetap dijunjung tinggi.

Akhirnya kepada tim penyunting dari Sains saya ucapkan terima kasih secara berlimpah atas segala perhatian, pengorbanan waktu, wawancara, pemotretan, penentuan format, dan pengaturan lay-out penerbitan otobiografi ini.

Semoga pengungkapan pengalaman penulis berfaedah terutama untuk pembaca generasi muda dan penerus.

Bogor, 4 April 2008

Sediono M. P. Tjondronegoro

Bagian Pertama

80 tahun
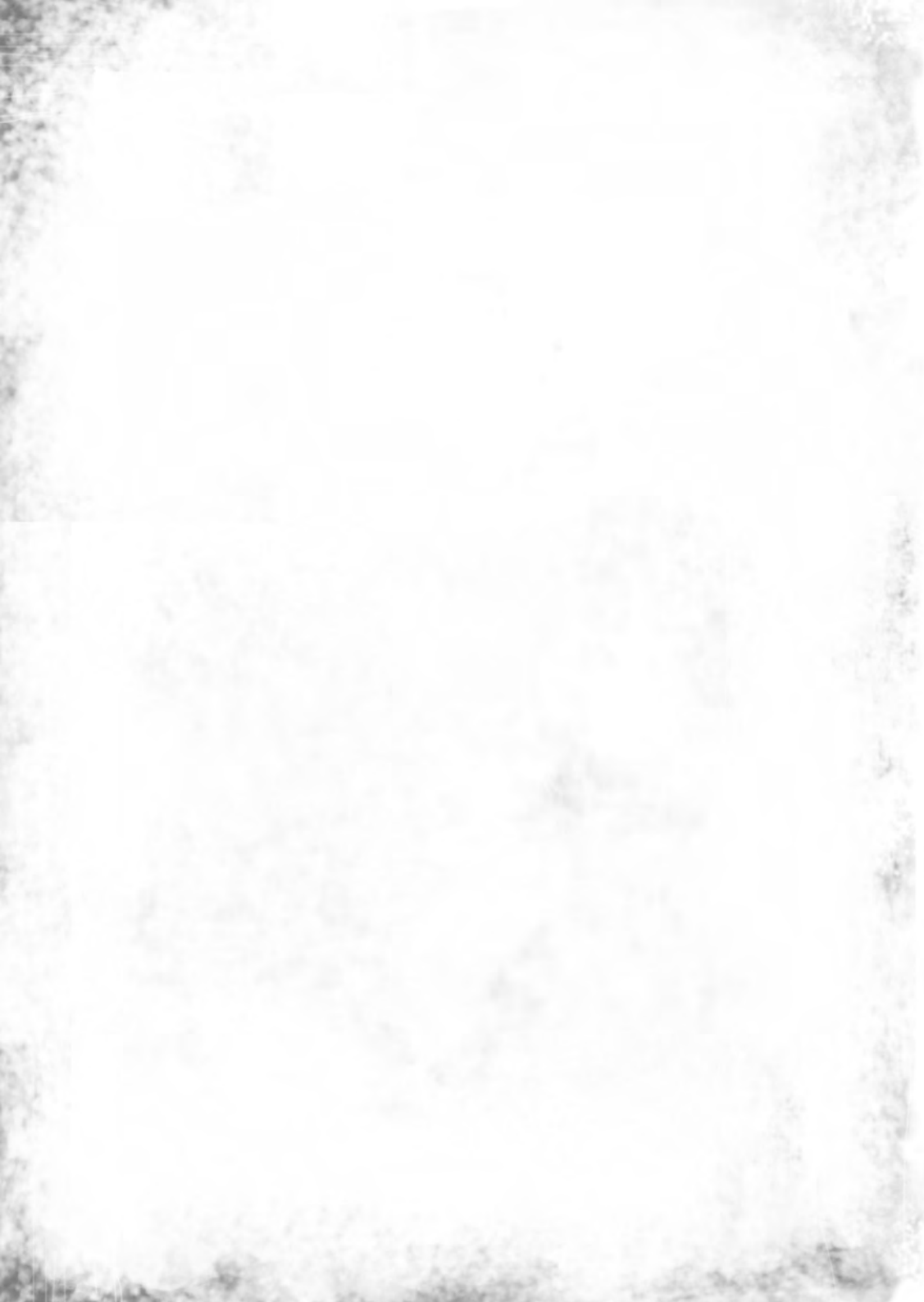
Ingatan Melintasi Taman

Lahir di Purwodadi

Saya lahir di kota kecil Purwodadi, Jawa Tengah pada tanggal 4 April 1928, dilahirkan sebagai anak ketiga dari pasangan Sutiyoso Sosrobusono dan Sumilah. Dua kakak saya bernama Sasongko dan Srini Tjondronegoro, sedangkan adik bernama Sisworini Hartini.

Ibu berasal dari tradisi bupati Kebumen, trah Arungbinang. Beliau anak terakhir dari lima bersaudara, sedangkan ayah saya adalah bupati ke-17 dari trah Tjondronegoro. Awalnya beliau bernama Sutiyoso Sosrobusono. Setelah menjadi bupati Semarang pada tahun 1949, sesuai tradisi ia berganti nama menjadi Sutiyoso Tjondronegoro.

Pengaruh Dunia Jawa

Kakek saya pernah menjadi bupati Ngawi sampai akhirnya menjadi pangeran. Namanya Sosrobusono. Beliau adalah trah dari Tjondronegoro, mulai dari yang ada di Pati sebagai Tjondronegoro XII; di Kudus Tjondronegoro XIII; sampai ayah saya Tjondronegoro XVII.

Ketika kakek masih menjadi bupati Ngawi, saat lebaran pasti kami sowan ke sana. Laku dodok, nyembah, nyuwun pangestu adalah sepenuhnya Jawa yang juga kami lakukan. Jawa campur Islam, semacam itulah. Selain itu, ada Pakde yang di Bandung, RM. Sosrokartono namanya, yang memberi pengalaman kejawaan terhadap diri saya. Beliau adalah kakak RA. Kartini. Seharusnya saya memanggilnya kakek, sebab beliau adalah adik dari eyang Sosrobusono. Namu kami lebih akrab memanggilnya Pakde.

RA. Sosrokartono bersekolah di Universitas Leiden pada bidang Sastra. Di Belanda ia tinggal selama 20 tahun lebih. Konon ia menguasai 24 bahasa, sebab sering melawat ke negaranega Eropa, hingga ia dapat menjadi penerjemah di Jenewa, di League of Nations (Volkenbond). Namun setelah pulang ke Indonesia, ia tidak melakukan pekerjaannya sebagai sastrawan, tetapi menjadi spiritualis atau paranormal yang pesantrennya bertempat di Pungkur Selatan, Bandung. Di sana ia mempunyai pesantren, memberi restu dengan air putih. Ketika masih bersekolah di ELS, saat akan ujian saya selalu meminta pangestu ke Pakde itu. Oleh ayah, saya diajak pergi ke Bandung. Di sana saya diberi air putih, didoakan agar dimudahkan dalam ujian.

Di keluarga kami masih sering menggunakan primbon. Menurut kepercayaan Jawa, bila anak lahir pada hari pasaran Jawa yang sama dengan Ibu, maka anak harus diangkat oleh keluarga lain. Saya dilahirkan pada weton Rabu Pahing sama

dengan weton ibu. Begitulah sekilas gambaran saya dalam tradisi keluarga Jawa.

Ayahanda Sutiyoso Sosrobusono setelah lulus dari HBS bekerja di Binenlandsche Bestuur, Batavia

Setelah pulang dari Sussex, Inggris, pasangan pengantin baru ini diunduh mantu oleh keluarga putra di jl. Adi sutjipto no 20 Salatiga, pada tahun 1971.

Eyang Kakung RM. P. Sosroboesono ketika menjabat sebagai Bupati Ngawi

Pengaruh Dunia Barat

Ayah angkat saya menjabat sebagai Asisten-Wedana. Kebetulan di Purwodadi ada seorang Direktur Volks Krediet Bank bernama Dubois yang boleh dikatakan tergolong tinggi dalam sektor perekonomian Belanda. Hubungan antara Ayah-Ibu saya dengan keluarga direktur tersebut begitu akrab. Maka demikianlah, akhirnya saya menjadi anak angkat laki-laki Dubois.

Meski lahir di Indonesia, kewarganegaraannya disetarakan setingkat dengan warga Belanda (gelijk gesteld). Ia lahir di Tumohon, dengan nama keluarga Tangkau. Saya tinggal

kembali dengan mereka waktu sekolah di Malang, di HBS. Saya tinggal di sana dari tahun 1941 hingga 1942. Pergaulan dan interaksi semacam itu memberi pengaruh barat pada diri saya. Sehari-hari saya menggunakan bahasa Belanda dan diberi bacaan buku-buku berbahasa Belanda. Agama mereka Protestan. Saya kadang turut mengantar mereka ke gereja waktu hari natal. Keluarga Dubois mempunyai dua anak perempuan yang kemudian menjadi kakak angkat saya. Yang satu menyukai piano jazz (barat), dan satunya lagi menyukai piano klasik Barat juga. Saya tidak bisa main tetapi suka sekali mendengarkan. Musik jazz yang dimainkan waktu itu diiringi dengan lagu, tidak seperti sekarang yang hanya instrumental, rythmis, hampir tidak mengenal melodi.

Jadi sejak lahir saya mempunyai orang tua dan orang tua angkat. Keduanya memberi pengaruh sedemikian rupa kepada saya sehingga cara hidup dan berbahasa Belanda tidak terlalu asing. Bisa dikatakan bahwa saya dari kecil sampai remaja berada di sekolah menengah yang terpengaruh oleh dua budaya, Jawa dan Belanda.

Ke-Indonesia-an sebagai budaya mulai tumbuh sejak pendudukan Jepang (1942). Tetapi kebanggaan sebagai warga pribumi sudah ditanamkan sejak muda. Mungkin juga karena di antara nenek moyang kami ada beberapa tokoh yang dapat dibanggakan, yang termuda di antaranya adalah R.A. Kartini. Perhatian beliau kepada generasi muda di pedesaan, lebih khusus gadis-gadis yang kurang berpendidikan di Kabupaten Jepara (Mayong), saya kagumi sejak muda dan barangkali secara tidak sadar pada awalnya mempengaruhi pikiran dan perhatian saya juga. Sayangnya saya tidak pernah bertemu karena beliau sudah meninggal tiga tahun sebelum saya lahir (1925). Tetapi dari cerita-cerita bude-bude yang pernah bekerjasama dengan Bude R.A. Kartini (tiga bersaudara: Kartini, Kardinah dan Soematri) dapat saya peroleh gambaran mengenai

perjuangan beliau, yakni berusaha mengangkat nasib mereka yang tertinggal di daerah pedesaan.

Pendidikan di Masa Transisi

Sebagai anak dalam keluarga yang Ayahnya bekerja di jajaran Pamong Praja zaman Hindia Belanda, saya turut tinggal berpindah-pindah di kota-kota kecil. Sebagai pamong Ayah memang dipindah-pindah dan karena itu saya tidak merasa berakar di satu daerah tertentu dan merasa dekat dengan penduduk pedesaan. Kota-kota kecil setelah meninggalkan Purwodadi seperti Bawang, Lasem, Dero masih menjadi ingatan mesra.

Bersekolah di Europese Lagere School (E.L.S.)

Waktu umur 5½ tahun Ayah ditugaskan menempuh studi kedinasan di Jakarta (Batavia) dan di sanalah saya mulai disuruh belajar di sekolah dasar Europese Lagere School (E.L.S.). Seingat saya di daerah Cideng. Setelah Ayah membicarakan dengan Kepala Sekolah tersebut, pada suatu hari pagi-pagi saya disuruh pergi sendiri ke sekolah. Guru yang menerima saya mengatakan bahwa umur saya masih belum sepenuhnya memenuhi syarat murid yang 6 tahun. Lalu guru menyuruh saya memegang telinga kiri dengan tangan kanan melalui atas kepala. Ternyata kalau belum dapat menjangkau telinga kiri, maka saya belum dapat diterima di kelas 1 (satu) E.L.S. Itulah uji badaniah yang menjadi ukuran serta persyaratan bila seorang calon murid belum mencapai 6 tahun penuh. Dapat dibayangkan bahwa kegagalam saya menimbulkan tangisan. Sendirian saya pulang sambil bercucuran air mata. Makna pelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut ialah bahwa perlu ada ketabahan serta keuletan dalam kegagalan.

Pengalaman lebih baik diperoleh waktu mulai diterima dan bersekolah di E.L.S. Rembang, waktu ayah menjadi We-

dana di Lasem. Berangkat dari rumah di Lasem saya dengan kakak-kakak setiap hari naik oplet ke Rembang. Mayoritas murid tentu anak Belanda dan Indo dan pelajaran yang diberikan juga dalam bahasa Belanda, mengikuti pola pendidikan mereka. Ketepatan waktu serta ketertiban menjadi sesuatu yang harus ditaati. Walaupun tidak berpakaian seragam toh harus bersih sampai kuku-kuku jari pun setiap senin diperiksa. Memang pendidikan formal dalam arti menambah pengetahuan dan perilaku murid diarahkan sejak muda.

Karena Ayah dari Lasem dipindahkan ke Purwokerto sebagai Wedana Kota, saya masuk di kelas satu juga di E.L.S. Purwokerto sampai tingkat kelas 5 (1933). Dari Purwokerto melanjutkan di E.L.S. Tegal (1937), dan menyelesaikannya hingga lulus dan mendapat nilai rata-rata 7 (nilai sampai 10).

Bersekolah di Hogere Burger School (HBS)

Sejak 1940 ada peraturan bahwa murid yang lulus dengan nilai rata-rata 7 dapat meneruskan pendidikan tanpa ujian ke sekolah menengah Hogere Burger School (HBS). Kesempatan ini saya ambil, karena juga orang tua angkat yang tinggal di Malang sangat mengharapkan saya tinggal bersama mereka. Demikian tanpa ujian saya dapat masuk dan diterima sebagai murid di kelas 1 HBS Malang dekat stasiun Staats Spoorwegen (S.S.). Di sini lagi-lagi mayoritas murid adalah pemuda Belanda dan Indo. Dari sekitar 1000 murid dahulu seingat saya hanya ada 60 murid Indonesia. Di dalam kelas saya, dari tiga puluhan murid hanya ada dua murid Indonesia; Boesono Puguh dan saya. Tetapi kebanggaan penulis ialah bahwa satu murid Indonesia dibanggakan dalam Ilmu Pasti, dan memang kemudian lulus di Technische Hogeschool, Delft. Sedangkan yang lain diunggulkan dalam bahasa Perancis.

Zaman dahulu, di sekolah menengah yang masih diutamakan dalam pengajaran bahasa asing (selain Belanda) adalah

bahasa Perancis dan Jerman. Baru di kelas 2 HBS mulai diajarkan bahasa Inggris. Bahasa Perancis lebih dipilih diajarkan daripada Inggris sebab dalam kebudayaan Eropa Barat Perancis lebih diunggulkan. Demokrasi dilahirkan di Perancis (Rousseau, Montesqieu dll.), juga di kalangan Corps Diplomatique bahasa Perancis lebih diunggulkan. Tampaknya baru setelah Perang Dunia II (1940-1945) bahasa Inggris secara bertahap menggeser bahasa Perancis dan bertambah pesat dengan semakin meluasnya pengaruh Amerika Serikat.

Bila dibanding-bandingkan sebenarnya sekolah HBS sudah lebih merakyat daripada Gymnasium. Bila yang pertama lamanya studi 5 tahun, yang kedua sampai 6 tahun, karena dalam Gymnasium juga diajar bahasa Yunani dan Latin (Grieks & Latijn). Jadi bila tertarik ke budaya mungkin cenderung memilih Gymnasium meski bagi murid/pemuda Indonesia kurang berfaedah. Selain lamanya waktu studi, Gymnasium juga kurang praktis untuk masyarakat kita. Pada umumnya peminat di sekolah tersebut semakin berkurang sebab Gymnasium merupakan sekolah bercorak elitist, lebih banyak orang Belanda. Pemisahan dalam HBS yang menjurus ke literair (budaya dan kesasteraan) atau ke eksakta sudah dikenal. Pemisahan itu tentu memudahkan kelanjutan studi lanjutan di tingkat universitas.

Sekolah SMP pada Masa Jepang

Studi saya di HBS hanya sekitar 1½ tahun, sebab setelah masuk tahun 1940 terkena dampak perang Asia serta adanya pendudukan tentara Dai Nippon. Dalam bulan Maret 1942 di Malang sekolah-sekolah Belanda ditutup. Pendidikan dengan gaya Jepang baru mulai lagi sekitar 6 bulan kemudian.

Dengan pendudukan Jepang Ayah angkat beserta kedua kakak angkat saya mulai tidak bekerja aktif lagi. Saya merasa menjadi beban bila terus tinggal bersama mereka. Seingat saya

sekolah-sekolah di Jakarta dibuka kembali pada bulan September tahun 1942. Atas saran orang tua, saya dan kakak pindah dari kota pendidikan masing-masing (Malang dan Jogya) ke kota Jakarta. Di kota ini sekolah menengah dengan nama Sekolah Menengah Pertama (S.M.P.) dan Sekolah Menengah Tinggi (S.M.T.) dibuka.

Di Jakarta ada 2 SMP, satu di Prapatan dan satu lagi di Manggarai. Sedangkan SMT di bekas sekolah Kanisius, kalau tidak salah di Menteng Raya. Kurikulum pendidikan berubah karena adanya penambahan pelajaran bahasa Jepang (zaman Belanda tidak ada pelajaran khusus bahasa Belanda). Yang sangat berbeda adalah pelatihan fisik. Kecuali ada olah raga ada pula latihan militer. Setiap pagi ada upacara dan pada hari-hari tertentu disertai mengibarkan bendera Dai Nippon. Latihan para-militer untuk menuju ke pembentukan Gakutotai. Anggota-anggotanya dilatih seperti dalam pendidikan kemiliteran: berbaris, lari dan dengan senapan kayu berlatih perang-perangan di lapangan Gambir.

Sejak pembukaan sekolah-sekolah menengah di Jakarta pada masa pendudukan Jepang, murid-murid masih bercampur antara pria dan wanita. Tetapi sejak 1943 khususnya di SMP Prapatan dan Manggarai terjadi pemisahan. Sehingga murid-murid perempuan dipindahkan ke gedung sekolah di Salemba. Apakah pertimbangannya juga untuk peningkatan militerisme tidak begitu jelas. Memang jenis olah raganya ditambah dengan sumo (gulat Jepang), dan latihan perang-perangan. Pola pendidikan baru juga saya alami ketika pindah ke SMP Ketabang di Surabaya menjelang akhir 1943. Disana saya menjadi kepala regu dalam Gakutotai. Menariknya di Surabaya ada gerakan di bawah tanah yang menggembleng Nasionalisme Indonesia, karena tentara Jepang di Pasifik mulai terdesak (1944). Saya termasuk didekati dan karena itu memainkan dua "peranan". Sebagai anggota Gakutotai dilatih yudo antara lain oleh perwira Kaigun (Angkatan Laut) , tetapi secara sembunyi

juga diindoktrinasi Nasionalisme dan dilatih pencak-silat. Jadi menjelang Jepang menyerah akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir 6 Agustus 1945, sebenarnya sebagian pemuda Indonesia sudah mulai dipersiapkan.

Karena itu tidak terlalu mengherankan mengapa Surabaya menjadi kota yang lebih Revolusioner. Pemuda menentang tentara Inggris di bulan Oktober 1945 dan mengepung beberapa daerah di perkotaan. Setelah cease fire, tentara Inggris ditarik kembali ke Tanjung perak. Tetapi tentara Inggris tetap diperintahkan untuk menguasai Surabaya. Akibatnya mereka maju menyerang kota kembali pada tanggal 10 Nopember 1945. Perlawanan tentara dan pendukung Republik Indonesia berlangsung sekitar 3 minggu. Tetapi supremasi persenjataan alat perang Inggris berhasil memukul mundur angkatan bersenjata kita. Pihak Indonesia terpaksa meninggalkan Surabaya dan bertahan di sebelah barat (Mojokerto) dan selatan (Porong)

Satu kemajuan dari pendudukan Jepang yang berpengaruh kepada pendidikan tentu adalah penggunaan bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa-bahasa asing lain tidak terlalu dipentingkan. Mungkin juga karena di belahan Asia ini musuh utama Jepang adalah Amerika, Inggris dan jajahan Inggris dan Belanda. Perancis sudah terdesak, dan mungkin masih ada pengaruhnya di Cambodia dan Viet Nam. Jadi bahasa Inggris, Perancis, dan Belanda tidak lagi digunakan.

Sekolah Darurat Masa Revolusi

Setelah penyerahan Bala-tentara Dai Nippon di bulan Agustus 1945 dan peristiwa itu disusul dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sistim pendidikan tidak langsung berubah. Tetapi dalam Kabinet yang terbentuk tentu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sekolah-sekolah menengah pada umumnya tidak mengubah kurikulum, kecuali bahasa Jepang dan berbagai keg-

iatan kemiliteran yang sudah tidak ada lagi. Kekurangan guru diganti dengan generasi lebih senior yang pernah menerima pendidikan di tingkat universitas.

Selama kurang lebih satu dasa-warsa sebelum perang dunia kedua Belanda sudah mendirikan pendidikan kedokteran, teknik serta hukum. Terutama di Jakarta dan Bandung telah didirikan lembaga pendidikan setingkat universitas, walaupun namanya masih Hoge School (sekolah tinggi) seperti Rechts Hoge School (untuk Hukum) di Merdeka Barat, Jakarta dan Technische Hoge School (untuk Teknik) di Bandung. Yang tertua adalah pendidikan kedokteran di Batavia/ Jakarta sehingga ada gelar "dokter Jawa"

Bidang-bidang ilmu lain tidak diajarkan di lembaga setingkat universitas, sehingga setelah zaman Kemerdekaan R.I. berdirilah universitas di beberapa kota lain seperti Yogyakarta (Universitas Gajah Mada), di Bogor Institut Pertanian Bogor, Technische Hogeschool Bandung menjadi Institut Teknologi Bandung. Berangsur-angsur didirikanlah universitas di Jawa (Semarang, Surabaya, Malang dll.), maupun di pulau-pulau lain di luar Jawa seperti Medan, Makasar, Menado, Palembang dan sebagainya. Jadi kebutuhan dan minat memperoleh pendidikan tinggi jelas semakin nyata. Sejak R.I. diakui secara internasional negara-negara Barat menawarkan pendidikan tingkat universitas.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah tahun 1948 saya pindah sekolah SMA di Jakarta saat pemerintah Jepang tidak berkuasa lagi dan pemerintah R.I. berpusat di Yogyakarta, karena tentara Sekutu (Inggris dan Belanda) menguasai Jakarta. Keadaan darurat perang (Staat van Oorlog en Beleg/ SOB) diberlakukan dan dalam status demikian kerumunan lebih dari 5 orang tidak diperbolehkan (1948). Akibatnya kumpulan satu kelas tidak dimungkinkan, sehingga murid-murid kelas SMT dimana saya menuntut pelajaran dipecah

menjadi kelompok 5 murid yang tinggalnya di satu wilayah agar berdekatan dan mudah berkumpul.

Hari-hari kerja guru berbagai bidang ilmu menerima wakil-wakil kelompok studi (pecahan kelas) di rumah dan memberi pelajaran; matematika, fisika, bahasa dan sebagainya. Setiap kumpulan demikian juga tidak melebihi 5 murid. Hari berikutnya kelompok murid satu wilayah bertemu dan menyampaikan pelajaran yang diperolehnya sebelumnya dari guru kepada teman-teman sekelompok.

Mengenai kualitas pelajaran dengan kondisi demikian memang tergantung dari daya serap murid yang menerima pelajaran dari guru dan kemampuannya menyampaikannya kepada teman-teman sekelompok. Keadaan demikian berlangsung sekitar satu setengah tahun. Namun akhirnya dengan ijin khusus dapat diselenggarakan ujian akhir SMT Gondangdia, Jakarta (bertempat di rumah Drs. Adam Bachtiar). Bahan ujiannya dikirim dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berpusat di Yogyakarta. Demikianlah saya dapat mengakhiri studi tingkat SMA saya di akhir tahun 1948.

Karena keadaan politik belum jelas setelah lulus, saya praktis tidak bekerja, dan sejak Desember 1948 hubungan RI dan Belanda bertambah tegang akibat aksi kedua (Politionele Actie) sehingga Yogyakarta pun diduduki tentara Belanda dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Moh. Hatta dibuang ke Bangka. Baru di tahun 1949 mulai diadakan pendekatan yang berwujud dalam Konperensi Meja Bundar (Ronde Tafel Conferentie) di Den Haag, Belanda. KMB berakhir dalam bentuk persetujuan mendirikan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pemerintah RIS ada di Jakarta tetapi hidupnya tidak lama, karena 17 Agustus 1950 RIS bubar dan RI berdiri tegak. Negara-negara Bagian RIS (Pasundan, NIT, Kalimantan Barat dll.) bubar dan dilebur menjadi provinsi-provinsi dalam tubuh RI. Mau tidak mau perkembangan politik demikian tentu berpengaruh pada

dinas pendidikan, sehingga kualitas lulusannya juga menurun walau sulit dinilai secara eksak. Tetapi menariknya setelah penyerahan kedaulatan penuh kepada pemerintah RI dibawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta, pemerintah Belanda juga negara pertama yang menawarkan kesempatan pendidikan kepada lulusan sekolah menengah Indonesia di negeri Belanda. Atas tawaran itu pemerintah Indonesia juga menanggapi secara positif.

Menjadi Mahasiswa di Belanda

Pasca Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan RI oleh pihak Belanda dilakukan beberapa usaha perbaikan hubungan. Salah satunya adalah usaha Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI membuka kesempatan belajar di negeri Belanda bagi peminat warga negara Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun tidak. Jalur resmi antara lain mengirimkan lulusan SMT dari Korps Demobilisasi Pelajar (KODP), yang menerima beasiswa dari Departemen P&K mulai awal 1950.

Ada lagi kelompok yang menerima beasiswa dari Departemen Pertahanan dan Keamanan dan dikenal sebagai Mahasiswa Angkatan Perang (MAP). Mereka banyak yang memilih Economische Hogeschool di Rotterdam (kemudian Erasmus Universiteit) dan Technische Hogeschool di Delft, misalnya termasuk alm. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro.

Saya yang masuk dari jalur KODP memilih Fakultas Ilmu Politik dan Sosial (baru didirikan tahun 1947) sebagai fakultas ke-7 di Universitas Kotamadya Amsterdam (Gemeentelijke Universiteit Amsterdam). Awalnya lembaga pendidikan tinggi ini didirikan pada awal abad ke-17 (1632) memisahkan diri sebagai Atheneum dari Universitas Leiden yang lebih tua.

FIPS Amsterdam yang didirikan setelah perang dunia ke-2 cukup progresif karena beberapa guru besar cendekiawan

Yahudi dan beberapa lain lagi paling tidak sympathisan Partai Buruh (P.v.d.A) yang sedang populer dan menanjak peranannya. FIPS terdiri atas 3 sub-fakultas : A. memfokuskan pada Politik, Sosiologi, Ekonomi dan Hukum; B. pada Sosiologi, Anthropologi, dan C. pada Psikologi dan Pedagogi.

Saya memilih Sub-fakultas A karena ingatan mengenai tumbuhnya RI. memang meliputi faktor-faktor Politik, Ekonomi, Sosiologi dan Hukum. Bahkan ada ilmu-ilmu lain yang diberikan melalui kuliah misalnya sejarah, hubungan internasional dan pilihan kuliah Ilmu Pers, Hukum Perburuhan dll.

Menariknya ialah penerimaan di Universitas Amsterdam waktu itu tidak mempersyaratkan suatu ujian sebelumnya; ini dapat diartikan bahwa lulusan SMT Indonesia sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk diterima di universitas. Jika mengingat cara pendidikan di SMT Jakarta sekitar 1948 ini saya anggap suatu keberuntungan. Syukur Alhamdullilah bahasa Belanda yang sejak 1933 di ELS dan sejak 1940 di HBS menjadi bahasa utama di sekolah masih cukup dikuasai untuk dapat mengikuti dan mencernakan semua kuliah dalam bahasa tersebut.

Untuk semua sub fakultas dalam tahun-tahun pertama diberikan dasar politik dan sosiologi (2 tahun) untuk dapat menempuh tingkat Sarjana Muda (candidaats) dari resminya yang 2½ tahun. Tetapi hampir tidak ada mahasiswa Belanda pun yang menempuh ujian dalam tahun ke-3 dalam masa belajar. Rata-rata kuliah-kuliah yang penting diberikan 2 x 45 menit dan setelah itu ada praktikum seperti untuk politik dan ekonomi. Yang memimpin adalah assisten yang sudah tamat dan menyandang gelar Drs.

Ada kebebasan dalam mengikuti kuliah di luar kurikulum dasar, sejak sebelum bergelar Sarjana Muda, sesuai minat dan perhatian masing-masing mahasiswa. Kebebasan itu saya manfaatkan misalnya untuk mengikuti kuliah filsafat, karena

banyak -kalau tidak semua – ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan (humaniora) toh berakar darinya. Walaupun yang dominan dipelajari kenyataannya adalah filsafat Barat, yaitu mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles di Yunani, tetapi juga dijelaskan pengaruh mereka ke dunia Islam seribu tahun kemudian. Sehingga Ibnu Rusyd, Ibn Sina dan dalam abad ke-14 pun Ibn Khaldun dijelaskan juga apa sumbangan mereka terhadap ilmu pengetahuan.

Jadi fisafat dan sejarah terasa saling berdampak menambah pengetahuan maupun pemahaman budaya. Melalui filsafat sebenarnya juga kita dapat memahami dasar-dasar pemikiran (postulat) ilmu-ilmu dasar sekalipun dan mengerti bahwa kuantifikasi dalam ilmu perlu, tetapi juga memahami bahwa ada proses abstraksi sejumlah faktor (think away). Pemahaman demikian berguna dalam mengikuti kuliah-kuliah antara lain penunjang ekonomi seperti Boekhouden, Handelsrekenen dan Statistiek.

Untuk menunjang mata kuliah yang dianggap dasar dalam sub-Fakultas A ada dua ujian yang harus ditempuh; yang pertama sering disebut propadeuse dan bila lulus baik dapat maju ke ujian besar. Pada umumnya ujian-ujian diselenggarakan oleh para dosen di ruang kerja atau bahkan di rumahnya. Jadi untuk ujian besar selalu hubungan pribadi dan "4 mata". Baru bila semua persyaratan sudah dipenuhi, ujian untuk Candidaat (sarjana muda) dan sarjana (doctoral) dilakukan di ruang fakultas dan dihadiri oleh 3-4 gurubesar dalam semacam komisi yang menjadi penguji.

Pola studi guna mencapai gelar Doctorandus sebenarnya tidak banyak berbeda, hanya kecuali ada beberapa mata pelajaran utama, perlu ditambah dengan 2 mata pelajaran pilihan. Jadi ilmu Politik, Ekonomi, Hukum dan Sosiologi masih tetap ada, tetapi saya tambahkan dengan mata pelajaran pilihan: Hukum Perburuhan dan Press Sciences.

Kebebasan mahasiswa bila telah menyelesaikan kuliah dapat menentukan sendiri bilamana ingin menempuh ujian. Jadi mengajukan permohonan kepada guru besar bersangkutan. Laporan hasil tentamen dan ujian SM atau S1 dilaporkan kepada Pedel yang merupakan kepala administrasi Universitas. Hasil ujian akhir ditentukan guru besar-guru besar yang menguji dan mahasiswa yang lulus menerima diploma yang memuat bidang-bidang utama ilmu yang telah dipelajari, tanpa ada penilaian. Inilah yang diterimakan kepada mahasiswa yang lulus dan dapat menyandang gelar akademisnya, dalam hal saya Doctorandus (calon Doktor).

Boleh dikatakan dasar penilaian adalah kelulusan atau tidaknya seorang mahasiswa waktu menempuh tentamen. Bila baik dan lulus langsung tak ada masalah, tetapi mahasiswa yang kurang baik mempelajari literatur dan perkuliahan dapat diminta kembali lagi 3 sampai 12 bulan untuk diuji ulang, tergantung dari kedalaman penguasaan ilmu. Karena itu timbul sistim Tentor, sarjana yang membuka perusahaan membimbing mahasiswa yang akan menempuh ujian, agar lebih siap. Memang pembimbingan beberapa bulan demikian harus dibayar mahasiswa sendiri, karena ini bukan termasuk sistim pendidikan formal.

Pendidikan formal hanya meminta uang kuliah setiap tahun, karena waktu itu di universitas Belanda tidak dikenal pembagian semester seperti di Inggris atau Amerika Serikat. Di awal tahun 1950-an uang kuliah setahun berjumlah NF 300 sudah termasuk pemanfaatan semua perpustakaan universitas. Tetapi semua buku pelajaran wajib dan peralatan lain bila ada harus dibeli mahasiswa sendiri dan ini yang barangkali menjadi beban cukup berat bagi keluarga menengah kebawah, apalagi bila banyak anak yang disekolahkan.

Menjadi Calon Asisten Prof. Wertheim

Setelah mencapai Sarjana Muda, saya pada tahun 1957 mulai bekerja paruh waktu sebagai Candidaat-Assistent Prof. Dr. W.F. Wertheim yang mengajar Sosiologi non-Barat (Non-Western Sociologi).

Pemandangan di van Voustraat, seberang dari tempat tinggal "indekost". Dibuat tahun 1962

Saya bekerja membantu beliau bila ada praktek kerja mahasiswa. Juga membantu mempersiapkan kuliah, apa saja

literatur yang dibutuhkan dan sebagainya. Yang terpenting adalah, waktu itu dengan Wertheim saya turut menulis karangan tentang proyeksi kependudukan Indonesia setelah tahun 1950 hingga tahun 1980. Melalui tulisan inilah akhirnya menjadikan saya sedikit menanjak ke level internasional. Meski nama saya tidak tercantum dalam tulisan tersebut, namun ketika Wertheim mempresentasikan di PBB, ia memberitahukan bahwa tulisan itu dipersiapkan dengan saya. Kemudian ketika lulus, saya ditingkatkan menjadi junior co-researcher.

Kesan saya, beliau adalah guru besar yang jujur, penuh integritas. Beliau pernah berkata: “bila kita masuk ke dunia akademik, jangan sampai masuk ke partai politik. Sebab akan membuat bias. Meski kita boleh bersimpati pada parpol”. Maka ketika saya masuk menjadi anggota MPR tahun 1992-1997 dengan Pak Selosumardjan, saya bukan mewakili parpol, namun dari golongan apa yang waktu itu dinamakan sebagai kelompok cendekiawan. Meski sebagai asisten Menteri dan Sekretaris Dewan riset Nasional kami diharuskan masuk menjadi anggota Golkar, namun ketika menyuarakan pendapat di MPR kita tidak mewakili Golkar. Kita berbicara sebagai apa yang disebut kelopok cendekiawan itu. Pada tahun 1992 ketika diadakan sidang pleno MPR, saya mengusulkan agar MPR melakukan pertemuan rutin untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang telah diagendakan dalam Pelita. Jadi saya mengusulkan agar kita bersidang, memberi penilaian atas kinerja selama separo perjalanan Pelita, 2,5 tahun begitu; menilai apa yang tidak baik dalam kinerja pemerintah yang telah terlaksana dan mengatakan apa yang seharusnya dilakukan. Namun usul saya itu tidak disetujui. Bahkan dalam internal fraksi Golkar pun usul tersebut tidak didengar.

Dalam tahun 1957-1958 Prof. Wertheim memang menjadi Guru Besar Tamu di Fakultas Pertanian, Departemen Sosial Ekonomi (masih di bawah Universitas Indonesia) dan bertin-

dak sebagai promotor Ir. Kampto Utomo (sekarang emeritus Prof. Sajogyo) dalam memperoleh gelar Doktor.

Peluang yang diberikan kepada saya untuk menjadi Candidaat Assistent merupakan suatu penilaian akademis yang positif, tetapi juga berarti tambahan penghasilan bulanan, walaupun tidak terlalu banyak, selain beasiswa yang telah saya terima dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ini berlangsung sampai pemutusan hubungan diplomatik antara kerajaan Belanda dan RI, akibat sengketa nasionalisasi perusahaan besar Belanda di Indonesia. Menjadi panjang lagi akibat masalah kedaulatan Irian Barat (1959-1962).

Timbul masalah bagi saya sebab: (1) mahasiswa Indonesia diminta pemerintah agar melanjutkan studi di negeri lain, (2) pengiriman beasiswa berhenti, sehingga saya hanya hidup dari gaji sebagai assisten Prof. Wertheim dan berstatus pegawai universitas kotamadya Amsterdam. Dengan gaji bulanan Nf. 180 memang hidup benar-benar pas-pasan. Untung uang kuliah tidak ditagih lagi.

Sesuai dengan pengumuman KBRI agar meninggalkan Negeri Belanda untuk melanjutkan studi di negara lain, saya berusaha meminta pindah ke Amerika Serikat atau Inggris, di mana Ilmu Sosiologi semasa Perang Dunia ke-2 juga masih berkembang. Kecuali itu saya mencari peluang di beberapa tempat di Jerman Barat seperti Freie Universität Berlin, Wilhelmshafen dan Frankurt. Tetapi pilihan ini kurang menarik, akibat dari pemerintahan Adolf Hitler, Sosiologi tidak berkembang dan rasialisme meluas.

Lamaran ke beberapa universitas di luar negeri Belanda mendapat jawaban dari Political Department, London University, dan Prof. Ginsberg kebetulan berkunjung ke lembaga (Seminarium voor Zind-Dost Azië) yang dipimpin Prof. Dr. Wertheim tempat saya bekerja. Tawaran Prof. Ginsberg sebenarnya sangat menarik, karena setelah beliau mengetahui

apa yang telah saya pelajari untuk gelar SM dan sebagian kuliah kesarjanaan. Ia menjelaskan bahwa di London saya akan dapat mengikuti beberapa kuliah saja dan segera menulis MSc thesis.

Penerimaan yang menggembirakan itu saya laporkan ke KBRI di Brussel, Belgia. Tetapi setelah beberapa lama baru ada jawaban, bahwa pemerintah RI kurang dapat membiayai kelanjutan studi saya di London. Setelah itu saya menghubungi Prof. Wertheim lagi. Untung beliau bersedia menerima saya kembali, karena toh pernah menjadi pegawai universitas Amsterdam. Demikianlah maka saya kembali ke kedudukan lama sebagai assisten sampai 1961. Setelah selesai studi dan mendapat gelar Doctorandus, saya malah diangkat menjadi peneliti (wetenschappelijke medewerker) yang dapat saya jabat sampai bulan Mei 1963, ketika saya pulang ke Indonesia.

Sebenarnya sambil menunggu, karena saya ingin kembali lebih dekat ke Indonesia, Prof. Wertheim mencarikan saya kesempatan kerja di lembaga Indonesian & Malay Studies University of Sidney yang baru dibuka. Sebelum pulang sebenarnya saya sudah melamar, tetapi antara 1961-1963 waktu masalah Irian Barat masih tegang, KBRI di Bonn, Jerman Barat meminta saya tetap tinggal di negeri Belanda guna mengumpulkan informasi tentang sikap dan kebijakan politik pemerintah Belanda.

Studi saya di bidang Politik & Sosial memungkinkan saya berhubungan dengan kelompok-kelompok progresif Belanda yang menyetujui penyerahan kedaulatan. Bahkan saya dapat berhubungan dengan anggota parlemen Belanda di Den Haag. Beberapa organisasi mahasiswa antara lain dari Vrije Universiteit juga sangat mendukung kebijaksanaan agar kedaulatan diserahkan kepada RI., yang akhirnya terjadi dalam tahun 1962. Setelah itu saya diperbolehkan pulang dan dibiayai pemerintah sebagai penerima beasiswa pemerintah RI.

Kembali ke Tanah Air

Demikianlah setelah hampir 14 tahun di Eropa ada keputusan untuk pulang ke Tanah Air. Dalam perjalanan pulang, saya manfaatkan untuk mampir di beberapa universitas di Timur Tengah: di Istanbul Turki; American University di Lebanon; Universitas di Cairo dan Al Azhar, Universitas di Teheran, Iran. Tempat-tempat yang besejarah yang dikunjungi misalnya, di Istanbul yang mengesankan adalah Mesjid Blue Mosque di tepi pantai Selat Bosporus dan makam Reza Pahlevi di Tehran. Dan terakhir adalah Chulalongkorn Universty di Bangkok.

Foto muda tahun1963, ketika tiba di Indonesia dari Belanda

Sepulang di tanah air bulan Mei 1963, memang ada tawaran juga untuk melamar ke Departemen Luar Negeri atau ke Leknas. MIPI, tetapi rasanya sudah cukup mantap pilihan di Bogor karena ingin mempelajari lebih mendalam masyarakat pedesaan. Mungkin karena pernah hampir tiga tahun hidup sebagai pejuang TRIP di Jawa Timur yang turut memperkuat pilihan tersebut.

Bergabung dengan Institut Pertanian Bogor

Setiba di tanah air saya selanjutnya melamar di UI. Pilihan melamar di Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, UI yang berada di Bogor, didasarkan atas pertimbangan agar tidak terlalu jauh dari ibu kota Jakarta, sehingga hubungan internasional tidak berkurang.

Sebelum itu, sewaktu saya masih di Amsterdam pernah berjumpa dengan sosiolog Drs. Soedjito dari UGM yang sedang dalam perjalanannya menuju Universitas di Hull, Inggris untuk belajar di bawah bimbingan Prof. Jaspan. Ia juga menawarkan peluang agar saya menjadi dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Waktu itu toh Universitas Indonesia sudah lebih dikenal juga di luar negeri, sehingga itu juga turut menentukan pilihan saya. Pertimbangan memilih UI Bogor, tidak kurang pula karena tahun 1962 saya bertemu Dr. Ir. Kampto Utomo di Brussel bersama mantan promotornya, Prof. Wertheim.

Kebetulan juga pada tahun 1963 Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan di Bogor bergabung menjadi Institut Pertanian Bogor (setingkat universitas) secara mandiri lepas dari UI. Beberapa Fakultas bahkan ditambah misalnya Perikanan, Peternakan, Teknologi Pangan dan Mekanisasi Pertanian. Kerjasama IPB waktu itu masih dengan Universitas Kentucky dalam hubungan "Kentucky Contract Team" yang diketuai

oleh Prof. Dr. H.W. Beers, yang juga seorang ahli Sosiologi Pedesaan.

Walaupun secara resmi saya menjadi pegawai IPB pada Juli 1963, namun awal 1966 sudah diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran di Amerika Serikat bersama dengan 20 rekan dosen lain. Ternyata juga dari ITB dipilih kurang lebih 20 dosen untuk dikirim ke Amerika. Mungkin bukan lamanya bekerja yang menjadi persyaratan, tetapi lebih penguasaan bidang ilmu dan bahasa Inggris. Saya tentu bergembira, tetapi juga ikatan dinas saya masih begitu pendek, sehingga Prof. Sajogyo juga mengatakan agar saya dapat membandingkan studi di universitas Eropa dan Universitas Amerika Serikat. Waktu itu juga kembali beberapa rekan dosen Sosiologi dari universitas Kentucky dengan gelar M.Sc seperti Sudarmadi, Rochani dan H. Suwardi. Sayangnya ketiga-tiganya sudah almarhum. Khusus mengenai belajar saya di Amerika ini akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Bersama Pak Sajogyo dan Bu Pudjiwati Sajogyo dalam acara dies natalis IPB ke-30, di kampus Darmaga, 1993

Kurikulum di Departemen Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian di Bogor menarik bagi saya, karena dua tahun pertama mahasiswa harus tinggal di daerah pedesaan selama 2 minggu untuk mengenal masyarakat pedesaan dari dekat. Pada tingkatan yang lebih tinggi mahasiswa harus melakukan praktek 3 bulan di daerah pedesaan. Bila sudah pada tahap penyelesaian studi, mereka menulis skripsi atau karya ilmiah dalam periode 6 bulan mengenai masalah pedesaan. Baik yang memilih jurusan ekonomi pertanian ataupun sosiologi pedesaan harus mengikuti kurikulum sebagaimana dikemukakan di atas. Artinya mereka yang lulus dari jurusan Sosial Ekonomi dapat menghayati kehidupan masyarakat pedesaan dan petani.

Setelah kurikulum diubah dan studi S-1 dipersingkat menjadi 4 tahun atau 8 semester (1975/ 76), praktek lapang dan karya ilmiah berdasarkan praktek di pedesaan ditiadakan. Artinya perubahan tersebut berdampak pada penghayatan mahasiswa dan lulusan IPB tentang permasalahan pedesaan dan petani. Mungkin akibat itu alumni IPB juga cenderung memilih pekerjaan di perkotaan, bahkan di luar pertanian. Sehingga dewasa ini ada pemerhati yang mengatakan bahwa IPB (Institut Pertanian Bogor) sudah menjadi Institut Pertanian Bukan. Daya tarik ke perdagangan hasil pertanian, perbankan dan sebagainya sudah jauh lebih kuat. Mereka yang tertarik melanjutkan studi meneruskan sekolah di Pasca Sarjana sampai S-2 atau S-3/ Doktor.

Bila ingin dilihat segi positifnya, dari pendidikan yang diperoleh di IPB dapat dikatakan bahwa bekal akademis (tidak selalu professional) cukup dihargai di masyarakat, sehingga alumninya dapat diterima di berbagai bidang usaha atau di jajaran birokrasi pemerintahan. Terlebih setelah IPB menjadi lembaga Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Anggaran yang diterima dari Kementerian Pendidikan Nasional sudah berkurang. Universitas BHMN lain seperti UI, Universitas Gadjah Mada, dan ITB harus mengusahakan tambahan

anggaran yang dibutuhkan dari program-program lain. Akibatnya dibukalah kesempatan pendidikan yang lebih singkat dan menghasilkan tambahan anggaran yang diperlukan, di bawah istilah Extension. Masa pendidikannya lebih singkat dan orientasinya adalah menghasilkan lulusan potensial yang segera dapat dipekerjakan. Sekarang yang laris ialah Komunikasi, Management, Bisnis, Komputer dan lain-lain. Artinya dasar akademis tidak perlu terlalu luas dan mendalam.

Sementara itu SPP (uang kuliah) baik di tingkat pra-sarjana maupun pasca sarjana berlipat menjadi jutaan rupiah untuk biaya masuk dan bayar setiap semester. Bagi orang tua calon mahasiswa yang cukup berada, timbul pikiran yang dapat dipahami yakni memikirkan alternatif untuk mengirim puteranya ke suatu universitas di luar negeri. Meski juga memakan biaya tinggi tetapi kualitas pendidikannya lebih terjamin. Pada umumnya masyarakat juga memandang lulusan universitas luar negeri masih lebih berkualitas. Penguasaan bahasa asing, lebih khusus bahasa Inggris saja, sudah dianggap suatu nilai plus (nilai tambah).

Sekarang baru universitas-universitas terbesar yang diberi status BHMN. Tetapi bila pemerintah kesulitan anggaran, tentu dapat diterapkan kepada universitas-universitas lain yang dianggap sudah lebih mandiri. Sasaran RAPBN untuk menyediakan anggaran 20% untuk pendidikan lebih ditujukan kepada pendidikan dasar dan menengah, sehingga pembebasan SPP untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama (total selama 9 tahun) secara bertahap akan dapat menjadi kenyataan.

Dewasa ini memang anggaran negara yang disediakan masih sekitar 12% per tahun (2008). Sementara sudah banyak tuntutan di daerah agar pemerintah segera melaksanakan janjinya agar langsung meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20%. Tampaknya harapan ini belum dapat diwujudkan

dalam tahun 2008 yang akan datang. Bila pendidikan kurang dibiayai, akan berakibat kurangnya hasil penelitian. Terlebih hasil penelitian yang dapat memperoleh HAKI (patent) tidak akan banyak. Bila ada pun akan dicari patent di luar negeri.

Bagian Kedua

80 tahun
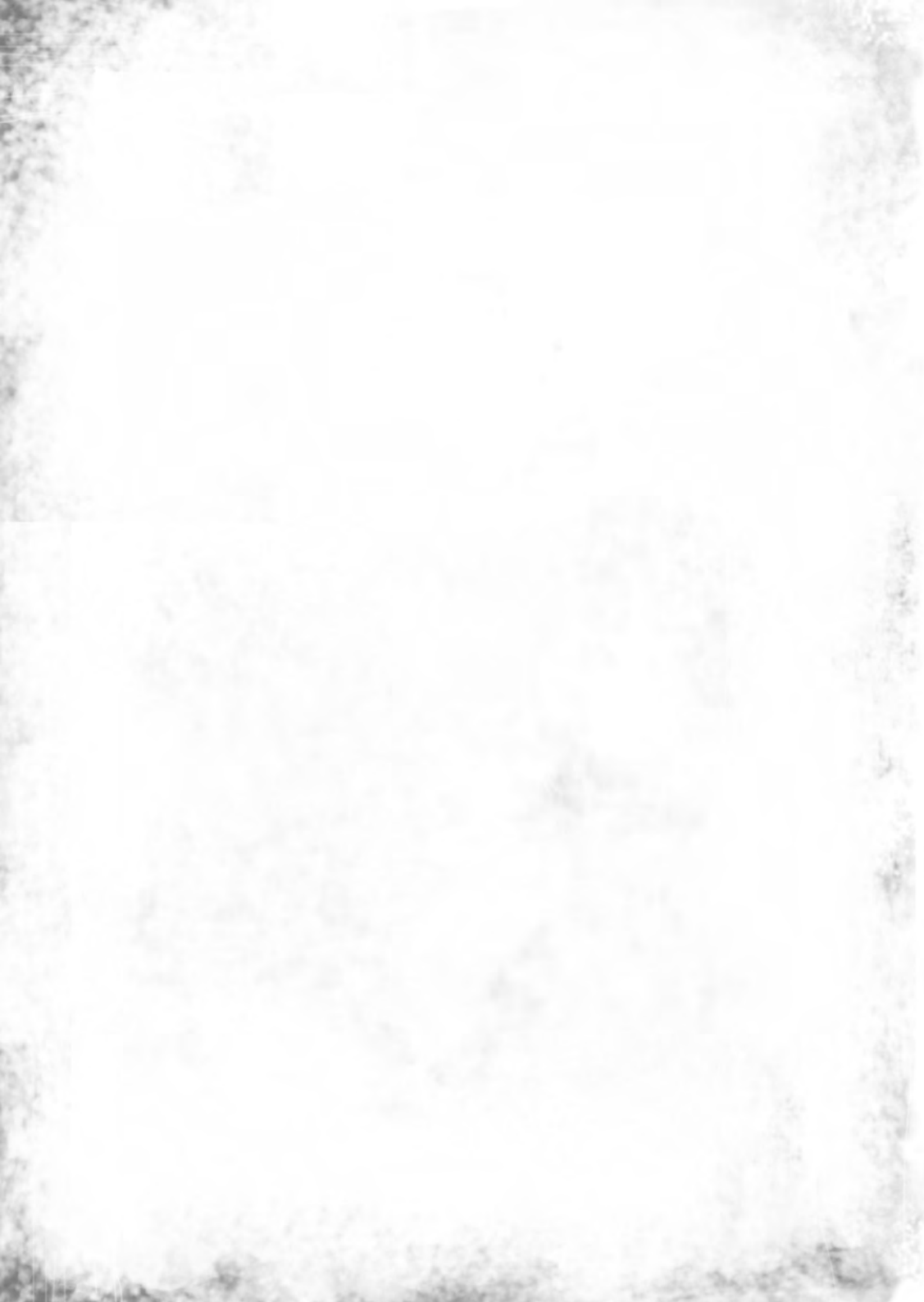
Bekal Pendidikan

Setiap studi di universitas tentu menjadi bekal untuk memilih jenis pekerjaan dan membangun karier. Masa belajar dan bekerja saya di lingkungan universitas selama 15 tahun di luar negeri saya rasakan telah meletakkan dasar cukup mantap. Mengingat kembali misalnya kurikulum di FIPS Amsterdam yang pernah dipenuhi terdiri atas mata pelajaran bidang-bidang ilmu sebagai berikut:

Bidang Ilmu	Sarjana Muda	Sarjana
Ilmu Politik	2 tahun	2 tahun
Ilmu Ekonomi	2 tahun	2 tahun
Ilmu Hukum Negara	2 tahun	2 tahun
Sosiologi Umum	2 tahun	2 tahun
Falsafah	1 tahun	-
Sejarah	2 tahun	-
Amerikanologi	2 tahun	-
Hukum Perburuhan	-	2 tahun
Sosiologi Negara Berkembang	-	2 tahun
Ilmu Pers	2 tahun	-

Selain praktikum dan tugas-tugas menulis karya ilmiah (referaat), juga diwajibkan mempelajari buku-buku wajib setiap mata kuliah dan harus dipelajari buku-buku yang diacu dalam kuliah agar garis pemikiran menjadi lebih jelas. Dalam ujian lisan (tentamen) tidak jarang buku-buku acuan itu juga menjadi sumber pertanyaan dari Gurubesar penguji. Boleh dikatakan penguasaan bacaan/ literatur yang luas turut menentukan penilaian.

Belajar di Universitas Wisconsin, Amerika

Di atas telah sedikit disinggung bahwa setiba di tanah air saya segera bergabung dengan IPB. Namun baru 3 tahun bekerja di SOSEK IPB yang telah banyak tambahan bekal yang saya rasakan, pada pertengahan tahun 1966, Prof. Sajogyo memberi ijin kepada saya untuk belajar di Amerika Serikat. Waktu itu memang juga masih ada kerja sama antara IPB dan Kentucky Contract Team. Kata Prof. Sajogyo supaya saya dapat membandingkan studi di Eropa dan di Amerika Serikat. Tentu saya berterima kasih dan memanfaatkan kesempatan itu sehingga pergi ke Kentucky University dahulu bersama 19 rekan IPB lain dan 20 dosen ITB.

Setelah beberapa minggu di Kentucky Univesity, termasuk orientasi ke Washington DC rombongan sekitar 40 dosen dari IPB dan ITB meninggalkan Lexington, Kentucky, menuju kota-kota lain setelah memilih universitas yang dipandang paling sesuai. Setelah mempelajari berbagai brosur, pilihan saya jatuh ke University of Wisconsin. Ini juga setelah mohon pendapat Prof. H.W.Beers. Pilihan tersebut turut dipengaruhi oleh karena di Madison, Wisconsin ada lembaga Land Tenure Center yang telah menjadi perhatian pribadi. Ternyata di sana saya juga bertemu dengan banyak mahasiswa pasca sarjana dari negara-negara Amerika Latin yang meminati Reforma Agraria.

Organisasi universitas di Amerika Serikat memang berbeda dengan universitas di Eropa. Di Amerika Serikat tidak dibagi dalam Fakultas tetapi langsung dalam Departemen. Boleh dikatakan lebih langsung menuju spesialisasi. Dalam bidang sosiologi pun ada Departement of Rural Sociology dan Departement Sociology. Di dalam Social Science Building terdapat Sociology, Politics, Anthropology dan Demography, dengan masing-masing bidang keilmuan mempunyai kurikulum yang berpola tertentu. Tidak begitu mudah untuk mengikuti kuliah bidang ilmu lain bila tidak terdaftar sebagai mahasiswa.

Saya resmi terdaftar di Department of Rural Sociology yang termasuk gugus Agriculture. Tetapi banyak kuliah yang diikuti adalah tentang Sosiologi Umum di gedung Department Social Sciences. Banyak kuliah yang diambil di Departemen Ilmu & Sosial, dimana berbagai mata kuliah Sosiologi Umum diberikan, misalnya Sosiologi Organisasi, Sosiologi Perubahan, Sosiologi Kelembagaan dan lain-lain. Terdapat mata kuliah yang lebih khusus disampaikan langsung oleh Prof. Talcott Parsons tentang teori Struktur & Fungsi. Saya beruntung mendapat pelajaran dari Prof. Hans Gerth yang banyak menterjemahkan teori-teori Max Weber, dan menerbitkan sebagai penyunting From Max Weber. Beliau mengajar topik ekonomi, birokrasi, dan sosial-ekonomi. Beliau juga yang menawarkan supaya saya meneruskan studi sampai PhD. Barangkali karena beliau mendapat kesan bahwa saya hasil pendidikan universitas Eropa, dan karena di Amsterdam saya juga telah meminati dan mempelajari Max Weber.

Tentang pendidikan di Wisconsin University saya rasakan jauh lebih ketat dibanding dengan di universitas Amsterdam. Kebebasan dirasakan sangat berkurang karena waktu sudah ditetapkan dalam satu semester. Ini yang saya rasakan kurang nyaman pada usia yang lebih lanjut dan karena sudah bekerja

sebagai assisten penelitian di Amsterdam dalam lembaga Prof. Wertheim.

Pengalaman-pengalaman selama kuliah di Belanda sangat berbeda dibanding dengan di sini. Kuliah-kuliah berbagai ilmu diberi nomor dan terstruktur. Semakin lanjut tingkat studi, semakin tinggi juga nomornya. Jadi di tingkat pasca sarjana untuk meraih gelar MS atau PhD, nomornya pada umumnya di atas 500 sampai 900. Perkuliahan diukur dengan credit point, dan untuk gelar BS, MS atau PhD sudah ditentukan minimum credit points-nya. Dalam perkuliahan terdapat praktikum yang kelasnya sering dibagi ke dalam kelompok yang lebih kecil. Kelompok ini dirangsang bekerja sama dalam menyusun makalah kelompok yang didiskusikan dalam kuliah kerja. Jumlah tugas menulis sepertinya lebih banyak dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya di Universitas Amsterdam. Di sana juga ada referaat, tetapi tidak sebanyak di Wisconsin. Ujian pada umumnya bersama dalam ruang (klassikaal) dan pemberian angka umum diberikan bukan sekedar nilai kualitatif. Pemberian angka berkisar antara 1 dan 4 (tertinggi). Jam kuliah rata-rata 50 menit dan bila dilakukan perpanjangan ada 10 menit istirahat. Waktu itu juga diperlukan untuk pindah ruangan bagi mahasiswa yang harus pindah ruang mengikuti kuliah lain.

Tugas penulisan makalah boleh dikatakan sama dengan pengalaman di Amsterdam; pada umumnya membahas suatu buku dengan topik tertentu. Tetapi dalam prakteknya, harus pula mencari dan membaca timbangan buku (review) lain yang sudah beredar. Dengan ritme dan derap yang lebih ketat, studi di Amerika Serikat memang lebih menyibukkan (hectic) karena mengejar jadwal.

Akhir semester hasil studi diberitahukan kepada mahasiswa, sehingga dapat direncanakan kelanjutan atau ulangan studi untuk semester berikutnya. Tentu ada semacam persaing-

an antara mahasiswa satu kelas yang mengikuti kuliah sama, untuk menjadi A-grade student. Pemacuan seperti itu ada positifnya, tetapi juga ada kerenggangan akibat persaingan.

Dari sudut fasilitas, bagi mahasiswa pasca sarjana saya merasakan diberi fasilitas yang baik, misalnya dalam hal perpustakaan. Mahasiswa pasca dapat meminta Carrol di dalam ruang penyimpanan buku perpustakaan. Mahasiswa bebas mengambil/ meminjam buku yang diperlukannya dan menyimpannya dalam Carrol selama dibutuhkannya. Kalau meminjam dan ingin dibawa pulang harus melaporkan. Masa peminjaman dibatasi mingguan. Bekerja di Carrol dapat dilakukan dari pagi sampai malam hari sekitar jam 8, tetapi di ruang baca di lantai dasar dapat belajar sampai pukul 2 pagi. Banyak mahasiswa muda (undergraduate) menggunakan kesempatan itu. Mungkin mahasiswa pasca yang rata-rata lebih tua, yang sudah berkeluarga atau ada yang bekerja diluar universitas kurang menggunakan kesempatan itu.

Sistim studi di AS terasa lebih memacu dibandingkan dengan di Eropa, karena itu mungkin juga jumlah tamatan tahunan MS dan PhD lebih besar di AS. Tetapi sekaligus juga lebih terpusat pada profesinya dan kurang "Scientific Comprehension", artinya kurang peka terhadap pemikiran multidisiplin yang lebih luas. Barangkali karena, terutama di bidang ilmu-ilmu sosial, falsafah tidak terlalu menjadi bekal dasar yang saya rasakan lebih diberikan di Eropa. Jadi dulu boleh dikatakan universitas di AS lebih menghasilkan "doers" dari pada "thinkers". Mungkin karena itu juga lebih banyak diminati pemuda dari negara-negara berkembang yang bila pulang harus memecahkan berbagai permasalahan. Kontemplasi dan renungan kurang dibutuhkan di negara asal mereka. Padahal dalam kenyataannya, untuk menerapkan ilmu di lingkungan budaya bukan Barat sangat perlu memahami nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat asalnya.

Satu cara pendidikan dan pengujian terutama pada tingkat awal, misalnya untuk tingkat BSc atau juga untuk tingkat MSc, adalah adanya ujian dengan sistim pilih jawaban atas pertanyaan tertentu (multiple choice). Ini suatu cara yang memang mempercepat, baik dalam memberi jawaban maupun dalam menilai hasilnya. Tetapi bagi beberapa mahasiswa muda sering menggunakan sistim jawaban "probability". Bila multiple choice formulirnya panjang dan dalam keterbatasan waktu kurang dapat memikir terlalu lama, maka mereka menerapkan sistim "probability". Misalnya kelompok pertanyaan pertama dijawab dengan memilih jawaban setiap nomor satu atau tiga. Pertanyaan kedua dan berikutnya dengan kombinasi nomor jawaban yang lain lagi. Rupanya pembuat ujian dan penyusun pertanyaan juga dari awal sudah mengikuti pola tertentu. Pola demikian sudah diketahui beberapa angkatan/ generasi mahasiswa, sehingga pengetahuan ini diwariskan kepada angkatan muda yang baru masuk. Kata mereka memang ada pengaruh ilmu statistik, sehingga kadang-kadang tanpa belajar terlalu intensif, bila tahu polanya juga 50% pertanyaan dapat dijawab benar dalam sistim multiple choice.

Cara-cara demikian memang dapat dilahirkan dalam pendidikan massal; (mass education) dan tak dikenal dalam pendidikan elitis (elitist education). Ini dulu agaknya juga menjadi perbedaan antara pendidikan tinggi di AS dan di Eropa. Keuntungan sistim tersebut memang memperpendek masa studi dan untuk masyarakat secara potensial tersedia tenaga kerja dengan keahlian tingkat universitas yang dibutuhkan. Ini sesuai dengan keadaan dimana pertumbuhan ekonomi juga cukup deras.

Kembali di Indonesia di tahun 1963 sebenarnya di IPB juga sudah mempunyai sistim pendidikan yang lebih menyerupai sistim di AS. Misalnya dalam masa studi yang resminya 4 tahun, tidak ada lagi tingkat atau gelar Sarjana Muda. Studi

langsung menuju ke perolehan kesarjanaan dengan gelar Ir pertanian.

Sejak awal 1950 memang Departemen P&K dan Departemen-departemen sektoral lain mulai mengirimkan dosen-dosen dan pegawai menengah ke Amerika Serikat. Juga dari AS ada tawaran menarik melalui USAID untuk lulusan SMA belajar di Amerika. Generasi ini mulai kembali sekitar 1960 karena studi di Universitas AS memang lebih cepat, dibandingkan dengan di Eropa. Pembangunan Indonesia juga membutuhkan semakin banyak tenaga berpendidikan universitas, terlebih di jajaran birokrasi pemerintah pusat di Jakarta.

Pengiriman mahasiswa ke Eropa sepertinya berkurang dari tahun ke tahun walaupun tidak ada data statistik yang pernah saya lihat. Kemungkinan juga persepsi tentang AS sebagai negara yang relatif muda – dibandingkan dengan negara-negara di benua Eropa – dan teknologi yang maju pesat setelah perang dunia kedua, menimbulkan daya tarik yang lebih kuat bagi kaum muda Indonesia. Juga dunia swasta tampaknya membutuhkan pegawai yang lebih terampil di dunia perdagangan/ bisnis, seperti tenaga manajer, perbankan dan perdagangan internasional. Bahasa Inggris jelas menjadi bahasa komunikasi internasional baik di sektor pemerintahan maupun perdagangan dan swasta umumnya.

Lembaga-lembaga baru di masa pasca Perang Dunia II, seperti Perserikatan Bangsa-bangsa, Bank Dunia dan didirikannya USAID di banyak negara berkembang yang baru merdeka dengan menyediakan banyak dana, menambah daya tarik ke Amerika Serikat.

Seperti telah dikemukakan di atas, IPB tahun 1963 sudah bekerja sama dengan Kentucky Contract Team. Setelah kerjasama itu berakhir, menjalin kerjasama baru dengan Mid Western University Consortium Indonesia (MUCIA), suatu kerjasama yang dibiayai melalui USAID dengan universitas-universitas

Barat Laut/ Tengah AS, seperti universitas Minnesota, Michigan, Ohio, dan Wisconsin. Sejak tahun 1950-an LIPI misalnya juga sudah mengirimkan staf peneliti mereka ke California, Cornell N.Y. dan Harvard University.

Bila ditelusuri kembali pengiriman pemuda Indonesia lulusan SMA cukup berskala internasional. Selain ke negara-negara Eropa Barat (1950), juga terdapat pengiriman ke Uni Soviet antara lain Lomonosov University di Moskwa (1958). Meski jumlahnya paling besar adalah pengiriman ke Amerika. Baru mulai tahun 1980-an ada pengiriman ke negara Asia, misalnya ke Jepang, (Tokyo, Kyoto). Tidak saya ketahui apakah ada juga pengiriman ke United Nations University di Tokyo, di mana Dr. Soedjatmoko alm. pernah menjadi Rektor universitas tersebut.

Mengenai pendalaman masalah agraria yang mendapat perhatian khsusus penulis, di Amerika terdapat kesempatan yang sebelumnya tidak pernah ada, yaitu belajar di Land Tenure Center, University of Wisconsin. Ini adalah lembaga yang khusus mempelajari berbagai masalah agraria,terutama banyak kasus dari negara-negara Amerika Latin yang dapat dipelajari. Selain itu juga bergaul dengan mahasiswa Mexico, Colombia dan Argentina yang dapat menceritakan masalah agraria di negeri mereka.

Dari perjumpaan dan pergaulan itu semakin timbul keyakinan dalam diri saya bahwa kemerdekaan dan perbaikan nasib petani harus melalui Reforma Agraria, yang tidak semata-mata berarti redistribusi tanah. Satu contoh dalam sejarah adalah setelah revolusi di Mexico tahun 1910 juga petani kaya Haciendado yang mempunyai hacienda atau tanah pertanian luas (Latifundia) dipaksa menyerahkan sebagian tanah pertaniannya kepada peon, sehingga ia menguasai minifundia. Tetapi dalam kenyataan peon tidak cukup diberi modal untuk menjadi mandiri, sehingga sering minifundia kembali kepada

Haciendado. Jadi memang Reforma Agraria bukan kebijkasanaan yang terlepas dari sektor-sektor pembangunan lain. Tambahan pengetahuan ini jelas berfaedah untuk berbagai jabatan yang saya pegang.

Pertengahan 1968 kembali di IPB sepulang dari Amerika, saya diangkat menjadi Sekretaris Eksekutif Departemen SOSEK karena Ketua Departemen, Dr. Syarifuddin Baharsyah agak sibuk di tingkat Institut guna turut memberi masukan kebijaksanaan kepada Rektor IPB.

Periode 1965-1967 akibat perubahan dari masa Orde Lama ke Orde Baru terjadi penggantian jabatan-jabatan struktural dan dosen-dosen yang dianggap berpihak pada Orde Lama diganti oleh dosen yang mendukung Orde Baru. Sukar diingkari bahwa juga terjadi pertentangan politik, karena organisasi mahasiswa dan simpatisan Nasionalis digeser oleh organisasi mahasiswa Islam yang lebih pro-Orde Baru dan anti Sosialis.

Kegoncangan di kampus sudah tidak terasa lagi waktu saya kembali dari Amerika Serikat. Di samping memegang jabatan sebagai sekretaris eksekutif, saya memberi kuliah biasa (sejak 1968).

Sejak 1969 ketika Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan Pembangunan Nasional berencana (Pembangunan Lima Tahun I, 1969/ 1970), IPB banyak diminta melakukan penelitian dan survey di daerah pedesaan. Departemen Pekerjaan Umum (PU) antara lain ditugaskan melakukan rehabilitasi sistim pengairan dan pembangunan waduk serta saluran irigasi di daerah pertanian karena Indonesia menderita kekurangan pangan. Deprtemen Pertanian meningkatkan produksi pangan dalam rangka Revolusi Hijau.

Mendalami Agraria dan Bekerja di Lembaga PBB

Walaupun Pemerintah Orde Baru menghentikan Landreform yang baru dimulai oleh Orde Lama (1961), kebijakan di ganti dengan melakukan perluasan areal pertanian untuk pangan maupun untuk perkebunan tanaman ekspor besar, artinya masalah tanah tetaplah penting.

Melalui survey-survey di berbagai daerah di luar Jawa seperti Lampung, Sulawesi Selatan, Irian barat dan tengah, saya merasa bertambah pengetahuan tentang permasalahan agraria di luar Jawa. Ini saya rasakan waktu pertengahan 1971 dikirim ke Institute of Development Studies di Sussex, Inggris. Di sana menghadiri penyelenggaraan Seminar Internasional tentang masalah agraria yang berlangsung selama lebih dari satu bulan. Direktur IDS yang mengetuai Seminar adalah Prof. Michael Lipton, yang dikenal sebagai penulis buku mengenai Kemiskinan dan Urbanisasi. Peserta-peserta Seminar selain dari Asia ada yang dari Afrika dan Amerika Latin. Sumbangan makalah saya mengenai keadaan agraria di Indonesia akhirnya diterbitkan oleh Land Tenure Center di Wisconsin University dimana saya pernah mengikuti kuliah dan belajar.

Setelah kurang lebih sebulan berada di Sussex dan kembali ke Bogor, pada tahun 1972 saya diangkat sebagai konsultan ECAFE (Organisasi PBB untuk Asia dan Timur Jauh). Tugas saya di Social Development Division adalah menulis Social Survey of the Region (antara India sampai kepulauan Fiji di wilayah Pasifik).

Laporan dan statistik dari puluhan negara anggota ECAFE terpaksa dibaca dan dipelajari dalam 6 bulan. Akibat tidak cukupnya waktu untuk mengunjungi sekian banyak negara, terpaksa harus berkonsultasi dengan WHO untuk masalah kesehatan, ILO untuk perburuhan, FAO untuk pertanian dan

UNESCO untuk pendidikan dan kebudayaan. Selain itu dalam menyusun laporan ada Population Division di bawah ECAFE yang sangat membantu saya, karena cukup tersedia data statistik kependudukannya tentang negara-negara anggota.

Laporan tersebut selain mendeskripsikan keadaan sosial ekonomi pada masa itu juga memberi saran-saran mengenai peningkatan kesejahteraan penduduk, karena di wilayah ECAFE, kecuali Jepang terdapat mayoritas "negara berkembang". Laporan yang diselesaikan akhir 1972 kemudian disidangkan di konperensi besar. Seingat saya bertempat di Tokyo. Sebelumnya juga pernah dibahas di Bangkok oleh wakil-wakil dari WHO, FAO, ILO, UNESCO dan undangan dari Sekretariat ECAFE sendiri.

Sebagai mantan konsultan hingga sekarang pun masih dikirim majalah bulanan dari Population Division, yang sudah disebut UNFPA yang dahulu sering saya manfaatkan dalam kuliah Ilmu Kependudukan di Departemen SOSEK IPB. Pada tahun 1970-an Economic Social Commission for Asia and the for East (ECAFE) sudah berganti nama menjadi Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (ESCAP).

Waktu saya mulai bekerja di ECAFE, sebenarnya PBB sudah atau baru mengakhiri program 1st UN Development Decade (1960-1970). Program ini antara lain bertujuan untuk memerangi kemiskinan. Tetapi karena program di akhir dasawarsa belum berhasil, maka diperpanjang lagi dengan program serupa, yakni 2nd UN Development Decade (1970-1980).

Ternyata 20 tahun usaha mengurangi kemiskinan di seluruh bumi juga belum berhasil secara memuaskan sehingga memasuki abad ke-21 dirumuskan lagi dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang di tahun 2015 sudah harus mengurangi golongan termiskin di seantero bumi sampai 50%.

Tetapi kriteria mana yang dipakai untuk mengukur kemiskinan belum begitu jelas. Kalau menggunakan kriterium Bank Dunia, mungkin mereka yang berpenghasilan per-hari di bawah USD 1,00/ KK, orang miskin di Indonesia tinggal 20 juta orang saja. Tetapi ada pula perhitungan lain dari oleh Bank Dunia, yakni dengan angka USD 2,00 per hari per orang. Bila ini diterapkan maka jumlah orang miskin di Indonesia diduga mencapai 100 juta (± 45%). Ini berarti hampir separo dari jumlah penduduk yang diperkirakan 230 juta dewasa ini.

Juga bila kita telusuri kembali laporan-laporan BPS dan Bank Dunia (2007) jumlah orang miskin masih lebih dari 35 juta, dan pada tahun 1987 adalah 30 juta. Suatu angka yang masih tinggi. Artinya persentase turun tetapi jumlah orang miskin bahkan lebih, walaupun juga lebih banyak orang yang kaya. Artinya kesenjangan antara lapisan kaya dan miskin melebar. Mirip dengan RRC dan India yang pertumbuhan ekonominya melebihi 8 % per tahun tetapi yang miskin masih ratusan juta. Mengutip Farid Zakaria (2007) : "As China moves up the value chain, so the gap between rich and poor grows dramatically". "It is unique as a world power, the first in modern history to be at once rich (in aggregate terms) and poor (in per capita terms"). Demikianlah mengapa kita jangan terlalu cepat bergembira dan penuh harapan bila pertumbuhan ekonomi per tahun kita baru mencapai 6,5 % saja. Sekarang pun dengan BBM, Sembako, pendidikan, perumahan dan kesehatan menjadi mahal, pengeluaran per kapita (expenditure) juga terpaksa menurun.

Belajar Bekerja di Pemerintahan

Saya berpengalaman membantu Prof. Sajogyo menyiapkan naskah laporan UPGK (buram) bersama beberapa rekan dari bidang Gizi Masyarakat dan Ekonomi Pertanian, semasa beliau menjadi Guru Besar tamu di Universitas Hawai. Sejak itu pada tahun 1974 saya diminta membantu Direktur Jenderal

Transmigrasi dan diberi tugas sebagai Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi di Jakarta. Waktu itu Direktorat Jenderal tersebut masih termasuk Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi (NAKERTRANSKOP). Tugas saya adalah mengkoordinasi latihan di daerah untuk calon yang akan diberangkatkan, dan juga mengadakan penelitian yang bercorak evaluasi terhadap para transmigran setelah ditempatkan di daerah transmigrasi.

Menariknya juga adalah tentang masalah agraria dan pengembangan wilayah yang ternyata juga tercakup di dalam tugas-tugas. Untuk hal ini dapat saya lakukan bersama dengan Dr. Joan Hardjono dari UNPAD. Beliau sangat membantu dalam hubungan dengan FAO dan Lincoln Institute dari Amerika Serikat yang turut memberi dana untuk kegiatan Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi (PLPT). Publikasi yang berhasil diterbitkan ada yang dalam bahasa Inggris, karena Ibu Joan adalah dosen bahasa Inggris sekaligus menjadi editor.

Lincoln Institute sudah lama membantu suatu pusat latihan mengenai landreform di Taoyuen, Taiwan, di mana kami dan beberapa staf lain pernah ditugaskan. Kami merasakan bahwa perhatian di bidang-bidang yang kami minati benar-benar dipenuhi melalui penugasan sejak menjadi dosen di IPB. Pengetahuan Sosiologi diperkaya dengan pemahaman aneka kasus dari masyarakat yang sangat nyata. Pengalaman lapang tersebut juga sangat berguna untuk memberikan contoh dan ilustrasi berbagai pengertian dan proses yang tercakup dalam ilmu Sosiologi. Semakin dimengerti bahwa Sosiologi sebenarnya adalah bidang ilmu yang bercorak menganalisa gejala secara "lintas disiplin". Tidak mengherankan bila kemudian saya juga tertarik pada lingkungan (Environmental Sciences) yang lebih makro dan komprehensif serta multidisiplin.

Di tahun 1978 BIOTROP di Bogor menyelenggarakan suatu pelatihan untuk peserta-peserta dari negara Asean men-

genai Environmental Science and Management . Sebagai salah satu penceramahnya saya menyampaikan materi tiga kali mengenai An Introduction to Human Ecology. Dan inilah yang menjadi bahan awal untuk menyusun perkuliahan mengenai Ekologi Manusia di Sekolah Pasca Sarjana IPB, yang dimulai awal tahun 1980-an. Tampaknya hal ini juga mulai diketahui oleh beberapa lembaga di luar negeri, sehingga pertengahan 1980 saya menerima undangan dari ICRAF di Nairobi, Kenya dalam penyelenggaraan acara Consultative Meeting on "Land Tenure and Agroforestry in Indonesia" (1985). Juga di Indonesia timbul minat di beberapa universitas mengenai tema lingkungan. Kepada Pusat Antar Universitas yang sepenuhnya didukung IPB, saya menyampaikan prasaran tentang "Environmental Sciences and Human Ecology" (1988).

Pemikiran-pemikiran yang semakin lintas dan multidisiplin demikian, memang sudah dikupas mendalam oleh Fritjof Capra (1981) dalam bukunya "The Turning Point; Science, Society and the Rising Culture" dan sangat menjiwai penulis juga. Singkatnya perusakan alam karena pertumbuhan industri besar bila dilanjutkan pada skala dewasa ini akan banyak menimbulkan malapetaka bagi manusia, termasuk kekurangan pangan. Misalnya ada satu kesimpulan : …"agribisness not only perpetuates world hunger but is extremely careless in the way it treats the natural environment.." (hal. 279). "Agribisness, then, ruins the soil on which our very existence depends, perpetuates social in justice and world hunger, and seriously threatens global ecological balance".

Kesadaran mengenai kecenderungan yang digambarkan di atas, di antara rekan-rekan IPB ada yang terdorong untuk mendirikan fakultas-fakultas baru di dalam IPB antara lain dengan nama Fakultas Ekologi Manusia (FEMA-IPB) di tahun 2005.

Pemerintah Indonesia sebenarnya juga sudah semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan hidup. Sehingga menjelang akhir Pelita V atau Pembangunan Jangka Panjang 25 pertama, pemerintah memberlakukan UU no.24/ 1992 tentang tata ruang. UU ini merupakan hasil perjuangan Menteri Negara Lingkungan Hidup Prof. Dr.E. Salim. Penulis berterima kasih atas pengikutsertaan beberapa lama di masa mempersiapkan RUU tersebut karena juga dapat berinteraksi dengan tokoh-tokoh lingkungan seperti Prof. Dr. Otto Soemarwoto dan Prof. Hasan Poerbo alm.

Hubungan-hubungan yang cukup banyak dengan ilmuwan berbagai disiplin ilmiahlah yang mungkin menjadi pertimbangan alm. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Menteri Riset untuk menarik saya sebagai salah satu anggota tim yang memikirkan dan mempelajari pembangunan Indonesia sampai tahun 2000. Suatu proyeksi ekonomi yang didasarkan atas pertumbuhan penduduk serta kebutuhan sumberdaya alam akhirnya dihasilkan sebelum Prof. Soemitro diganti oleh menteri Negara Riset dan Teknologi Prof. Dr. B. J. Habibie.

Bahkan sebelumnya (1977) Meneg Riset alm. Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Prof. Dr. Widjojo Nitisastro sebagai Ketua BAPPENAS dan Menteri EKUIN telah ditugaskan oleh Presiden Soeharto untuk menyelenggarakan evaluasi antar Departemen atas masalah ketersediaan tanah dalam rangka kebutuhan pembangunan nasional.

Penulis yang ditugaskan sebagai sekretaris eksekutif dalam evalusi kilat tersebut (November 1977- Maret 1978) berhasil merangkum berbagai pemikiran baik dari pejabat lembaga pemerintah maupun ahli-ahli universitas dalam suatu laporan interim masalah pertanahan yang diserahkan kepada Presiden Soeharto menjelang Pelita-3 (1978-1982). Walaupun laporan tersebut oleh Menteri Pertanian Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro dimanfaatkan sebagai salah satu sumber

informasi sewaktu memimpin delegasi Indonesia menghadiri World Conference on Agrarian Reform and Rural Development (WCARRD) yang diselenggarakan oleh FAO di Roma, Italia, pada hemat penulis pelaksanaan Reforma Agraria tak kunjung dilaksanakan di Indonesia. Bahkan pemerintah Orde Baru sebenarnya tidak ada niat untuk memberi landasan kuat bagi pembangunan nasional menuju kearah industrialisasi dengan membenahi struktur agraria terlebih dahulu yang timpang sejak jaman penjajahan Belanda. Sebagai alasan sering dikemukakan bahwa Reforma Agraria adalah program Partai Komunis Indonesia. Padahal yang menyetujui dibentuknya Panitia Negara untuk merumuskan UUPA no.5/ 1960 adalah Founding Fathers RI. yaitu pada tahun 1947/ 48. Berbagai kegoncangan politik dialami RI. yang baru lahir, mengakibatkan hasil Panitia Negara tersebut baru dapat dipersembahkan pada bulan September 1960.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah ada pergantian Menteri Negara Prof. Soemitro oleh Prof. Habibie struktur organisasi Kementerian juga diubah. Menteri Negara Habibie yang membidangi Riset dan Teknologi sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan BPPT, yang semula adalah suatu lembaga pengkajian dari BUMN Pertamina. Untuk membantu beliau, Prof. Habibie mendirikan suatu Dewan Riset Nasional yang mencakup 5 Komisi, masing-masing di bidang (1) Kebutuhan Dasar Manusia; (2) Kedokteran; (3) Industri; (4) Pertahanan dan Keamanan, dan (5) Sosial Ekonomi. Beliau sekaligus menjadi ketuanya.

Penulis yang diangkat menjadi Assisten V merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif DRN dan praktisnya juga mengetahui Kelompok/ Komisi V (1984-1996). Tugas DRN adalah memantau perkembangan dan merumuskan program-program penelitian di masing-masing bidang. Tentu juga melaksanakan apa yang ditugaskan Menteri Habibie sebagai Ketua. Hubungan dengan lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI

harus dipelihara dengan baik. Karena itu sebagai wakil ketua DRN diangkat Ketua LIPI. Demikianlah Ketua LIPI Prof. Dr. Doddy Tisnaamidjaya alm. menjabat sebagai wakil ketua DRN. Setelah beliau meninggal diganti oleh ketua LIPI baru Prof. Dr. Samaun Samadikun alm. Hubungan baik kecuali dengan lembaga-lembaga sejenis di negara tetangga, juga dengan Board on Science and Technology (BOSTID) Amerika Serikat.

Bersama Amien Rais dan Taufik Abdullah dalam acara kunjungan kelompok V DRN, Yogyakarta1997

Tugas besar dan berat di dalam negeri adalah turut menyumbang pemikiran kepada perumusan Garis Besar Haluan Negara dan lebih khusus buku-buku Repelita. Karena itu DRN ditugaskan menghubungi Litbang-litbang Departemen yang tugasnya merumuskan program penelitian nasional secara terpadu. Tetapi dalam kenyataannya, masing-masing litbang lebih merencanakan sesuai dengan petunjuk menterinya. Sayangnya koordinasi belum terjadi sebagaimana diharapkan sehingga kerjasama DRN lebih sering dengan lembaga non-departemen

dan universitas daripada dengan departemen Sektoral. Namun secara tidak resmi anggota DRN yang juga bekerja dalam litbang Departemen Sektoral misalnya kesehatan, perindustrian, sosial dan lain-lain, berjasa menyumbang pemikiran yang berguna untuk merumuskan Program Utama Nasional (PUNAS) RISTEK.

Sebagai Asisten Meneg Ristek Prof. Habibie sejak 1984 penulis tentu cukup sering mendampingi beliau bukan saja waktu pemerintah mengunjungi lembaga di daerah atau keluar negeri, tetapi yang lebih teratur adalah menghadiri sidang Komisi VIII DPR- RI. Di sanalah sebenarnya kebijaksanaan Riset dan Teknologi dibicarakan dan dinilai oleh wakil-wakil rakyat. Karena Prof. Habibie sebagai Menteri juga menjadi koordinator 10 lembaga penelitian non Departemen seperti BPPT, BATAN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPS dan lain-lain, menarik untuk mengikuti pembicaraan mengenai anggaran. Indonesia sebagai Negara berkembang tentu tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi yang kemajuannya jelas tidak dapat dilepaskan dari kegiatan penelitian.

Mungkin karena sudah cukup memahami peran DPR-RI selama satu windu (1984-1992) maka pada tahun 1992 penulis dipilih sebagai anggota MPR-RI 1992-1997, khususnya dalam kelompok cendekiawan. Di bidang ilmu Sosial alm. Prof. Dr.Selo Soemardjan tentu juga dipilih.

Sayangnya peran MPR dalam penentuan kebijaksanaan Negara tidak terlalu berarti. Penulis dalam sidang awal di tahun 1992 pernah mengusulkan agar MPR-RI dapat bersidang menilai hasil pelaksanaan kebijaksanaan di tengah periode pelaksanaan setiap Pelita. Maksudnya agar dapat menilai keberhasilan serta menyempurnakan program yang belum dilaksanakan baik. Tetapi usul tersebut tidak mendapat cukup dukungan dari berbagai fraksi dalam MPR-DPR

Pengalaman dan pelajaran yang dapat diperoleh penulis ialah kesadaran bahwa dalam pembangunan nasional pendekatan dan program antar-disiplin sangat penting. Tetapi memang dalam kenyataan koordinasi antar-departemen kita masih lemah. Kedudukan Menteri Koordinator pun sering belum cukup efektif menyelenggarakan koordinasi. Istilah KIIS (Keluar Istana Sendiri-Sendiri), karena itu bukan saja istilah untuk bersenda gurau, tetapi merupakan suatu kenyataan. Anggaran belanja negara diperlakukan terlalu sektoral, sehingga kesan penulis konsultasi antar Departemen tidak cukup intensif; tercapainya kompromi di pusat belum tentu juga dapat dilaksanakan di lapang karena menghadapi berbagai kendala, batas kewenangan dan anggaran.

Bagian Ketiga

80 tahun
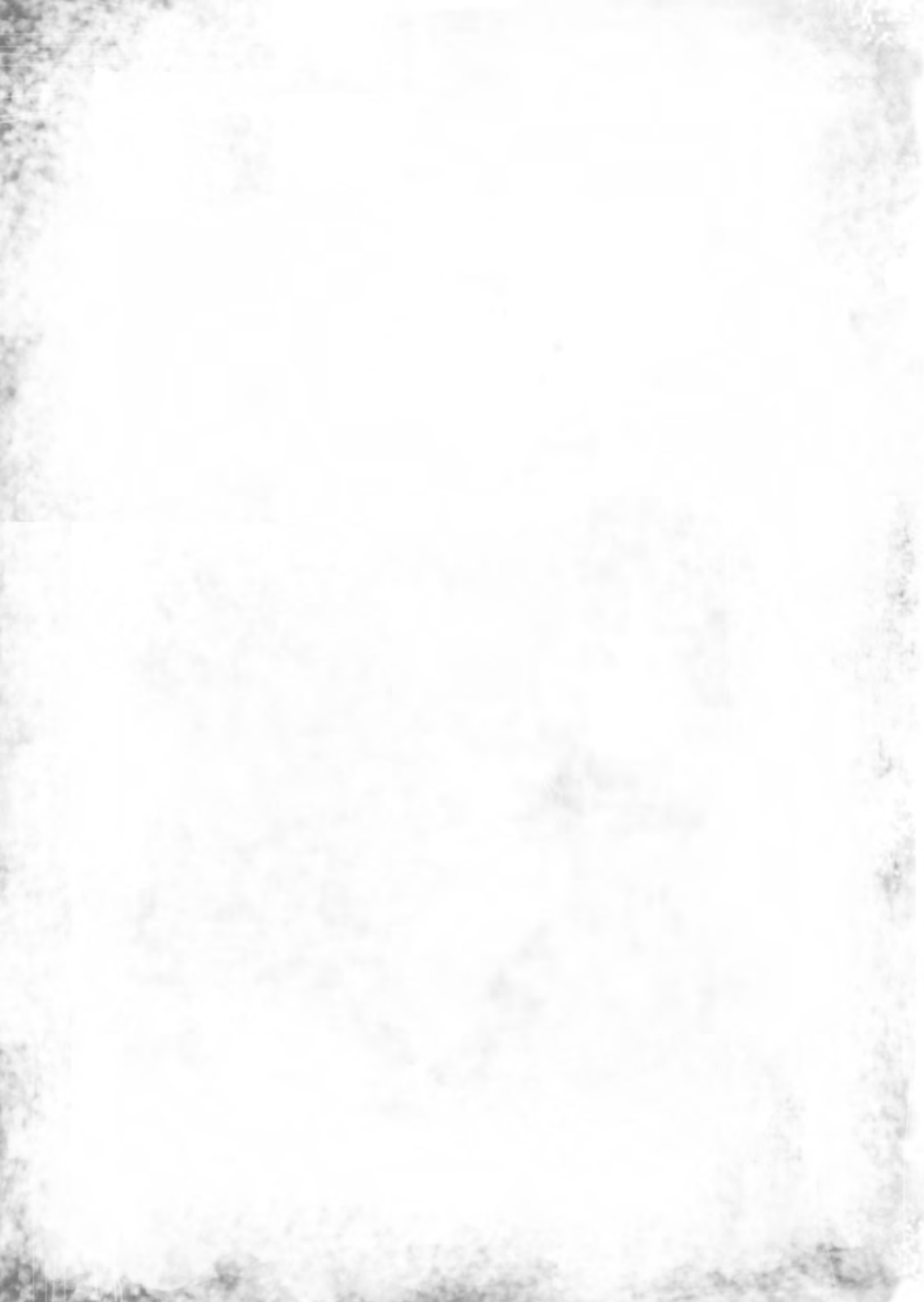
Kegiatan Dalam Organisasi

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu, pengalaman hidup seseorang sulit dipisah-pisah secara mutlak (dichotomized) antara satu dengan lainnya. Tetapi melalui pemisahan bidang pengalaman yang diusahakan di sini mudah-mudahan pembaca dapat lebih mudah memahami sejarah kegiatan penulis dalam berbagai jenis organisasi dari kepramukaan, ketentaraan, himpunan profesi, kepemerintahan sampai lembaga swadaya masyarakat.

Mungkin karena keterlibatan dalam keanekaragaman organisasi sosial tersebut thesis S-3 penulis mendalami gejala organisasi, khususnya bagaimana penduduk pedesaan mengartikannya.

Menjadi Anggota Padvinderij

Pendidikan dasar di Europese Lagere School paling lama diperoleh di Purwokerto. Selama Ayah menjabat Wedana di sana, beliau menyuruh baik kakak laki-laki maupun penulis sendiri untuk masuk dalam organisasi pramuka Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIPV). Ayah sangat terkesan dengan pendiri Boy Scouts yakni Lord Baden Powell, seorang tokoh Inggris (veteran dari Afrika Selatan) yang mendidik pemuda menjadi mandiri dan membantu masyarakat sekitarnya. Organisasi disusun dalam regu-regu dan satuan organisasi lebih besar dengan hierarki kepemimpinan. Jadi di sana memang diajarkan disiplin. Sebagai pemimpin berbagai tingkat wajib memberi contoh melalui kepemimpinan yang baik. Kakak penulis sudah sampai menjadi kepala regu sedangkan penulis antara umur 8-10 tahun menjadi anggota regu biasa. Latihan-latihan yang diberikan mendidik kemandirian pemuda dan dapat membantu masyarakat sekitarnya, misalnya dengan mengenal daerah dan jalan-jalannya, membangun gubug dari bambu, masak sendiri, menolong kesehatan pertama bila ada kecelakaan dan sebagainya. Secara berkala satuan-satuan organisasi Pramuka menyelenggarakan Jambore, dimana regu-regu utusan daerah berkemah bersama dan menunjukkan keterampilan masing-masing melalui persaingan untuk mendapat penghargaan.

Melalui keanggotaan NIPV dahulu penulis merasa lebih mandiri, siap membantu bila diperlukan, menghargai keteraturan dan ketertiban. Menjadi Pramuka (Padvinder) juga harus mengucapkan sumpah untuk selalu siap membantu warga yang mengalami musibah. Jelas pengalaman menjadi Pramuka turut membentuk moralitas positif dan kemandirian sebagai pemuda.

Antara tahun 1937-1940 waktu meneruskan sekolah dasar E.L.S. di Tegal karena Ayah dipindah sebagai Wedana, penulis

tidak terlalu banyak terlibat dalam organisasi kecuali di sekolah. Mungkin juga karena mulai mempersiapkan pendidikan SD dengan sungguh-sungguh agar nanti rata-rata nilai akhir dapat melampaui angka tujuh. Dorongannya ialah, siapa yang nilai rata-ratanya melebihi tujuh langsung dapat diterima di Hogere Burger School (HBS) yang pendidikannya 5 tahun penuh. Dan untungnya penulis dapat mencapai nilai ujian akhir di atas tujuh, sehingga dapat memilih HBS di Malang. Waktu itu ada orang tua angkat penulis yang tinggal di Jalan Sumbing 33 Malang.

Antara Gakutotai dan Perkumpulan Nasionalis

Sekitar satu setengah tahun di HBS Malang, sampai tentara Dai Nippon menduduki Malang bulan Maret 1942 kegiatan organisasi juga terbatas pada perkumpulan di lingkungan sekolah saja. Masa 6 bulan kemudian semua sekolah ditutup dan baru dimulai lagi pada bulan September 1942. Karena SMP yang dibuka mulai di Jakarta dan kebetulan penulis mempunyai keluarga dekat di Ibu Kota, orang tua mengirimkan penulis dan kakak ke Jakarta, dimana penulis diterima di SMP I Prapatan. SMP II dibuka di Manggarai. SMT dibuka di gedung Kanisius di Menteng Raya di mana kakak melanjutkan pendidikannya setelah Algemene Middelbare School (AMS) Yogyakarta yang telah ditutup awal 1942 juga.

Mulai di SMP Prapatan inilah kegiatan organisasi lebih bercorak militer, karena kecuali dibagi dalam klas juga ada organisasi murid-murid terpilih yang dimasukkan dalam Gakutotai untuk mendapat pelatihan militer lebih khusus. Latihannya bukan sekedar berlari dan berbaris memanggul senjata kayu, tetapi diadakan latihan perang-perangan dengan tiarap, merangkak dan menyerang musuh bayangan bersenjatakan senapan kayu walaupun tanpa bayonet, tetapi juga dilatih menusuk karung berisi pasir seakan menusuk lawan. Arena

untuk bergulat Sumo juga dibangun di halaman sekolah. Jadi jiwa kemiliteran memang sengaja dipupuk. Sering pendidikan demikian disebut pendidikan Facisme, sebagaimana juga di Jerman dahulu dikenal Hitler Jugend (pemuda). Nasionalisme dan militerisme singkatnya menjadi pembekalan yang tidak kalah pentingnya dengan penguasaan ilmu. Memang juga ada organisasi pemuda-pemuda di luar sekolah yang lebih mementingkan penggemblengan militerismenya misalnya Seinendan.

Sepanjang ingatan penulis pendidikan sekolah menengah sebagaimana dikemukakan di atas memang juga menghasilkan sejumlah lulusan yang kemudian melamar menjadi Sekolah Perwira untuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA), bahkan ada yang menjadi Jenderal TNI.

Aktifitas Subversif Pertama

Setelah pindah sekolah dari Jakarta ke SMP Ketabang di Surabaya pada tahun 1943, sebenarnya tipe pendidikan tidak berbeda. Di samping mata pelajaran seperti Ilmu Pasti, Bahasa Indonesia dan Jepang, Ilmu Bumi, Sejarah dan sebagainya masih ada juga latihan kemiliteran di luar olah raga.

Menariknya, waktu memasuki tahun 1944 terjadi awal kegelisahan masyarakat dengan mulai tersebarnya berita-berita tentang kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Pulau-pulau Rabaul, Saipan dan Iwojima berangsur-angsur direbut kembali oleh marinir Amerika Serikat. Bahkan kemudian pulau Biak dijadikan markas Jenderal Mac Arthur. Berita-berita demikian tentu tidak disebarkan melalui surat kabar, tetapi ada kelompok-kelompok pemuda yang menadahnya dari radio gelap. Satu kelompok yang cukup cendekia anggotanya ternyata mendukung Sutan Syahrir dan bergerak subversif. Mereka ini adalah generasi-generasi didikan Belanda. Kecuali menadah dan menyebarkan berita dari "radio gelap" yang ber-

bahasa Inggris dan Belanda, mereka juga menumbuhkan dan mempertebal nasionalisme. Antara lain dengan membentuk kelompok untuk latihan pencak silat, berkumpul, diskusi dan seterusnya. Jadi selain menjadi kepala regu Gakutotai, yang mengajari judo dan kendo, karena diajak saya juga bergabung dengan kelompok subversif tersebut.

Semakin penulis dapat memahami bahwa ada tujuan politik nasional yang dikembangkan dikalangan pemuda Surabaya. Karena itu juga tidak mengherankan munculnya seorang pemuda seperti Bung Tomo, yang memimpin Badan Pemberontak Republik Indonesia (12 Oktober 1945).

Angin Nasionalisme terasa mengembus semakin kuat waktu penulis lulus dari SMP Ketabang dan masuk di Sekolah Menengah Tinggi di Dharmo Boulevard 49. Studi di kelas 1 SMT Dharmo, yang sebelumnya adalah tempat tinggal biarawati (Klooster) Katholik, ditempuh mulai September 1944. Pelajaran memang ditambah dengan mata pelajaran lain seperti kimia dan fisika, tetapi jiwa kemiliteran masih tetap dipupuk.

Bulan Juli 1945 sebagaimana biasa musim liburan, banyak murid pulang ke keluarga di daerah. Termasuk penulis pulang ke Dero, Kabupaten Ngawi. Dari daerah pedesaan, penulis mengikuti berita tentang perang Pasifik. Dari radio maupun media cetak juga timbul kesan terdesaknya tentara Jepang yang semakin jelas. Awal Agustus 1945 mendekati akhir masa liburan, penulis menerima panggilan dari teman sekolah di SMT Surabaya yang menjadi ketua di barisan murid-murid. Ia menjelaskan bahwa ternyata ini suatu reaksi akibat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh angkatan udara AS. Tak lama kemudian berakibat Jepang menyerah dan kalah perang (6 Agustus 1945).

Dari segi pemikiran politik, meski mengagumi nama-nama seperti Sjahrir, Soekarno, Hatta, bukan berarti pemikiran politik saya berorientasi ke mereka. Tidak ada kategori mutlak

tentang hal itu. Prinsipnya, kepada siapa kita harus berpihak, yakni pada lapisan terbawah dan tertindas itulah menjadi dasarnya. Saya mempunyai pengalaman di masa kecil yang meninggalkan kesan mendalam. Ayah saya bekerja di pamong praja. Suatu kali ada pelatihan di Jakarta. Maksudnya untuk dididik kembali. Waktu mengendarai mobil dan saya ada di dalamnya, tiba-tiba ada seorang inspektur polisi Indo yang kurang ajar. Inspektur polisi Belanda itu memperingatkan ayah saya agar jalannya benar. Padahal menurut kami sudah berjalan dengan benar. Tapi tetap dimarahi olehnya. Ayah saya melawan dan protes keras. Saya waktu itu masih usia di bawah 5 tahun. Setelah agak dewasa, berdasar kenangan itu saya berpikir "wah ini tidak benar; kalau orang pribumi sudah melakukan tindakan benar masih disalahkan". Itulah peristiwa yang ikut memupuk jiwa perlawanan saya.

Tentang nasionalisme, selain dari peristiwa masa kecil itu, semangatnya telah ditanamkan oleh ayah saya sejak kecil. Beliau berkata: "ya untuk pendidikan Belanda, it's OK, tapi jangan lupa keberpihakannya". Waktu usia belasan tahun saya membaca tentang sejarah Sumpah Pemuda, juga misalnya buku yang ditulis oleh Sjahrir dalam "Indonesische Overpeinzingen" ditulis ketika di Digul kalau saya tidak salah, serta beberapa tulisan Moh. Hatta. Juga tentu saja buku bude Kartini. Biasanya orang yang pulang dari Belanda justru lebih nasionalis. Mereka mengerti tentang demokrasi dan sebagainya. Hatta dan Sjahrir ketika belajar di Belanda misalnya, paham benar tentang hal itu dan setelah pulang ke Indonesia sangat kritis terhadap pemerintah kolonial. Namun dari awal saya telah membaca buku "Dari Gelap Terbitlah Terang". Itu intinya tentang nasionalisme, bagaimana berpihak kepada lapisan terbawah. Hal ini telah diteladankan oleh Bude Kartini dan saudara-saudaranya di Jepara dengan memberi pengajaran kepada perempuan-perempuan lapisan bawah.

Menjadi Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP)

Minggu-minggu menjelang pendudukan Jepang berakhir kelompok-kelompok pemuda di Surabaya secara lebih terbuka bertindak dan segera setelah proklamasi RI, 17 Agustus 1945, Badan Keamanan Rakyat (BKR) dibentuk. Satuan-satuan Angkatan Laut (Kaigun) Jepang mulai meninggalkan Surabaya dan menempati garnisun di Pujon, Kabupaten Malang. Dalam keadaan kekosongan pemerintahan memang perlu dibentuk organisasi yang lebih efektif dalam masyarakat. Pemerintah lokal dan polisi bertindak tegas dalam BKR yang telah terbentuk.

Kecuali masuk di BKR (22 Agustus 1945) penulis juga dilatih kemiliteran oleh Polisi Istimewa Surabaya yang sudah mendukung RI. Singkatnya waktu satuan tentara Inggris mulai masuk Surabaya, di pihak RI sudah ada struktur kepemerintahan yang operasional dan efektif. Walikota waktu itu adalah alm. Roeslan Abdulgani. Tidak lama setelah masuk BKR Pelajar (22 September 1945) lahir juga Tentara Keamanan Rakyat (5 Oktober 1945). Kami di BKR yang sudah terbentuk dalam regu-regu, menjadi Kesatuan TKR Pelajar di bawah Divisi VII, Pak Sungkono, yang merupakan bagian dari Tentara Republik Indonesia (TRI). Inilah sejarah pendek Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) yang sampai sekarang masih dikenal sebagai Brigade 17 Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal-jenderal Isman, Soebiantoro, Moeljosoedjono dan lain-lain yang telah meninggal atau menjadi purnawirawan mulanya adalah sebagai Komandan di TRIP Surabaya. Ada yang masuk ke barisan TNI tetapi ada pula yang menjadi tokoh di jajaran sipil seperti Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, atau Prof. Harun Zain yang dulu teman-teman sekolah penulis.

Di bulan September 1945 tentara Inggris dibawah Gen. Mansergh dan Gen. AWS Mallaby sudah datang ke Indonesia dan ditugaskan mengambil alih pemerintahan militer Jepang. Pada tanggal 10 Oktober Bandung berhasil mereka duduki. Lebih khusus di Surabaya tentara Inggris menduduki tempat-tempat di kota yang strategis seperti pelabuhan Tanjung Perak, kilang-kilang minyak di Wonokromo, beberapa kompleks sekolah (dulu) HBS dan rumah sakit Angkatan Laut Belanda yang di Dharmo Bld. Tetapi pendudukan tempat-tempat tersebut dianggap oleh Pemerintah Daerah RI yang baru sebagai tindakan yang terlalu menyerupai kependudukan dan mencampuri kewenangan pemerintah setempat yang baru mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Misalnya kantor besar Polisi Milter Jepang (Kempetai) di kota telah dikepung dan dibubarkan, sehingga banyak gudang senjata tentara Jepang berhasil dikuasai oleh TKR yang beranggotakan satuan-satuan ex-Pembela Tanah Air (PETA). Lokasi-lokasi yang diduduki tentara Inggris di bawah Jenderal Mallaby kemudian dikepung oleh TKR maupun Laskar-laskar kerakyatan penganut Bung Tomo, Pesindo dan Hizbullah.

Pengepungan terjadi setelah Panglima Divisi India ke-23 Mayjen D.C. Hawthorn menyebarkan pamflet ultimatum berisikan 11 pasal yang diantaranya adalah perintah supaya rakyat Indonesia di Jawa, Bali dan Lombok menyerahkan semua senjata. Jelaslah kemarahan rakyat Surabaya meningkat. Setelah badan-badan perjuangan berapat tanggal 27 Oktober 1945 maka tercetuslah pertempuran 28 Oktober 1945. Waktu itu tidak disadari bahwa tepat pada tanggal itu, 17 tahun yang lalu juga terjadi peristiwa penting; Sumpah Pemuda di Batavia.

Sebelumnya pasukan TKR Pelajar Staf I sudah meninggalkan kota Surabaya dan “berkemah” (mondok) dirumah penduduk Desa Kaliwaron. Sebagai Kepala Regu penulis diperintahkan turut mengepung sekolah HBS (dulu) di Jimerto.

Pengepungan berhasil dan tentara Gurkha ditarik kembali ke Tanjung Perak setelah Bung Karno tiba dari Jakarta untuk melerai dan mendamaikan. Rombongan Bung Karno yang menemui Pak Roeslan Abdulgani berdamai dengan Mayjen Hawthorn (29 Oktober 1945). Sehingga ada genjatan senjata dan tentara Inggris mundur ke kapal-kapal perang mereka di Tanjung Perak.

Masa perdamaian sebagaimana diketahui hanya berlangsung 11 hari, sebab pada tanggal 10 November Inggris menyerang besar-besaran mulai dari Tanjung Perak kemudian lapangan terbang Moro Krembangan. Perlawanan dari TKR, TKRP, dan BPRI serta kelompok-kelompok perjuangan lain yang kalah persenjataannya, tetapi bukan semangatnya akhirnya terdesak, sampai terpaksa bertahan di Gunung Sari (1 Desember 1945). Mengenai perlawanan ketika saya masih menjadi BKR Pelajar ini ada cerita khusus berikut.

Terkena Pecahan Mortir

Pada masa revolusi saya menjadi kepala regu. Pertempuran pertama yang pernah saya ikuti adalah ketika masih sebagai anggota BKR di Surabaya, yakni BKR Pelajar. Saya benar-benar merasa menjadi pelajar pejuang. Setelah kami terdesak keluar Surabaya kami masih diperbolehkan sekolah beberapa minggu dan secara bergiliran kembali ke front bergantian dengan rombongan teman-teman lain. Singkatnya melalui adanya sistim pergiliran tugas.

Jadi dalam masa kurang lebih 3 minggu tentara Inggris berhasil menguasai kota Surabaya, tetapi tetap terkepung di wilayah lebih luas (Mojokerto, Porong, Pandaan) yang masih dikusai Republik.

Waktu itu kami membuat markas di Legundi, letaknya sekitar 30 km dari Mojokerto ke arah Surabaya. Front kita ada

di Karang Asem, dekat Menganti. Daerah Menganti berbukit-bukit. Satu regu kami disuruh untuk menjaga daerah itu.

Suatu hari Belanda mulai menyerang bukit-bukit tersebut. Mereka tidak langsung maju, tapi mengebom dulu daerah perbukitan menggunakan mortir. Cara mereka mengebom itu dari dua sisi, seperti mencacah, misalnya dari arah selatan ke utara lalu dari arah timur ke barat. Penembakan mortir itu biasanya diarahkan sesuai petunjuk pesawat terbang "capung" yang terbang di atas melingkari sasaran. Dengan pengukuran mekanika tertentu, mereka menghitung derajatnya agar mortir yang ditembakkan itu bisa tepat sasaran.

Masa itu kami tidak mempunyai senjata yang bisa menembak jatuh pesawat mereka. Makin lama tentara penyerang mereka mendekat. Waktu itu saya memegang senapan mesin yang satu-satunya kami miliki. Saya berpikir kalau ia digunakan terlalu gencar maka pelurunya akan cepat habis. Maka saya putuskan untuk mundur dahulu. Saya ada di depan, di lereng bukit saat itu. Waktu Belanda mengebom, satu peluru mortir jatuhnya beberapa meter dari kami dan mengakibatkan lubang besar di tanah. Kawan saya, Hasnil Zaenal namanya, berteriak agar saya masuk ke lubang bekas bom tadi. Memang dalam teorinya tidak akan ada peluru mortir yang akan meledak di satu lubang yang sama, bekas peluru mortir yang ditembakkan sebelumnya. Saya sudah berniat akan masuk ke lubang itu. Ketika saya mengangkat senapan mesin yang berat tersebut, belum sampai pindah menuju lubang itu saya terkena pecahan bom mortir yang jatuh lebih dekat dengan kami.

Akibat mortir itu, tiga teman saya juga terkena pecahannya. Kawan saya yang sudah berhasil masuk ke lubang itu juga terkena tangannya, alm. Basmar Rahman namanya. Ia sebelum wafat sempat menjadi ekonom lulusan universitas di Rotterdam. Kawan lain yang terluka pahanya meninggal akibat tetanus, Suwandi namanya. Ada yang terkena pecahan

mortir tajam, tapi tidak berhasil menembus kulit perutnya sebab tertahan oleh sabuknya yang tebal, namanya Banu. Waktu itu sabuk-sabuk yang kami pakai memang tebal sekali.

Akhirnya kami mundur. Saya diangkut dengan daun pintu dari gedek yang diambil dari sebuah rumah warga desa. Lalu dilarikan menuju ke RS Tentara di Nggatul 30 km di dekat Mojokerto. Waktu itu yang menjadi ahli bedah adalah dr. Sjarif Thayib (kemudian menjadi Menteri Pendidikan). Pak dr. Sjarif Thayib inilah yang memberikan pertolongan pertama kepada saya.

Foto tentara tahun 1949 di Jakarta, menjelang KMB

Di rumah sakit itu saya berkenalan dengan penerbang Australia yang terluka sebab pesawatnya ditembak jatuh oleh

regu kami yang lain. Biasa kami berkomunikasi dengan anggota tentara Australia itu. Jadi tidak ada perbedaan antara pasien musuh atau bukan. Sebelum tahun 1947 saya sudah sembuh, saya lalu ikut membantu menjaga di dekat kali Porong. Waktu itu usia saya sudah 19 tahun. Setelah luka dan cacat pun masih bergilir di front Porong. Pada pertengahan tahun 1947 saya mengajukan diri untuk tidak aktif lagi, setelah beberapa minggu di markas Pandaan sambil sekolah di SMT Celaket Malang.

Demikian kisahnya sampai pertengahan tahun 1947, waktu tentara Belanda melakukan Politionele Actie I dan berhasil menduduki Malang juga. Teman-teman TRIP yang masih aktif mundur sampai ke Blitar. Tetapi penulis sebagai pelajar pejuang yang sudah cacat diminta orang tua untuk menyelesaikan pendidikan SMT di Jakarta. Tetapi waktu itu di Jakarta masih berlaku keadaan SOB sehingga penyelesaian di SMA-darurat RI di Jl. Gondangdia lama juga tidak berjalan normal. Jelas sistim ini tidak sempurna. Tetapi ketika menelusuri riwayat hidup teman-teman sekelompok, ternyata tidak terlalu mengecewakan. Ada yang sampai menjabat Direktur di Bank Indonesia dan untuk lebih dari 7 tahun juga bekerja di Asian Development Bank di Manila.

Aktifitas Subversif Kedua

Setelah menerima diploma lulusan SMA-darurat di Jakarta yang dikirim dari Departemen P & K di Yogya, penulis sempat menuggu selama setahun untuk selanjutnya melanjutkan pendidikan kembali. Dalam masa ini, antara 1948 sampai pertengahan tahun 1949, penulis membantu pengiriman obat-obatan, makanan kaleng dan terkadang peluru serta kebutuhan lain pada Divisi Siliwangi, Jawa Barat yang bertahan di "kantong" (pockets). Jadi sebenarnya tentara Belanda tidak sepenuhnya berhasil menguasai Jawa Barat setelah Politio-

nele Actie II dan ketika berunding mengenai penyerahan kedaulatan kepada RI. Dengan aktifitas ini, maka dua kali saya "bermain" subversif di Indonesia. Pertama di Surabaya, waktu jaman Jepang sebagaimana telah diceritakan di atas. Kedua kalinya waktu revolusi ini.

Sepanjang tahun 1949 itu berlangsung perundingan hingga adanya penyelenggaraan Konperensi Meja Bundar (RTC) di Den Haag. Delegasi Indonesia diwakili oleh Drs. Moh. Hatta dan akhirnya menjelang akhir bulan Desember 1949 konperensi tersebut menyetujui pendirian Republik Indonesia Serikat. Adanya negara-negara Bagian bentukan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook berhasil ciptakan negara bagian (deelstaat) di dalam RIS (1949).

Tetapi tampaknya persetujuan Bung Karno setengah hati dan melihat pembentukan RIS sebagai kompromis sementara karena tepat pada tanggal 17 Agustus 1950 diresmikan kembali Republik Indonesia, sehinga negara bagian NIT, Pasundan, Kalimtan Barat dan lain-lain dilebur kedalam provinsi-provinsi. Jadi singkatnya Indonesia hanya 8 bulan menjadi negara Federal untuk kembali menjadi negara Kesatuan (Unitarian State). Pada tahun 1950 penulis sudah mulai belajar di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Amsterdam sehingga turut merayakan lahirnya RI kembali bersama kawan-kawan Indonesia yang belajar di sana.

Memang setelah penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RI. Desember 1949, Belanda juga merupakan negara Eropa pertama yang menawarkan kesempatan belajar kepada pemuda Indonesia. Orang tua bahkan merangsang saya agar menggunakan kesempatan itu, karena sejak awal abad ke-20 pun sudah ada keluarga kami seperti R.M. Sosrokartono dan R.A. Kartini dikenal di negeri Belanda. Mengenai Pakde Sosrokartono ini telah disinggung di muka.

Mozaik Kehidupan Mahasiswa di Belanda

Mahasiswa Indonesia sejak tahun 1950 bertambah jumlahnya dalam menempuh studi di berbagai kota di Nederland. Timbul kebutuhan saling bertemu, sehingga didirikanlah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang kemudian juga didirikan di Jerman Barat. Di awal 1950 pun ada taruna-taruna Indonesia yang belajar di Akademi Militer (KMA) di Breda dan Akademi angkatan Laut di Den Helder. Kemudian Amerika Serikat juga membuka kesempatan lebar bagi mahasiswa Indonesia. Salah seorang yang penulis kenal adalah Drs. Harsya Bachtiar. Mula-mula ia belajar di Amsterdam tetapi kemudian pindah ke Harvard University. Kebanyakan mahasiswa Indonesia belajar di Berkeley, University, California. Khusus untuk Anthropologi dan Sosiologi belajar ke Cornell University yang waktu itu memang mempunyai Modern Indonesian Program.

Tentu banyak lulusan mahasiswa Indonesia dari kedua benua itu yang kemudian menjadi pejabat-pejabat tinggi di pemerintahan RI, BUMN atau Universitas. Sekarang banyak yang sudah mencapai usia pensiun, walaupun masih aktif sebagai penasehat atau anggota kehormatan lembaga.

Yang menarik bagi penulis semasa belajar di Eropa adalah ketika menjadi anggota aktif di PPI, bahkan di pertengahan 1950-an sempat menjabat sebagai Komisaris Hubungan Internasional dalam Pimpinan Pusat. Semasa itulah banyak terbuka peluang dan kesempatan untuk mengunjungi negara-negara lain di benua Eropa, dari Barat sampai ke Timur. Karena RI juga menganut kebijaksanaan Bebas Aktif, anggota PPI juga dapat berkunjung ke negara-negara di belakang Tirai Besi

Keadaan demikian memungkinkan penulis pada tahun 1955 mengunjungi Ibu kota negara-negara Komunis seperti Polandia, Rumania, Cheko Slovakia, Bulgaria, Hongaria. Bahkan dalam Festival Pemuda Sedunia di Moskow, penulis juga

sempat turut dalam suatu resepsi di Kremlin dan berjabat tangan dengan pemimpin-pemimpin Uni Soviet waktu itu, seperti Chruschev dan Bulganin (1957).

Penulis hanya agak kecewa selama di Uni Soviet. Selain melihat kota Kiev dan Leningrad, tidak dapat berkunjung ke negara-negara bagian Tajikistan, Uzbekistan, Kazakstan di sebelah selatan Rusia. Yang menjadi daya tarik sebenarnya adalah bagaimana penduduk yang banyak dan beragama Islam hidup dalam suatu negara federal yang pemerintahannya dipimpin Partai Komunis. Sebenarnya apa yang dapat dilihat di Moskow adalah gereja yang masih dikunjungi. Tetapi memang pemerintah tidak membantu masyarakat beragama (Orthodox Yunani). Mungkin seperti yang pernah Karl Marx tulis "Agama adalah Candu" untuk rakyat. Pernyataan ini agaknya juga menjadi kepercayaan bagi Partai Komunis. Tetapi sama sekali melarang penduduk beragama juga sulit.

Sebagai mahasiswa yang belajar Politik dan Sosiologi memang tertarik melihat berbagai bentuk dan kehidupan di negara yang menganut berbagai ideologi politik. Demokrasi Parlementer dapat dilihat di Belanda, Perancis dan Inggris. Di negara-negara ini boleh dikatakan bahwa ideologi sosial demokrasi dikembangkan. Di Belgia seperti Belanda masih ada Raja yang bertahta, tetapi pengaruh partai Buruh cukup meluas dan berpengaruh dalam parlemen. Lebih khusus di Belgia agama Khatolik lebih dominan dibandingkan di Belanda.

Pada tahun 1955 berlibur ke Spanyol. Sebuah negeri yang dipimpin oleh Jenderal Franco. Ini memberi kesempatan untuk melihat kehidupan di negara Katholik yang diperintah oleh kaum fasis seperti Jerman dibawah Adolf Hitler 10 tahun yang lalu. Yang mengesankan adalah bila memasuki satu kota di Spanyol pasti ada penjaga bersenjata. Tetapi karena rombongan kami didampingi oleh seorang biarawan/ pastor, kami tidak pernah ditanyakan tujuan perjalanan. Selain itu pada

umumnya rombongan menginap di tempat penginapan gereja Katholik.

Belajar Menjadi Pelukis

Sejak di sekolah dasar sebenarnya sudah dirangsang menggambar karena memperhatikan ayah yang senang membuat sketsa. Pakde dari ibu saya juga senang melukis. Tetapi inspirasi yang lebih kuat dialami waktu zaman revolusi fisik, karena pernah membaca buku Erny Pyle yang penuh dengan gambar prajurit Amerika Serikat di berbagai front selama Perang Dunia II.

Dalam waktu senggang dan terlebih sesudah terluka, penulis menggambarkan peristiwa yang mengesankan pada diri pribadi, sebab pada zaman itu memang tidak ada alat protet untuk mengabadikannya. Sayangnya kumpulan sketsa zaman perjuangan tersebut hilang waktu ditinggalkan di Dermaga semasa penulis belajar di Amerika Serikat (1966-1968). Di kampus IPB Darmaga-pun pernah menghasilkan lukisan amatiran dalam waktu senggang (1970-an)

Semasa belajar di Amsterdam tahun 1950-an, saya menggabungkan diri pada kelompok yang berminat melukis. Dengan mereka kami antara lain melukis model serta menggambar di musim semi dan panas. Kreasi lukisan saya dapat digolongkan ke dalam gaya impresionis. Beberapa karya berbentuk sketsa yang merekam berbagai kesan dalam perjalanan di suatu tempat maupun perjumpaan dengan seseorang.

Hubungan dengan mahasiswi cukup akrab. Ada beberapa perempuan berasal dari Indonesia yang belajar di Belanda. Sebagai anak muda, tentu ada "cerita-cerita bunga"; pernah mempunyai kawan dekat seorang nona Belanda, penjaga perpustakaan. Dan tentu juga putri yang berasal dari Indonesia. Kira-kira berpacaran begitu.

Membiayai Diri di Belanda

Perjalanan penulis ke berbagai negara, tentu tidak semua dibiayai oleh organisasi PPI. Sedangkan beasiswa bulanan saja, tidak cukup untuk membiayai perjalanan dan liburan. Karena itu di masa liburan yang praktis 2 bulan lamanya, penulis mencari pekerjaan guna menambah beasiswa dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Memang saya bekerja menjadi asisten Wertheim, namun gaji sedikit. Maka saya juga kerja sampingan untuk menambah penghasilan. Saya pernah bekerja menjadi pemungut koran. Kebutuhan koran di Belanda sangat tinggi untuk bungkus bunga-bunga tulip yang diekspor ke negara-

negara lain. Jadi saya keliling dengan gerobak beroda yang bentuknya seperti becak sambil berteriak: “koran, koran, koran......”.

Juga menjadi pemungut potongan-potongan tekstil yang kemudian dikirim untuk didaur ulang. Di sana sudah ada pendauran ulang bahan tekstil sejak tahun 50-an; dipisahkan mana yang nilon, katun, wol, dan lain-lain. Juga sempat menjadi penyebar pamflet ketika pemilu di Belanda. Cerita lucunya, saya sampai dipecat gara-gara terlalu banyak memasukkan ke kotak surat agar cepat habis. Juga jaga malam, ronda di daerah rumah-rumah yang agak kaya; jam 9 malam sampai jam 5 pagi kita jalan keliling ronda. Selain itu saya menjadi pemandu untuk wisatawan bukan Belanda. Itulah pekerjaan sampingan untuk mencari tambahan.

Sketsa diri, dibuat ketika masih di Belanda

Pengalaman sebagai "mahasiswa pekerja" (werk student) ada gunanya. Karena dengan itu dapat menimbulkan penghargaan dan empati terhadap kaum papa yang sering tersisihkan dan kurang dihargai. Kemiskinan adalah sesuatu yang pernah dialami dan sekaligus menjadi pelajaran hidup.

Sekali lagi, gaji bulanan yang lebih tetap selain dari beasiswa RI adalah mendapat tambahan ketika pada tahun 1957 diangkat menjadi asisten di Lembaga Penelitian Asia Tenggara ("Seminarium voor Zuid Oost Azie") yang dipimpin oleh ahli Indonesia Prof. Dr. W.F. Wertheim. Penerimaan beasiswa dari RI dan gaji tambahan sebagai asisten tidak berlangsung terlalu lama, karena tahun 1958 terjadi ketegangan politik antara RI. dan pemerintah Belanda. Sebab utamanya adalah terjadi nasionalisasi perusahaan besar Belanda di Indonesia seperti NHM, Internatio, Borsumij dan lain-lain. Perkebunan-perkebunan besar menjadi BUMN dan Direksi Belanda meninggalkan Indonesia. Mengenai dampak dari proses nasionalisasi perusahaan besar Belanda di Indonesia tersebut, telah penulis singgung sedikit di muka.

Kebijaksanaan RI selain itu adalah memutuskan agar semua mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda diminta pindah ke negeri lain. Sebenarnya bukan pemerintah Belanda yang mengusir kami. Mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ditarik, sehingga yang masih tinggal tidak lagi menerima beasiswa. Penulis mengalami musibah itu karena setelah diterima di Political Department, London University (1958), pemerintah RI keberatan karena SPP (tution) terlalu tinggi. Terpaksa penulis kembali ke Universitas Amsterdam dan untung Prof. Wertheim masih dapat mempertahankan penulis sebagai asisten, bahkan setelah lulus tahun 1960 mengangkat penulis sebagai peneliti junior.

Menjadi Informan RI di Belanda

Beberapa waktu lamanya penulis melaporkan kepada pemerintah bahwa masa studi telah habis, dan dapat dipulangkan sebagai mantan penerima beasiswa. Akan tetapi justru pihak-pihak tertentu dari Kedutaan Besar antara lain Jerman Barat, meminta agar penulis jangan dipulangkan dahulu, karena keberadaan dan kegunaan di negeri Belanda masih dibutuhkan pemerintah.

Ternyata keputusan tidak memulangkan penulis dilatarbelakangi oleh persengketaan RI-Belanda tentang kedaulatan Irian Barat. Penulis masih dianggap berguna sebagai pengamat dan pengumpul berbagai informasi baik di bidang politik maupun militer. Waktu itu ternyata RI sangat kekurangan informasi tentang Papua. Kawan-kawan yang tinggal di beberapa kota lain seperti Rotterdam, Utrecht dan Wageningen membantu pengumpulan informasi. Aktifitas ini bukan merupakan organisasi, tetapi lebih tepat disebut jaringan, karena terus berhubungan melalui surat, telpon atau bila perlu bertemu muka. Selain itu ada pula usaha mendekati mahasiswa Papua yang menerima beasiswa dari Belanda dan menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya mereka mendukung penyerahan kedaulatan atas Irian Barat kepada RI. Untungnya ada juga kawan-kawan Belanda antara lain dari Vrije Universiteit dan Partai Anti-Revolusioner yang turut mendukung.

Dalam hal di atas, kami mendapat uang dari AD serta sedikit dari POLRI . Ada beberapa orang dalam kelompok yang saya koordinir itu; antara lain Kwik Kian Gie, Drs. Samadikun, Ir. Sidharta, dan lain-lain. Melalui perpustakaan universitas dan tempat-tempat lain saya mencari berbagai informasi. Posisi saya sebagai asisten Wertheim memudahkan akses ke beberapa sumber. Misalnya saya diminta mencari peta tentang Irian dengan skala yang besar, 1: 10.000 misalnya. Sebab di Indonesia sendiri tidak ada peta seperti itu. Peta itu kebetulan pernah

dicetak oleh Amerika. Saya pergi ke perpustakaan universitas, tapi kami tidak boleh meminjam. Mungkin sudah mulai dicurigai. Tapi kami bisa melihatnya dan mencatat kapan tahun pembuatan dan penerbitnya. Lalu memberikan informasi itu ke Atmil di KBRI Bonn. Peta itu ternyata ada di Amerika. Akhirnya R.I. berhasil membelinya di California, AS. Lalu peta itu kami serahkan untuk keperluan Departemen Hankam RI.

Dalam usaha mendekati kelompok mahasiswa Irian di Den Haag agar mereka berpihak ke Indonesia dalam kasus Irian Barat. Sebelah kanan: Wan Ma dari Irian, Ramli Kasim dari Minagkabau, dan seorang kawan lain, sekitar tahun 1957-58

Saya mendapat tugas baik dari Polisi maupun Atmil A.D. Jadi kesan saya ada semacam persaingan antara AD (TNI) dan Polisi dalam keinginan memperoleh informasi itu. Sampai-sampai dengan bercanda saya dikritik: wah You menjadi 2 agen. Padahal uang yang diberikan pada saya itu untuk mengumpulkan informasi: membiayai serdadu-serdadu Belanda yang baru pulang dari Irian, sambil ngobrol-ngobrol, ngajak makan. Kita tanya mereka: “You punya stasion, garnisun, dan lokasi senjata letaknya di mana?” Mereka bercerita saja, setelah

itu kita mencatatnya. Dari inilah kita gunakan untuk menambah informasi ke Atmil.

Selain itu majalah militer di sana beredar relatif bebas, sehingga bisa kita akses. Di dalamnya ada karangan tentang model radar yang dimiliki Belanda. Tetapi kita tidak tahu dimana letaknya, apakah di Merauke, Biak, atau di tempat lain. Di situlah kami tanyakan kepada serdadu-serdadu yang baru pulang, sekali lagi, mengajak mereka makan-makan (dan maaf saja) sambil minum bir. Lalu mereka bercerita tentang hal tersebut.

Beberapa kali memang anggota kelompok dapat berhubungan dengan wakil partai politik di Parlemen Belanda (Binnenhof) untuk menjelaskan tuntutan Indonesia atas Irian Barat. Selain Partai Anti Revolusioner juga ada Partai Buruh (P.v.d.A) yang dapat dihubungi untuk bertukar pikiran.

Pertemuan Frits Kirihio dengan Bung Karno di Istana Negara Jakarta dan "penyeberangan" beberapa mahasiswa Papua ke RI. tentu juga mempengaruhi sikap dan pendapat khalayak ramai Belanda. Setelah pada tahun 1962 kedaulatan Belanda atas Irian Barat (West Niew Guinea) diserahkan kepada RI., tidak ada alasan lagi bagi penulis untuk tidak dipulangkan ke Indonesia, dan ini terjadi di awal Mei 1963. Dalam kepulangan ke tanah air, penulis berkunjung ke beberapa tempat yang dilewati. Salah satu tempat yang telah penulis ceritakan adalah di Tehran.

Ketika berkunjung di Tehran, anehnya di sana penulis melihat demonstrasi mahasiswa menentang Reforma Agraria yang akan dilaksanakan. Tetapi setelah membaca dan berbicara dengan beberapa demonstran terungkap bahwa banyak mahasiswa adalah putera-puteri tuan tanah besar (mullah), sehingga tidak mengherankan mereka menentang keputusan Syah.

Organisasi Mahasiswa di Amerika

Selama 2 ½ tahun belajar di Amerika, penulis hanya bergabung dalam organisasi mahasiswa yang dikenal sebagai PERMIAS, mungkin akronim dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Rekan-rekan IPB dan ITB yang tahun 1966 diberangkatkan bersama menyebar di berbagai kota dan negara bagian AS. Ada yang tetap di Kentucky, tetapi ada yang ke California, Michigan, Ohio, Wisconsin dan sebagainya. Masing-masing memilih universitas yang sesuai dengan bidangnya dan karena sudah dikenal keunggulannya secara internasional.

PERMIAS di Madison, Wisconsin di mana penulis ikut bergabung, sangatlah kecil. Jumlah anggotanya sedikit namun beberapa anggotanya kemudian cukup berperan penting di Indonesia, seperti alm. Dr. Alfian dan Dr. The Kian Wie. Keduanya bekerja di LIPI, dan Dr. Soedradjat Djiwandono yang kemudian menjabat sebagai Direktur Utama Bank Indonesia, serta istrinya, Bianti Djojohadikusumo.

Penulis sebenarnya sama sekali tidak aktif dalam organisasi selama di AS. Akan tetapi pada tahun 1967 penulis turut berdemonstrasi. Aksi demontrasi itu dipicu oleh mahasiswa Amerika di depan Departemen Ilmu Sosial melawan alumni dari universitas Wisconsin juga yang ingin bekerja melamar di Dow Jones, suatu perusahaan Kimia pembuat bom napalm untuk perang Vietnam. Mungkin sekali hal itu tidak disukai oleh pihak Amerika (USAID) yang memberi beasiswa kepada kami.

Setelah mengalami studi di Eropa yang demikian bebas dan mandiri, memang sistem Amerika dirasakan terlalu memaksa karena dalam satu semester harus mencapai jumlah kredit tertentu dengan baik.

Bagian Keempat

80 tahun
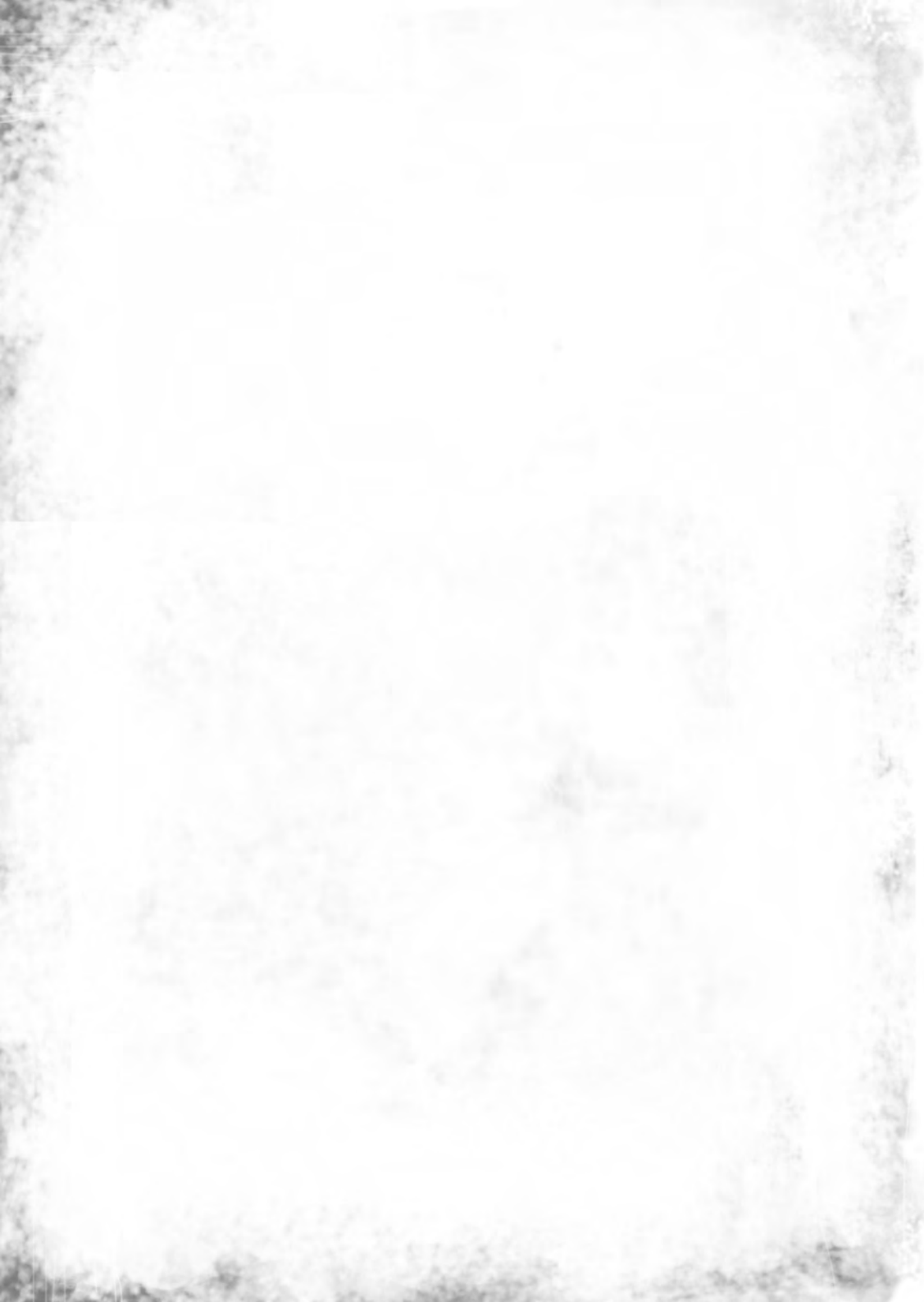
Meneliti Dan Menjabat

Kembali bekerja di IPB setelah pulang dari Amerika Serikat ternyata tidak terus mengajar di Bogor. Tugas-tugas lain di dalam dan di luar negeri dilakukan silih berganti sebagaimana akan penulis kemukakan secara kronologis.

Penelitian Pangan di Irian Barat

Awal tahun 1971 penulis ditugaskan dengan dua rekan untuk meneliti potensi pengembangan pertanian di wilayah Jaya Wijaya, Irian Barat, khususnya Kabupaten Jayawijaya, ibukota Wamena. Tugas ini rupanya atas permintaan Departemen Pertanian kepada IPB, sehingga tim kecil kami berusaha selama hampir dua bulan meneliti kecuali segi-segi kehidupan masyarakat, juga permasalahan agronomi serta pangan dan

gizi. Perhatian tentang pangan dan gizi penting, mengingat pangan utama penduduk adalah ubi saja, sedangkan protein hewani sangat terbatas, yaitu bila ada upacara adat yang mencakup santapan daging babi.

Ketika berada di Pugima Irian Jaya, juli 1990, bersama LIPI menengok kembali (revisiting) lokasi penelitian kemungkinan diusahakannya budidaya padi (sawah).

Laporan tim akhirnya diserahkan kepada Biro Perencanaan Departemen Pertanian dengan judul "Program Pembangunan Pertanian di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya" (1971). Ternyata di tahun 1980-an Departemen Pertanian juga merangsang pengembangan areal persawahan untuk penanaman padi di samping kebun ubi.

Penelitian Irigasi

Survey-survey pertanian dan pengairan dalam masa pelita I cukup banyak ditugaskan kepada IPB oleh Departemen Pertanian maupun Departemen Pekerjaan Umum yang

mengembangkan jaringan irigasi. Penulis di antaranya diikutsertakan dalam survey di daerah Way Seputih, Lampung Tengah, Way Umpu dan Way Pengubuan, Lampung Utara, Teluk Lada Banten dan sistim pengairan di daerah Cirebon maupun Batang Pane.

Seminar Agraria dan Memutuskan Menikah

Awal tahun 1971 setelah kembali dari Irian Barat diterima undangan dari Institute of Development Studies di Sussex, Inggris. Untuk turut menghadiri seminar dua bulan tentang Reforma Agraria di berbagai negara. Karena waktu belajar di Universitas Wisconsin (1967/ 68) pernah mempelajari masalah pertanahan, penulis diberi ijin untuk menghadiri seminar I.D.S di Sussex yang diketuai Prof. Dr. Michael Lipton.

Tanpa perencanaan banyak ternyata di ujung masa seminar di Sussex penulis memutuskan menikah dengan seorang puteri alumnus Fakultas Pertanian IPB di Gedung Catatan Sipil Kotamadya Brighton yang dekat Sussex dan merupakan kota tamasya di tepi pantai. Kami menikah tepat pada tanggal 17 Maret 1971. Sedihnya, ini hanya tinggal di ingatan manis saja karena isteri tercinta sudah meninggal bulan Juli 2000. Ia meninggal karena sakit. Mengenai hal ini penulis ingin bercerita sedikit.

Istri penulis bernama Puspa Dewi Natalia. Ia gadis keturunan Tionghoa, berasal dari Bandung. Keluarganya telah turun-temurun dan menetap di daerah itu. Ibunya bekerja di salah satu perkebunan di Bandung. Kami bertemu ketika beraktifitas di IPB. Ia merupakan mahasiswi penulis. Pada tahun 1964 ia bekerja lapang di Purwakarta. Saya sebagai dosen sering mengunjunginya. Waktu itu ia kos di jalan Rumah Sakit (sekarang Malabar, samping IPB). Waktu ia lulus, saya tidak sempat datang. Namun begitulah, proses pacaran berlangsung.

Akhirnya kami memutuskan menikah. Meski perbedaan umur kami terpaut jauh dan perbedaan agama, itu tidak merupakan penghalang bagi kami. Istri saya beragama Protestan. Perbedaan agama dan etnis bukan merupakan hal aneh bagi saya. Orang tua saya di Malang dulu juga Protestan. Waktu di Belanda pun saya pernah hampir menjalin ikatan dengan nona Belanda. Pernikahan beda agama tahun 1971 itu dimungkinkan sebelum ada UU 1974 yang melarangnya. Bagi saya secara prinsipil bahwa agama tidak menjadi penghalang. Bila keduanya cocok, perbedaan itu tidak menjadi alasan.

Setelah pulang dari Sussex, Inggris, pasangan pengantin baru ini diunduh mantu oleh keluarga putra di jl. Adi sutjipto no 20 Salatiga, pada tahun 1971.

Penelitian dan Pelatihan Transmigrasi

Di awal tahun 1970-an penulis diminta membantu di Direktorat Jenderal Transmigrasi yang waktu itu masih merupakan satu unit di bawah Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, disingkat Departemen NAKERTRANSKOP yang dipimpin Prof. Dr. Soebroto. Sebagai Direktur Jenderal Tansmigrasi adalah Mayjen. R. Soebiantoro yang di zaman Revolusi Fisik 1945-1950 menjadi Komandan TRIP di Jawa Timur.

Penulis diangkat menjadi Direktur Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi (PLPT) yang merupakan satuan non-organik. Lembaga ini tidak termasuk struktur Departemen NAKERTRANSKOP, dan sebagaian dari anggaran juga diperoleh dari lembaga-lembaga asing, termasuk FAO.

Karena tahun 1960-an pernah turut menterjemahkan disertasi Dr. Ir. Kampto Utomo tentang "Transmigrasi Spontan di Way Seputih, Lampung" ke dalam bahasa Belanda, selama menjadi direktur PLPT penulis dapat menambah pengetahuan tentang seluk-beluk transmigrasi, baik dari daerah pedesaan di pulau-pulau berpenduduk padat, maupun dari kalangan ABRI yang memasuki masa pensiun.

Transmigrasi adalah suatu program yang mencakup permasalahan di berbagai bidang. Selain kecuali kependudukan (demografi) ia juga berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberian kesempatan kerja, maupun pengembangan wilayah diluar Jawa, Bali dan Lombok yang berpenduduk padat.

Pelatihan calon transmigran sebelum dipindahkan dan penilaian terhadap kampung-kampung transmigran di daerah pembukaan baru merupakan tugas yang sangat menarik. Biaya pemindahan dari daerah asal ke proyek transmigrasi di luar Jawa, Bali, dan Lombok serta jaminan hidup selama satu tahun

pertama agar dapat mulai menggarap tanah 1 Ha sering dianggap kurang mencukupi. Sehingga di pertengahan 1970-an pernah ada proyek di Baturaja-Martapura, Sumatera Selatan yang memperbesar bantuan dengan pinjaman Bank Dunia. Jatah tanah diperluas dari 2 Ha menjadi 5 Ha per keluarga termasuk tanah perkebunan karet dan tanah penggembalaan ternak besar (sapi). Dengan biaya dari Bank Dunia juga proyek tersebut dievaluasi selama beberapa tahun (1978-1983) oleh satu unit IPB dibawah nama Monitoring and Evaluation of Transmigration (M.E.T.). Lembaga ini setiap tahun menghasilkan laporan kemajuan dengan fokus pada sosial-ekonomi pertanian.

Penulis sebagai ketua tim MET tersebut bekerjasama dengan pejabat Bank Dunia : Dr. Gloria Davis yang pernah menghasilkan tesis PhD mengenai transmigran keluarga Bali di Parigi, Sulawesi Tengah. Sayangnya setelah 1983 penulis tidak pernah dapat mengunjungi proyek transmigrasi Batumarta lagi. Tetapi menurut pengamat lain proyek cukup berkembang mungkin karena di samping pertanian pangan terdapat perkebunan karet yang hasilnya dapat memberikan untung melalui perdagangan di pasaran internasional. Yang tidak kedengaran perkembangannya adalah usaha peternakan sapi dan tempat penggembalaannya. Pada umumnya pembagian sapi kepada transmigran mula-mula diberikan untuk membajak sawah tetapi program ini kurang berhasil.

Di beberapa daerah yang sudah agak maju dan letaknya tidak terlalu terpencil, dalam arti agak berdekatan dengan perkotaan, diadakan pelatihan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kerja. Para transmigran diberi pelatihan keterampilan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha tani. Dengan demikian mereka yang sudah lulus dari pelatihan juga dapat mencari pekerjaan di daerah perkotaan atau di pedesaan membuka usaha kecil yang menggunakan peralatan dan mesin sederhana.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa proyek-proyek transmigrasi berhasil membuka daerah baru di luar Jawa. Para transmigran dapat dianggap sebagai pionir, tetapi karena sering pengembangan pertanian kurang dibantu pemerintah, generasi kedua para pionir yang pendidikannya sudah lebih baik cenderung mencari pekerjaan di kota. Pertanian menjadi kurang menarik, dan cukup banyak transmigran dari Jawa yang ditempatkan di Lampung misalnya mencari pekerjaan lagi di kota-kota besar Jawa. Berarti bahwa di daerah penempatan dulu juga tidak cukup berkembang ekonominya sehingga dapat menyerap tenaga kerja dari daerah transmigrasi.

Bergabung dalam PERHEPI

Sejak awal 1968 kembali bekerja di Departemen Sosek IPB, selain memberi kuliah dan membimbing mahasiswa S-1, penulis juga melaksanakan tugas-tugas yang bersifat survey dan penelitian, sebab pada masa itu Pelita I baru saja dimulai. Di situ pembangunan pertanian termasuk menjadi prioritas. Dalam hal ini penulis sering dikirim ke daerah-daerah.

Pembangunan ekonomi di sektor pertanian berkaitan erat dengan Revolusi Hijau yang berlangsung di banyak negara berkembang. Gerakan ini untuk meningkatkan produksi pangan utama (padi, gandum) dengan menggunakan teknologi baru (pupuk, obat-obatan, bibit unggul dan tanam jajar) digalakkan, karena banyak penduduk juga di negara kita kekurangan pangan sedangkan pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi.

Sebagai seorang sarjana adalah sesuatu yang biasa untuk bergabung dengan suatu Himpunan Profesi, karena studi saya sejak awal sudah memberi bekal pengetahuan di bidang ekonomi, politik dan sosiologi, maka saya bergabung juga ke dalam beberapa himpunan profesi. Yang pertama saya saksikan pendiriannya adalah Perhimpunan Ekonomi Pertanian in-

donesia (PERHEPI) di tahun 1964 di Bogor. Rasanya pendiriannya erat kaitannya dengan suatu survey besar yaitu Survey Agro Ekonomi yang berfungsi sebagai lembaga penelitian nonstuktural dari Departemen Pertanian. Sebagai tercermin dari nama SAE memang banyak pakar ekonomi pertanian yang menjadi anggota, namun demikian Pimpinan diketuai oleh Prof. Dr. Sajogyo yang didampingi oleh pakar-pakar seperti alm.Prof. Dr. Soedarsono Hadisapoetro, Prof. Dr. Sudjanadi, Dr. A.T. Birowo.

Bersama Prof. Dr. Haryono Soeyono dan Prof. Dr. Sajogyo dalam acara Seminar Nasional ISI, Bogor 2002

Karena pimpinan SAE juga tidak dibawah Menteri Pertanian ada cukup peluang untuk melakukan penilaian ilmiah yang objektif. PERHEPI boleh dikatakan merupakan badan konsultatif untuk SAE bila diperlukan. Ini kesan saya waktu menghadiri Kongresnya di tahun 1969, dan kemudian juga Kongres Ke VI tahun 1980 di Medan.

Bila kita telusuri sejarah PERHEPI lebih lanjut sebenarnya perlu disebut beberapa pemuka dan peminat ekonomi pertanian seperti alm. Prof. Iso Reksohadiprodjo, alm. Prof. Teko Soemodiwirjo, alm Prof. Soedarsono Hadisapoetro, alm Gunung Iskandar dan alm. Prof. Dr. Bachtiar Rivai yang pada tanggal 6-12 Pebruari 1964 berkumpul di Cibogo waktu diselenggarakan Konperensi Nasional Ekonomi Pertanian, tujuannya ialah mengembanggkan ilmu tersebut untuk pembanggunan nasional. Lima tahun kemudian diadakan konperensi yang lebih khusus dan berakhir dengan pendirian Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) di Ciawi, Bogor pada tanggal 13 Pebruari 1969. Terpilih sebagai Ketua Umum Pertama ialah alm. Dr. A.T. Birowo. Di tahun 1978 anggota-anggota PERHEPI tidak terbatas pada Sarjana Ekonomi Pertanian.

Menulis Disertasi

Periode 1974-1976 penulis merasa sangat sibuk, karena selain masih menjadi dosen di IPB, pada hari-hari tertentu berkantor di Jakarta di PLPT dan minggu-minggu tertentu juga melakukan penelitian lapang di Kecamatan Cibadak, Sukabumi dan Kecamatan Kendal di Jawa Tengah. Untung di masing-masing daerah tersebut, penulis dibantu oleh seorang koordinator lapang yang juga melakukan survey dengan menggunakan kuesioner. Penulis sangat berterima kasih kepada kedua rekan tersebut. Dengan hasil kedua daerah tersebut penulis dalam tahun 1976/ 1977 dapat menulis S-3 nya di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) di Singapura atas biaya The Ford Foundation.

Ujian S-3 akhirnya berlangsung di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia di Kampus Rawamangun Jakarta dalam bulan Desember 1977. Promotor adalah Prof. Dr. Selo Soemardjan dan Co-promotor Prof. Dr. Sajogyo. Se-

dangkan penguji lain adalah Ibu Prof. Meriam Boediardjo alm. sebagai Dekan FISIP dan Ibu Mely G Tan PhD dari LIPI.

Dalam disertasi tersebut saya melihat bahwa di desa-desa terjadi sentralisme pemerintahan selama Orde Baru. Memang terdapat program yang baik melalui pembangunan infrastruktur; sekolah, jalan, irigasi, posyandu, dan sebagainya. Disertasi saya ingin melihat bagaimana proses terjadinya integrasi dan disintegrasi. Namun dengan sentralisme itu, masyarakat yang telah mempunyai ikatan keakraban yang saya sebut "sodalis" itu, timbul struktur sosial yang berlapis-lapis sehingga sodalis mengalami disintegrasi. Dalam ikatan sodalis itu keta-

Menerima ijazah doktoral dari Prof. Dr. Selo Soemardjan sebagai promotor, 1977

atan kepada pemimpin didasarkan atas kesesuaian dengan pikiran masyarakat dan saling kepercayaan di antara mereka. Oleh bahasa sekarang disebut “modal sosial”, yakni “mutual trust”. Ikatan sodalis itu biasanya dalam lingkup kecil, yakni ketetanggaan. Dengan sentralisme itu, ketika terdapat intervensi ke dalam ikatan tersebut, mereka menyikapinya sebagai perintah dan bukan sebagai ajakan.

Dalam perkembangan waktu, ikatan semacam ini memang beranjak dan berubah menjadi besar. Namun itu butuh waktu. Dalam organisasi modern, ikatan itu berwujud peran dan tugas anggota yang jelas. Sementara dalam ikatan sodalis hal semacam itu tidak jelas. Akan tetapi Orde Baru menginginkan perubahan secara langsung melalui berbagai intervensi program. Maka harus memahami “organisasi” desa semacam. Tentu saja ini butuh waktu.

Saat itu kajian saya yang dimaksudkan sebagai kritik dan usul koreksi tidak memunculkan debat, sebab ditulis ketika Orde Baru sangat kuat.

Dengan predikat Cumlaude ternyata mengusahakan penerbitan disertasi melalui Oxford University Press tidak terlalu sulit (1984). Mungkin juga karena disertasi sudah ditulis dalam bahasa Inggris sehingga tidak perlu diterjemahkan. Penulis sangat bergembira karena dengan demikian thesis dalam bentuk buku dapat dipasarkan di negara-negara yang penduduknya menguasai bahasa Inggris. Hingga kini buku tersebut tidak pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Barangkali juga karena peredaran buku tersebut lebih dikenal oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia di Jakarta yang membiayai Monitoring & Evaluation of Transmigration. Dan juga karena penulis pernah diangkat menjadi non-resident consultant ILO di Geneva sebagaimana telah dilaporkan di muka, maka datang undangan-undangan untuk

menghadiri berbagai konperensi dan seminar, ke London, Nairobi, Amerika serikat dan Canada. Dari sanalah penulis dapat belajar dan mengenal dunia ilmuwan internasional. Selain itu penulis juga telah terbiasa menyumbangkan karangan dan makalah dalam bahasa Inggris. Singkatnya pergaulan internasional dengan rekan-rekan di benua lain sangat penulis nikmati, mengingat besar faedahnya untuk memantau perkembangan ilmu pengetahuan.

Membantu Para Menteri dan Departemen

Sebagaimana telah dikemukakan keterlibatan penulis di lingkungan Depatemen / Kementerian mulai di Departemen Nakertranskop sebagai direktur PLPT di muka, Setelah selesai studi S-3 penulis menjadi anggota Badan Penasehat Menteri Nakertrans. Waktu itu bidang koperasi sudah dipisah menjadi Departemen tersendiri sejak Pelita III. Karena pekerjaannya

Bersama Prof. Dr. Koentjaraningrat, Yogyakarta 1995

Bersama Prof. Sartono dalam acara Konferensi Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Yogyakarta, 26-28 Juli 1999

juga tidak penuh waktu, penulis dalam suatu tim ekonomi juga membantu Menteri Negara Riset Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo mempersiapkan suatu proyeksi tentang kependudukan, pemanfaatan sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2000. Sepanjang ingatan penulis proyeksi tesebut cukup menarik dan optimis karena dipertengahan 1970-an negara juga mengalami "oil boom". Ekspor minyak bumi yang meningkat dengan harga yang cukup tinggi turut banyak menyumbang anggaran pembangunan nasional.

Program menuju ke swasembada pangan, terutama beras, turut dibantu dengan berdirinya pabrik-pabrik pupuk buatan baik di Jawa maupun di Sumatera. Untuk pemberantasan hama padi juga didirikan pabrik-pabrik besar yang semua menjadi pertanda bahwa Indonesia juga menerjunkan diri ke

dalam Revolusi Hijau, seperti di India dan di Philipina. Program swasembada beras memang berhasil sejak tahun 1984 tetapi sebenarnya juga tidak terlalu lama karena diawal 1990-an Indonesia mulai mengimpor beras lagi. Jadi memang dalam pembangunan nasional sektor pertanian kurang diunggulkan dan ditunjang oleh pemerintah secara konsisten. Ekspor dari kekayaan alam seperti minyak, hasil tambang, kayu dan hasil perkebunan besar lebih diprioritaskan mungkin sekali karena juga lebih cepat menghasilkan devisa yang diperlukan. Tetapi dampaknya kepada penduduk pedesaan menjadi kurang baik karena kesempatan kerja tidak bertambah seimbang dengan pertambahan penduduk, sehingga sektor informal pada umumnya menggelembung.

Keterlibatan di Dewan Riset Nasional dan AIPI

Lebih khusus bidang riset dan teknologi DRN didirikan untuk turut memberikan sumbangan dan pengarahan agar pengembangan teknologi di berbagai Departemen juga terkoordinir. Karena itu bila pemerintah sudah menentukan Garis Besar Haluan Negara dan arah pembangunan, DRN dan Litbang-litbang Departemen bersama BAPPENAS dapat mensepakati proyek-proyek pembangunan apa yang dapat dicantumkan dalam buku-buku Rencana Pembangunan Lima Tahun. Sayangnya pertemuan-pertemuan demikian tidak cukup sering atau intensif sehingga sektoralisme dalam pembangunan masih lebih terasa.

Barangkali karena setelah pendirian DRN baru berdasarkan Keputusan Menteri Negara bobotnya belum terlalu diakui oleh Departemen-departemen. Baru di tahu 2002 ada undang-undang Ristek yang memuat kedudukan DRN. Dengan dasar UU yang lebih kuat juga dapat didirikan Dewan Riset Daerah, agar sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Tetapi tentu diharapkan agar koordinasi dilaksanakan

di tingkat provinsi dan antar-kabupaten dalam provinsi perlu ditingkatkan.

Bersama para ilmuwan lain dalam rangka sidang paripurna DRN di Serpong

Untuk melengkapi ulasan di muka mungkin ada manfaatnya secara singkat menceritakan proses berdirinya DRN. Setelah Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo mengakhiri jabatannya dan diganti oleh Prof. Dr. B.J. Habibie di tahun 1978 dengan mandat mengembangkan Riset dan Teknologi, wewenangnya juga bertambah luas. Tugasnya ialah "mengkoordinasikan kegiatan Riset dan Teknologi seluruh instansi pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh". Karena itu juga lembaga-lembaga seperti BPPT, LIPI, LAPAN, BAKOSURANAL, PUSPITEK, BATAN dan sebagainya ada di bawah koordinasi Menteri Negara Ristek.

Dalam kurun waktu Pelita III, beliau telah mempersiapkan dan menciptakan dua wadah penting untuk ilmuwan-

ilmuwan Indonesia. Wadah pertama adalah Tim Perumus dan Evluasi Program Utama Nasional (PEPUNAS) Riset dan Teknologi, sedangkan wadah kedua adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Berdasarkan suatu keputusan Presiden RI no.1 tahun 1984 tim PEPUNAS Ristek tadi dikukuhkan menjadi Dewan Riset Nasional, yang menjadi wadah koordinasi non-struktural guna mempersiapkan perumusan Program Utama Nasional di bidang Riset dan Teknologi. Latar belakang sejarah pendirian DRN yang sayangnya tidak diketahui secara meluas di kalangan pejabat-pejabat Departemen Sektoral, mengakibatkan koordinasi tidak menjadi kenyataan sebagaimana direncanakan sejak awal. Bila DRN tugasnya meletakkan dasar dan perwujudan koordinasi IPTEK, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang beranggotakan ilmuwan Indonesia terkemuka adalah badan/ lembaga yang bertugas mengarahkan berbagai pengembangan ilmu ke masa depan guna menunjang pembangunan nasional. Karena itu AIPI langsung didirikan berdasarkan Undang-undang no.8/ 1990. Anggota-anggotanya yang hanya sekitar 50 orang dilantik oleh Presiden RI. di gedung Pancasila (1991). Sebagai ketua pertama diangkat Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, sedangkan Menteri Habibie sendiri sebagai Ketua Komisi Ilmu Rekayasa.

Ada 4 komisi lain yang juga diketuai oleh tokoh-tokoh Ilmuwan di bidang yang bersangkutan. Misalnya Ketua Komisi Kebutuhan Dasar (Pangan, Kesehatan) adalah Prof. Dr, Sajogyo; Ketua Komisi Ilmu Kedokteran Prof. DR. A.A. Loedin; ketua Komisi Ilmu Sosial alm. Prof. Dr. Selo Soemardjan; Ketua Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Prof. Dr. J.A. Katili dan Ketua Komisi Kebudayaan adalah alm. Prof. Dr. Fuad Hasan. AIPI berstatus, seperti halnya akademi di Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, bersifat Mandiri dan Non- struktural artinya bukan organ dalam jajaran pemerintahan. Selain dibantu oleh pemerintah juga diperbolehkan mendapat bantuan dari lem-

baga-lembaga luar negeri lain yang sejenis. Karena itu pernah ada kerjasama dengan US National Academy of Sciences dan sampai sekarang dengan KNAW Belanda, Islam Academy of Sciences dan sebagainya. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPI pun ditanda-tangani oleh Presiden RI dan dicantumkan dalam suatu Kep Pres no.28 tahun 2002.

Lebih khusus mengenai Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial di Indonesia pernah diselenggarakan serentetan pertemuan oleh Panitia Nasional koordinasi Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial untuk menyusun suatu Laporan Sementara (Interin Report) yang kemudian disampaikan kepada Menteri Negara RISTEK (Maret 1997). Dengan mengundang pakar-pakar yang bukan anggota AIPI terkumpullah sejumlah makalah berharga yang memperkaya pemikiran untuk menentukan arah dan cakupan pengembangan ilmu-ilmu sosial.

Setelah seminar CASA diadakan acara Farewell di Universitas Amsterdam, guna merayakan pensiuanan sebagai Guru Besar IPB. Acara berlangsung di sebuah gereja dekat kampus, Amsterdam 1993.

Setelah seminar CASA diadakan acara Farewell di Universitas Amsterdam, guna merayakan pensiuanan sebagai Guru Besar IPB. Acara berlangsung di sebuah gereja dekat kampus, Amsterdam 1993.

Setelah penulis memasuki masa pensiun sebagai dosen IPB dan pegawai negeri pada tahun 1993 hubungan organik dengan pemerintah semakin berkurang, hanya kebaikan Menteri Negara Ristek memohon perpanjangan masa kerja saya sebagai Asisten Menteri V dan Sekretaris DRN sampai tahun 1996 kepada Presiden RI. Karena permohonan dikabulkan, penulis masih berfungsi sampai berusia 68 tahun. Tampaknya hal demikian waktu itu sudah dimungkinkan karena ada rencana peraturan dari Departemen Pendidikan Nasional untuk mengizinkan seorang guru besar di Universitas dipensiunkan pada usia 70 tahun. Peraturan itu mulai berlaku tahun 1994 dan memasuki abad ke-21 sudah ditarik kembali, sehingga usia pensiun dewasa ini telah kembali ke 65 tahun.

Menjadi Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)

Walaupun Pembangunan Nasional yang diawali dengan Pelita I 1969/ 70 mengutamakan kebangkitan ekonomi segera terasa bahwa bidang-bidang masyarakat tidak dapat dikesampingkan. Dan inilah yang mendorong sarjana-sarjana dan peminat Ilmu Sosial lain juga bergabung dan membentuk Himpunan Pofesi. Yang pertama adalah Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS) di tahun 1967 dan kemudian Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) 1990, disusul oleh Ikatan Sosiologi Indonesia atau ISI (1982).

Seminar ISI di BKKBN, Jakarta, 20 September 2005

Suatu Yayasan Ilmu-ilmu Sosial (YIIS) telah didirikan pada tanggal 27 Oktober 1976 sebagai kelanjutan dari Panitian Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial Pedesaan. Sebagai kegiatan YIIS antara lain adalah melatih calon tenaga peneliti ilmu sosial di suatu Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS) yang dibentuknya dalam kerjasama dengan berbagai universitas negeri. Bagi mahasiswa yang berprestasi baik bahkan diberikan beasiswa guna melanjutkan studi di tingkat pasca sarjana untuk mencapai gelar sampai doktor. Dalam Dewan Pengurus duduk tokoh-tokoh ilmu sosial seperti alm. Prof. Dr. Selo Sumardjan, Prof. Dr. Koentjaraningrat alm dan Prof. Dr. Sajogyo.

Di Hotel Salak, 2002 ketika diangkat sebagai ketua ISI. Menyerahkan cindera mata kepada Dr. Rohadi sebagai sekretaris I ISI

Naskah-naskah ilmiah yang diterbitkan oleh YIIS diseleksi terlebih dahulu oleh suatu Dewan Editor yang diketuai alm. Dr. Alfian, dengan keanggotaan dia antaranya Prof. Dr. Sajogyo dan alm. Dr. Soedjatmoko menjadi anggota. Selain

naskah ilmiah dari peneliti Indonesia juga ada beberapa buku yang diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Satu himpunan profesi yang lebih khusus menghimpun sarjana-sarjana di seluruh Indonesia yang menjadi dosen atau meminati karena pekerjaannya sosiologi umum maupun sosiologi pedesaan adalah Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) yang didirikan tahun 1982 dan pertama diketuai oleh gurubesar paling senior ialah Prof. Dr. Selo Sumardjan. Sebagai ketua berikutnya tampil Prof. Dr. Harjono Soejono yang juga menjabat sebagai Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Setelah beliau maka pada Kongres ISI di Bogor penulis dipilih menjadi Ketua Umum (2002).

Mungkin karena telah aktif di ISI sebelumnya, penulis juga diangkat sebagai wakil Presiden ke-2 organisasi International Rural Sociology Association (IRSA) antara tahun 1984-1988. Pada tahun 1988 sempat menghadiri VIIth World Congres for Rural Sociology di Bologna, Italia. Dalam kedudukan tersebut penulis menyampaikan makalah. Waktu IRSA pada pertengahan 1990-an mengadakan seminar di Mataram, Lombok, penulis juga masih dapat menyumbang satu makalah.

Awal 1990-an penulis juga dapat diterima sebagai anggota suatu himpunan profesi yang meminati pengairan teknis. Di sana kawan-kawan mendirikan Jaringan Komunikasi Irigasi Indonesia (JKI Indonesia). Organisasi ini boleh dikatakan merupakan bagian dari organisasi dan penerbit yang lebih besar, yakni LP3ES, di bawah nama Pusat Studi dan Pengembangan Irigasi (PSPI) – LP3ES.

Demikian secara singkat keterlibatan penulis dalam berbagai himpunan profesi baik nasional maupun internasional. Akibatnya memang cukup positif. Penulis menerima berbagai undangan keluar negeri, antara lain dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University (1978); Australian National University (1982), Canadian Council for South

East Asian Studies dan Institute for South East Asian Studies (1982), USAID (1983), Departement of Geography, University of Malaysia (1983), United Nation University (1985), ICRAF di Nairobi (1985), Dutch Ministry of Development Cooperation, The Hague (1991), First ASEAN Senior officials Meeting di Kuala Lumpur (1997) dan lain-lain. Sebagian dari makalah-makalah yang disumbangkan dapat diterbitkan di luar negeri.

Kesan dari bertahun-tahun menjadi anggota berbagai himpunan profesi ialah bahwa minat dari anggota tidak terlalu kuat. Memang ada yang tetap aktif tetapi jumlahnya tidak banyak. Misalnya untuk pendaftaran sebagai anggota diminta keterangan tentang nama, kesarjanaan, alamat dan tempat pekerjaannya sering tidak dijawab, apalagi ditagih iuran periodik. Jadi kegiatan himpunan sebenarnya cenderung diatur dari pimpinan pusat yang juga harus menyediakan anggaran. Artinya yang dipilih menjadi ketua juga harus menguasai sumber keuangan dan ini tercermin dari beberapa himpunan profesi yang terkenal kaya seperti kedokteran (IDI) dan ekonomi (ISEI). Seminar-seminar dan kongres dapat dibiayai lebih mudah.

Satu hal yang masih ingin dikemukakan adalah pengangkatan penulis sebagai guru besar tamu di Erasmus Universiteit, Rotterdam. Di universitas ini terdapat Prof. J. Tinbergen Wisselleerstoel (Prof. J. Tinbergen Chair) yang dapat ditempati oleh seorang guru besar tamu. Undangan kepada penulis untuk menempati wisselleerstoel tersebut, walaupun untuk 6 bulan (1981-1982) dirasakan sebagai penghargaan dan kehormatan akademis, mengingat Prof. Tinbergen alm. adalah penerima hadiah Nobel di bidang ekonomi.

Aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pada tahun 1993 sebenarnya penulis yang mencapai usia 65 tahun juga memasuki masa pensiun pegawai negeri yang

aktif di IPB dan Departemen P&K tetapi atas permohonan Menteri Habibie kedudukan sebagai Asisten Menteri dapat diperpanjang karena sudah menjadi Guru Besar. Usul tersebut dapat diterima oleh Presiden Soeharto, sehingga perpanjangan masa jabatan penulis sampai 1996. Setahun kemudian (1997) berhenti sebagai anggota MPR-RI sebelum krisis ekonomi Agustus 1997 melanda negeri kita. Jadi walaupun MPR-RI suatu lembaga politik dalam kenyataan tidak turut berpolitik karena peranannya selama bertahun-tahun tidak banyak. Barangkali seandainya ada pemilihan Presiden maka akan ada pengaruhnya. Tetapi selama lebih 30 tahun tidak terjadi pergantian Presiden dalam masa Orde Baru sehingga peran MPR-RI menjadi minimal.

Karena sejak lama penelitian bagi penulis sudah menjadi kegiatan penting, maka tawaran dari suatu yayasan baru yang diberi nama Yayasan AKATIGA untuk menjadi ketua Badan Pengurus penulis terima tanpa harus lama mempertimbangkannya (1992). Yayasan tersebut memang merupakan penerus kegiatan penelitian antara tiga lembaga; Pusat Studi Lingkungan ITB; Jurusan Sosiologi IPB; dan Institute Social Studies yang pusatnya berada di Den Haag.

Sejumlah peneliti muda di Yayasan yang merasa bahwa pembangunan nasional perlu memperbaiki nasib lapisan masyarakat bawah, bertekad melalui penelitian menyumbangkan masukan ke arah pemecahannya. Yayasan AKATIGA yang sekarang sudah berusia 17 tahun; sejak Reformasi 1998 dikenal sebagai suatu LSM, tetapi kiblatnya lebih kepenelitian daripada ke advokasi. Bidang-bidang penelitian yang ditekuni adalah usaha kecil dan menengah termasuk peranan dan pemberdayaan perempuan, agraria dalam berbagai aspeknya, perburuhan di daerah perkotaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha tani. Boleh dikatakan benang merah yang melintasi bidang-bidang tersebut adalah kemiskinan dan golongan tersisihkan yang nasibnya perlu diperbaiki.

Lembaga ini berusaha melihat upaya-upaya perbaikan nasib lapisan masyarakat yang tersisihkan di berbagai sektor usaha. Misalnya petani gurem dan buruh tani yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka di sektor pertanian. Pada dasarnya hal itu akibat dari struktur agraria yang tidak berpeluang memperbaiki nasib mereka. Usaha kecil timbul sebagian sebagai pelarian dari pedesaan dan membentuk sektor informal di daerah perkotaan. Banyak pula yang kurang bermodal menjadi pengelaju, artinya dalam kondisi seadanya bekerja di daerah pedesaan dan dalam musim-musim tertentu berburuh di kota berdekatan.

Peranan perempuan menjadi semakin penting karena penghasilan dari suami atau orang tua tidak cukup menghidupi keluarga. Keadaan yang mendesak itulah yang turut menyebabkan Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga Kerja Indonesia secara legal atau tidak, merantau ke negeri lain ke Timur Tengah dan Asia Timur. Walaupun mereka mengetahui adanya resiko di luar negeri karena berbulan-bulan tidaka terima gaji atau diperlakukan tidak sesuai dengan perikemanusiaan, jumlah yang meninggalkan keluarga sudah beberapa juta orang. Semua itu mereka lakukan untuk perbaikan hidup yang di negara sendiri tidak dapat diperoleh. Intinya memang model pembangunan pemerintah kita tidak cukup menciptakan kesempatan kerja sehingga mengakibatkan pengangguran untuk jutaan warga.

Beberapa donor luar negeri yang menilai pentingnya kegiatan Yayasan AKATIGA di antaranya ialah FORD FOUNDATION, HIVOS dari negeri Belanda, ASIA FOUNDATION, dan FREDERICH EBERT STIFTUNG dari Jerman.

Dari semula kerjasama dengan banyak LSM lain di Indonesia dipelihara dengan baik, misalnya dengan KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA, ASPPUK untuk pemberdayaan perempuan, KIKIS dan lain-lain. Hasil penelitian yang dijadikan buku atau karangan dalam jurnal melalui kerjasama de-

ngan penerbit Yayasan OBOR cukup luas disebarkan di dalam dan luar negeri.

AKATIGA juga memperhatikan nasib buruh yang bekerja di perkebunan atau perusahaan besar, tetapi mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan perburuhan yang sudah beberapa lama mengakibatkan buruh tetap menderita dari gejala "outsourcing", artinya menggunakan tenaga kerja lepas yang lebih murah dan tidak perlu diberi berbagai tunjangan sosial yang dinikmati buruh tetap. Gejala "outsourcing" ini sudah menggejala di dunia internasional, atau bahkan mulai di negara industri maju yang mempekerjakan buruh murah di negara berkembang. Perusahaan besar dari negara maju tertarik dengan sistim "outsourcing" karena biaya produksi lebih rendah. Peraturan yang dinikmati buruh tetap di negara maju kadang-kadang juga mengeluh karena jumlah pekerjanya dikurangi. Artinya ada persaingan antara "buruh tetap" di negara maju dan "buruh lepas" di negara berkembang.

Bersama Prof. Wertheim, dan J. Breman dekat Universitas Amsterdam, 1998

Selain membantu di Yayasan AKATIGA penulis juga menyumbangkan pemikiran kepada Yasayan BINA DESA yang sudah bergiat lebih dari tiga dasawarsa dalam memberi advokasi dan membina usaha kecil, terlebih di daerah pedesaan. Kegiatannya memang lebih langsung karena mempunyai Community Organizer di daerah pedesaan, langsung membina kelompok yang mempunyai usaha. Penggunaan pupuk organik untuk tanaman buah-buahan maupun obat-obatan sangat dirangsang. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang mengusahakan jaringan air bersih di desanya. Intinya menimbulkan berbagai usaha berkelompok dan di lingkungan lokal (Desa, RW atau bahkan RT). Jadi secara umum tujuan Yayasan BINA DESA adalah menggerakkan kehidupan sosial baru mulai dari "bawah" atau grassroat yang tentu sesuai dengan budaya lokal dan berdasarkan potensi komunitas.

Satu LSM lagi dimana penulis turut menjadi anggota pimpinan sebagai pembina ialah yang didirikan dan dipimpin oleh Mantan Menteri Pertanian Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah. Anggota pimpinan memang berasal dari lulusan Fakultas Pertanian IPB. Tetapi sekarang sudah menjabat di berbagai lembaga yang berkaitan dengan Departemen Pertanian. Nama yayasannya adalah Yayasan Padi Indonesia (YAPADI). Tujuannya adalah untuk tetap menghidupkan budaya padi kita termasuk menjunjung kearifan lokal. Ada pengakuan dasar bahwa budaya padi tetap akan menghidupkan bangsa Indonesia di manapun mereka berada di wilayah antara Sabang sampai Merauke. Sudah beribu tahun suku bangsa di wilayah tersebut bercocok tanam padi dan kebiasaan ini akan berlangsung di abad-abad mendatang.

Budaya padi memang sangat bevariasi di negara kita sehingga seminar-seminar yang dalam beberapa tahun terakhir ini diselenggarakan di daerah yang berbeda. Yang pertama (2007) diadakan di Solo/ Surakarta dengan menampilkan budaya petani Jawa. Di desa Kuwiran yang letaknya di dekat jalan

raya menuju Boyolali, didirikan suatu museum yang menyatu dengan penduduk. Di sana peminat dapat melihat peralatan (artifacts) dan sarana pertanian lain seperti lesung, lumbung dan lain-lain. Bahkan pada musim-musim tertentu juga dapat menyaksikan tandur, matun dan panen. Semua dengan gaya tradisional.

Di tahun 2003 YAPADI menyelenggarakan suatu seminar di Bali untuk membicarakan Kearifan Lokal Subak. Tradisi bersawah secara tradisional dengan pemeliharaan sistim pengairan lokal yang unik perlu dipertahankan, sebab bukan saja dari sudut pandang budaya, tetapi juga dari segi lingkungan, sistim Subak sangat penting untuk dilestarikan. Buku yang menghimpun makalah-makalah peserta dapat diterbitkan dengan judul "Subak dan Kerta Masa; Kearifan Lokal Mendukung Pertanian Berkelanjutan", (2003).

Satu seminar lagi yang diselenggarkan di tahun 2004 adalah di daerah Minangkabau di Sumatra Barat, dan pilihan daerah ini juga berdasarkan pengetahuan bahwa budaya padi Minangkabau memang khusus karena mempunyai hubungan unik dengan Tanah Ulayat. Yang menjadi pertanyaan utama ialah "Apakah nilai strategis tanah ulayat bergeser dengan berubahnya zaman?". Dalam rangka itu juga dibahas permasalahan mengenai ketahanan pangan dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan termasuk peranan berbagai Nagari. Erat kaitannya dengan status Tanah Adat dibicarakan pula (a) pemahaman Gender, serta (b) posisi dan kiprah perempuan dalam tatanan sosial, budaya dan ekonomi Minangkabau. Beberapa sumbangan dari pemerasaran mengupas tentang pendidikan generasi muda serta bagaimana mengantarkan dan mengembangkan lebih lanjut Teknologi Perpadian.

Betapa pentingnya Seminar di Provinsi Sumatra Barat ini digarisbawahi dalam pidato pembukaan oleh Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah, Mantan Menteri Pertanian, juga oleh kata

sambutan dari Prof. Dr. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian waktu itu dan sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sumatra Barat, Zainal Bakar.

Berdasarkan pandangan dan keyakinan YAPADI bahwa petani pada dasarnya adalah innovator dan investor terbesar dalam pertanian Indonesia, diselenggarakan seminar mengenai Revitalisasi Pedesaan. Ada pengamatan yang menunjukkan bahwa model pembangunan nasional dalam beberapa dasawarsa terakhir kurang menghargai kemandirian petani yang tercermin dari banyaknya kelembagaan dan tata cara budaya mereka. Atas pernyataan itu maka kumpulan karangan dibukukan dengan judul "Membalik Arus Menuai Kemandirian Petani", (2006).

Hal-hal yang dibahas mempunyai cakupan yang sangat luas dari pertanian berwawasan ekologi, membangun kelembagaan, merangsang kreativitas dan kemandirian sampai arah membangun pertanian ke depan. Erat kaitannya dengan usaha-usaha tersebut adalah penyuluhan yang perlu diintensifkan. Kerjasama kelompok adalah persyaratan yang memungkinkan usaha-usaha tersebut dapat berlangsung dengan baik. Sudah jelas penyuluhan mencakup pengarahan mengenai pemanfaatan teknologi baru dan sistim perkreditan.

Keikutsertaan dalam suatu lembaga swadaya masyarakat di awal abad ke-21 (2006) adalah dengan Lembaga Pengkajian Pertanahan Indonesia yang diprakarsai oleh Dr. Joyo Winoto, yang saat ini menjadi Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Soedjarwo Soeromihardjo, dan Ibu Liliana Arif Gondoutomo SH. yang sekarang menjadi Ketua LPP Indonesia. Banyak anggota LPPI yang sudah pensiun dari BPN tetapi masih sangat memperhatikan berbagai permasalahan agraria dan pertanahan. Mereka berkeinginan menyumbangkan pemikiran untuk memecahkannya. LPPI menghayati bahwa pembangunan nasional yang didasari oleh pembangunan per-

tanian sangat erat kaitannya dengan struktur agraria. Sejumlah sasaran pembangunan nasional seperti; pemerataan, keadilan, kedaulatan dan ketahanan pangan serta penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia yang agraris tidak akan dapat dicapai bila struktur agraria masih timpang. Reforma agraria dalam arti makro dan komprehensif karena itu perlu diselesaikan setelah lebih dari 40 tahun terhenti. Karena itu sektor pertanian kita belum mandiri tidaklah mengherankan bahwa generasi muda tidak tertarik lagi dan negara menjadi importir pangan yang semakin mengkhawatirkan karena sasaran-sasaran pembangunan tersebut diatas semakin sulit diwujudkan.
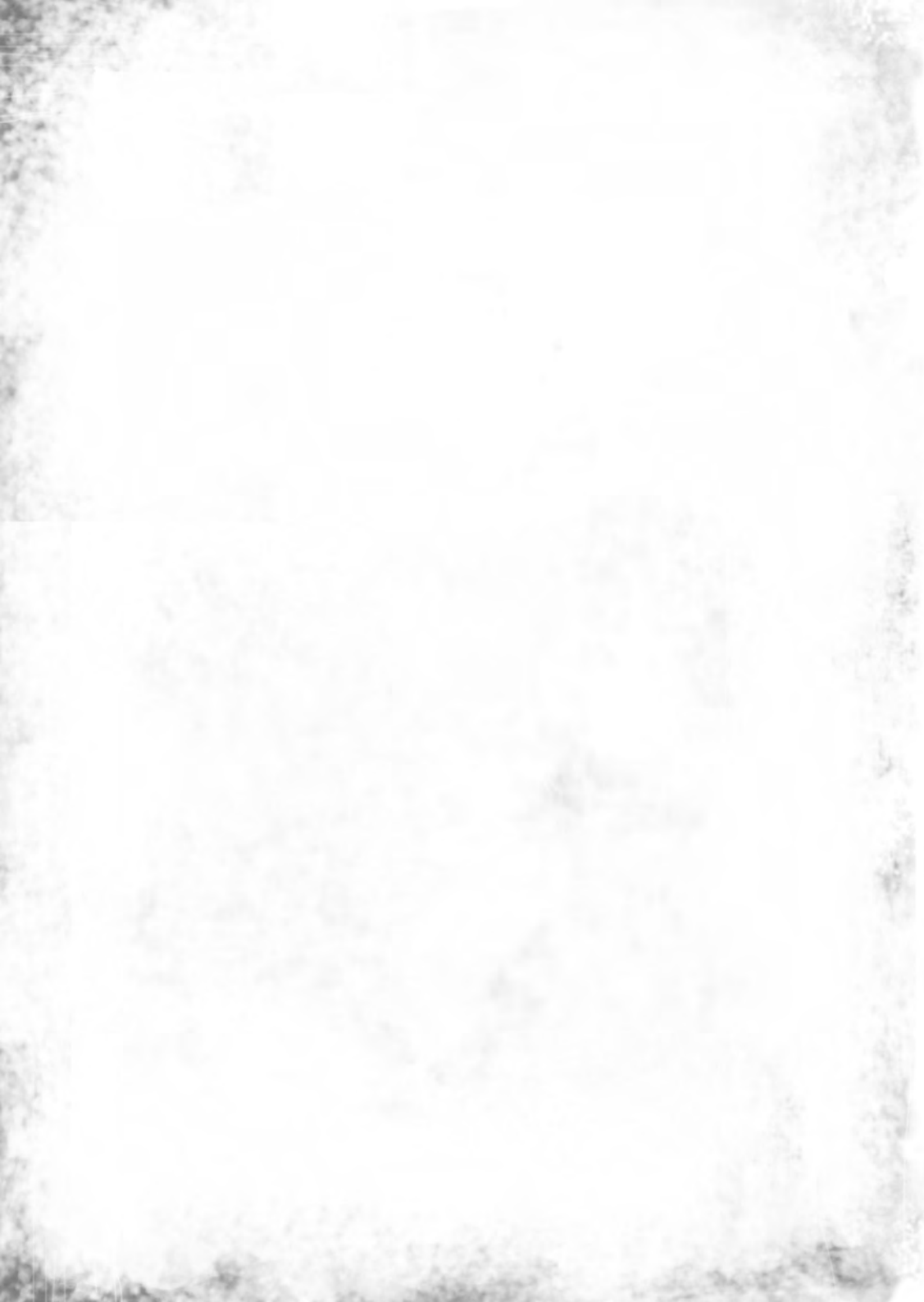
Di Hotel Panghegar dalam acara seminar kedua yang hasilnya kemudian terbitlah TAP MPR. No IX/ 2001

Setelah ada Tap MPR IX/ 2001 yang menentukan Pembaruan Agraria dan pemerintah di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menggariskan pelaksanaannya dalam Perpres 10 pada Desember 2006, LPPI juga turut mendukung tindakan-tindakan nyata. Misalnya agar Badan Pertanahan Nasional ditingkatkan menjadi Kementerian kembali, menyikapi UU no.5/ 1960 sebagai dasar Reforma Agraria. Juga diusulkan agar merangsang peranan Serikat Tani, mengatasi tumpang tindih berbagai UU yang berkaitan dengan agraria dan sebagainya. Secara singkat LPPI pada hari peringatan lahirnya UUPA no.5/ 1960 ke 47 dalam suatu seminar mengusulkan : "Dimulainya kembali pelaksanaan Reforma Agraria dengan Mempertemukan Konsep Ideal, Desain Kebijakan dan Kebutuhan Rakyat"

Bagian Kelima

80 tahun

Renungan

Untuk menutup tulisan ringkas ini, penulis akan menyampaikan beberapa butir penting yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

Pemantapan Sektor Agraria

Walau bagaimanapun, dari dulu sampai sekarang mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal dan berusaha di daerah pedesaan. Memang sudah ada proyeksi penduduk bahwa pertumbuhan perkotaan sudah demikian pesat sehingga diperkirakan tahun 2030 sudah 50% dari penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta akan tinggal di daerah perkotaan. Pertanyaan lalu timbul; di antara mereka berapa persen yang sudah bekerja di dalam sektor formal dan berapa dalam sektor informal?

Karena pemanfaatan tanah untuk perluasan wilayah perkotaan cepat meluas (konversi) maka areal pertanian se-

makin menyempit. Perkembangan demikian sebenarnya sudah diketahui dari hasil Sensus Pertanian 1963 sampai yang diselenggarakan di tahun 2003. Sepuluh tahun lagi 2013 akan dapat kita ketahui berapa hektar lahan pertanian menyempit, terutama di Jawa yang subur.

Di awal Pelita III itu memang sudah dirasakan bahwa pertanian membutuhkan areal pertanian yang "abadi" agar tidak dikonversi untuk penggunaan lain, karena penduduk Indonesia untuk yang lama kedepan masih tetap akan makan nasi sebagai pangan utama, palawija pun penting sebagai penghasil berbagai vitamin untuk kesehatan penduduk. Memasuki tahun 2008 ini tampaknya penduduk menghadapi krisis pangan, sedangkan RUU tentang Lahan Pertanian Abadi baru mulai disusun menjelang akhir tahun 2007 dan belum disampaikan kepada Menteri Pertanian atau DPR-RI.

Memang bila mau membantu petani bertahan hidup dan tujuan keswa-sembadaan pangan masih ingin dipertahankan tidak ada jalan lain dari pada mengurangi konversi ke lahan non-pertanian, terutama di pulau-pulau yang subur untuk tanaman padi seperti Jawa dan Bali. Kesuburan tersebut adalah sumbangan alam yang dicirikan oleh adanya gunung-gunung api yang secara berkala memuntahkan lahar ke dataran rendah yang menyuburkan sawah-sawah. Tanpa pengairan pun sudah cukup mengakibatkan pertumbuhan padi yang memadai dan sering dapat menghasilkan dua kali panen padi dan/ atau palawija. Bila ada pengairan teknis malah dapat menghasilkan panen padi 3 kali bila tidak tanam palawija. Tentu harga hasil pertaniannya di pasar turut mempengaruhi pilihan apa yang akan dibudidayakan, karena walau bagaimanapun keluarga tani membutuhkan penghasilan uang untuk berbagai keperluan hidup, termasuk pendidikan anak, kesehatan, transportasi dan sebagainya.

Di lereng-lereng gunung pun, yang menurut ilmu lingkungan lebih baik dimanfaatkan untuk tanaman tahunan seperti perkebunan kopi, teh, sayur-mayur, sering juga sebagian digunakan untuk tanaman pangan utama. Padi atau umbi-umbian di tanah kering yang banyak ditemukan di pulau-pulau besar seperti Sumatra, Sulawesi, Papua dan Kalimantan juga masih ditanam, seluas kira-kira satu hektar. Paling tidak untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Rata-rata di Indonesia hasil padi dari tanaman 1 Ha berkisar sekitar 4 ton. Bila dengan pemupukan dapat dicapai 6 ton dan bila ada pengairan juga dapat sampai 8 ton yang terbukti dalam masa Revolusi Hijau (1967-1985). Di ujung periode tersebutlah Indonesia mencapai swa-sembada pangan (padi) , walaupun hanya untuk periode pendek. Sehingga Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO di Roma. Sayangnya setelah masa kejayaan tersebut berakhir, Indonesia menjadi negara pengimpor beras lagi sampai sekarang.

Sementara areal sawah berkurang penduduk pemakan nasi bertambah, sehingga BULOG terus berfungsi sebagai pengimpor beras dari luar negeri. Hal ini tidak jarang ditentang petani-petani padi karena akibat import, harga beras turun, yang dirasakan merugikan petani padi dan pedagang beras. Mungkin bila ada lahan pertanian abadi dan pemerintah dapat mengurangi fluktuasi harga beras, maka petani tidak dirugikan. Dengan tiadanya import yang terlalu banyak, akan ada ketenangan berusaha dan mengurangi spekulasi serta inflasi. Stabilitas di sektor pertanian sangatlah penting. Telah terbukti bahwa negara kita ikut terpengaruh oleh krisis ekonomi internasional.

Memang pernah dipertanyakan oleh sebuah LSM (KID) apakah swa-sembada pangan realistik untuk negara kita, potensial dalam arti luas lahan dan jumlah petani yang masih dapat berusaha di sektor pertaniannya. Jawaban atas pertan-

yaan tersebut sebenarnya positif. Tetapi pilihannya tergantung dari kebijaksanaan pemerintah, khususnya Departemen Pertanian apakah mau menciptakan bagi petani padi dan pangan lain kondisi yang tetap menarik bagi mereka ataukah tidak.

Tampaknya Pembangunan Nasional Berencana kita sudah lama tidak terlalu menganggap sektor pertanian sebagai landasan dan tempat berpijak untuk menanjak serta berkembang ke arah industrialisasi.

Beberapa Pelita setelah timbul Oil-Boom di tahun 1970-an kurang memperhatikan agraria sebagai dasar yang terus perlu diperhatikan. Penjualan hasil pertambangan; batu bara, tembaga, emas, minyak bumi, dan sebagainya, serta penebangan hutan (HPH) untuk kayu lapis dan kertas yang pengolahannya banyak diserahkan kepada perusahaan asing besar lebih diutamakan. Bahkan bahan mentah semua itu banyak yang langsung di eksport sehingga kurang membangun industri pengolahan di dalam negeri. Akibatnya tenaga kerja kita kurang terserap. Hal itu juga karena perusahaan besar asing cenderung bersifat "capital intensive" dan kurang "labor intensive". Dengan sendirinya kebijaksanaan tersebut kurang menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja kita.

Tenaga murah yang menumpuk dan sulit mendapat kesempatan kerja di negaranya sendiri, akhirnya menjual tenaganya di luar negeri, tetapi sering mendapat pekerjaan yang hampir tidak memerlukan pendidikan formal. Inilah yang sekarang dikenal sebagai pekerja TKI dan TKW yang menjual diri sebagai buruh kasar atau banyak perempuan sebagai pembantu rumah tangga. Banyak diantara mereka yang dipekerjakan hampir seperti budak, tidak mengenal peraturan ILO atau bahkan menyimpang dari perikemanusiaan karena disuruh bekerja lebih dari 10 jam sehari dan tidak jarang tidak digaji bulanan. Bahkan secara badaniah mengalami penyiksaan. Tetapi semua resiko ini diambil karena di desa asalnya tidak

ada kesempatan hidup yang dapat menghidupi atau memperbaiki nasib keluarganya. Harapan besar setelah kontrak 2-3 tahun sebagai TKI/ TKW, mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Dan memang bila majikan di luar negeri berhati dan berkelakuan baik, maka tenaga TKI/ TKW tidak jarang memperpanjang kontraknya.

Ada data statistik yang mencantumkan bahwa ada 2-3 juta TKI/ TKW yang sekarang bekerja di luar negeri. Mereka secara total membantu pengiriman upah mereka kepada keluarga dan bagi pemerintah merupakan penambahan devisa negara. Karena itu pemerintah berniat menambah jumlah TKI/ TKW. Akan tetapi perlu terlebih dahulu nasib mereka diperbaiki. Sehingga perlakuan terhadap mereka lebih manusiawi serta sesuai dengan persyaratan “hubungan majikan-pekerja” internasional.

Bersama Dr. Endriatmo Soetarto dalam acara dialog merumuskan strategi Reformasi Agraria, IPB 1999

Pada hemat penulis strategi pembangunan nasional sebenarnya harus mulai dari pemantapan sektor agraria, bila kita mengaku diri kita sebagai negara agraria yang mandiri. Ketertinggalan sektor pertanian inilah yang mengakibatkan Indonesia kembali menjadi pengimpor bahan pangan. Ternyata sejak 2007, Indonesia bukan hanya kekurangan produksi beras tetapi juga kedelai, gula tebu dan sebagainya harus diimport.

Presiden Soeharto yang dulu agaknya menyadari bahaya-bahaya yang dihadapi negara, memberi instruksi kepada Menko Ekuin/ Ketua Bappenas Prof. Widjojo Nitisastro dan Menteri Negara Riset Prof. Soemitro untuk mengadakan pengkajian cepat tentang masalah agraria yang merupakan asset pertanian utama.

Penulis diangkat sebagai sekretaris eksekutif dalam tim besar yang melibatkan berbagai Departemen maupun pakar-pakar universitas, dan dalam beberapa bulan saja (November 1977-Maret 1978) telah disusun suatu Laporan Interim Masalah Pertanahan yang disampaikan kepada Presiden Soeharto.

Persoalan Energi dan Ekologi

UUPA no.5/ 1960 diakui sebagai undang-undang yang mendasari berbagai program pembangunan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak disusul dengan tindakan-tindakan nyata. Akibatnya jual-beli tanah dan akumulasi tanah terus berlangsung, sebagaimana juga konversi tanah pertanian untuk keperluan lain misalnya perluasan kota, pembangunan prasarana/ infrastruktur, pariwisata dan sebagainya. Padahal Menteri Pertanian di sidang World Conference on Agrarian Reform and Rural Development, FAO di Roma, Italia masih menyuarakan melalui pidato beliau bahwa Indonesia berpegangan teguh kepada UUPA no.5/ 1960 yang berpihak pada rakyat petani dan menyetujui "Peasant Charter"

Selama periode Orde Baru memang di bidang pertanian dan kehutanan yang dipentingkan adalah ekspor, sehingga yang lebih berkembang ialah perkebunan dan kehutanan. Bahkan Indonesia pernah disebut pengekspor kayu lapis terbesar di dunia. Tidaklah mengherankan mengapa setiap tahun Indonesia kehilangan 2 juta Ha hutan, sehingga dewasa ini katanya wilayah hutan tinggal kira-kira 50% luasnya.

Banyak hutan yang dibuka dengan cara pembakaran untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dalam proses itu banyak hutan yang sudah dibuka memunculkan sengketa dengan penduduk setempat. Sebab mereka merasa bahwa wilayah dan hutan yang dibuka itu adalah milik masyarakat adat. Akibat yang lebih luas lagi adalah kaitan dengan kondisi

Menyampaikan makalah pada acara International Congress Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) di Porto Allegre, 27 Juni 1988

ekologi, sehingga banyak terjadi tanah longsor di daerah perbukitan dan banjir karena luapan air sungai di musim hujan.

Sebenarnya tuduhan bahwa pembakaran hutan menyebabkan pemanasan bumi terlalu berlebihan, karena sebenarnya panas bumi diakibatkan oleh negara-negara industri maju yang mengakibatkan pelepasan CO 2 berlebihan. Karena itu konperensi untuk memperbaharui Kyoto Protokol demi pengurangan pelepasan CO 2 di Bali bulan Desember 2007 juga lebih didukung dan disetujui negara berkembang dari pada negara industri maju besar. Konperensi di Bali sebenarnya sekaligus menjadi peringatan untuk Indonesia bahwa program industrialisasi dan pemanfaatan sumber energi harus berbeda dari yang telah dilakukan negara-negara industri maju.

Sumber energi karena itu sudah mulai dari sumber berbagai tanaman (biofuel) dan di daerah tropika selain dari air terjun yang sudah lama dikenal juga dari matahari dan angin. Bahkan di tahun 1980-an sudah terpikir oleh Dewan Riset Nasional untuk meneliti adanya Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) bersama Amerika Serikat. Sudah diketahui bahwa di bawah laut ada aliran air panas yang dapat menghasilkan listrik dan aliran tersebut antara lain diperkirakan ada dalam dasar laut antara Bitung, Sulawesi Utara sampai Selat Lombok. Penelitian ini tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan keamanan militer; menelusuri kedalaman laut antara lain juga dapat dimanfaatkan untuk pengintaian oleh kapal selam musuh.

Pergeseran Tradisi Keilmuan di IPB

Sebagaimana diceritakan di muka, saya datang kembali dari Eropa ke tanah air pada tahun 1963, langsung bergabung dengan IPB di bagian Sosiologi Pedesaan. Tahun itu juga, pertengahan Juli IPB dibentuk, yang sebelumnya bernama Fakultas Pertanian UI di Bogor. Saya masih merasakan iklim

gaya lama. Mahasiswa masih diwajibkan menulis skripsi hasil kajian dengan menetap selama 3 atau 6 bulan di desa. Hal ini penting bagi kajian sosiologi, melihat dan memahami benar-benar masyarakat yang ditelitinya.

Setelah datang sistem pendidikan baru yang awalnya 5 tahun menjadi 4 tahun, banyak segi-segi pendidikan yang meniadakan kunjungan ke lapang tersebut. Seingat saya jurusan yang ada di IPB meliputi Koperasi, Ekonomi Pertanian, Sosiologi (dengan sub-cabang Penyuluhan), Agribisnis, dan Politik Agraria (bagian di bawah Sosial Ekonomi).Yang mengajar Politik Agraria adalah Pak Haryadi dan Pak Wiryadi. Sejak IPB berdiri yang kemudian menerapkan sistem kuliah 4 tahun itu, mata kuliah-mata kuliah tersebut menghilang. Tentu saja ini sangat disayangkan.

Saya mempunyai kesan bahwa generasi sekarang tidak mengenal pertanian, bahkan pedesaan. Mereka mengenal dusun, dukuh, desa, dan kecamatan dari buku saja, tidak dari pengalaman langsung dengan mengunjunginya. Padahal dengan menetap di desa, mahasiswa dapat menghayati kehidupan tani; apa saja yang mereka keluhkan, jalan pikirannya, adat istiadatnya, masalah apa saja di sana, dan kebahagiaan macam apa yang mereka rasakan. Ini tidak bisa didapatkan dari laporan lurah atau camat. Bahkan saya melihat, dan ini yang saya sayangkan, kemunduran IPB itu ditandai dengan mulai menjauhnya dari pertanian dan kehidupan tani. Di atas saya singgung dengan menyitir sindiran orang, bahwa IPB sekarang bukan lagi Institut Pertanian Bogor, namun menjadi "Institut Pertanian Bukan".

Bila sosiologi hanya kebanyakan teori, menganalisa namun tidak menyaksikan dan merasakan dari pengalaman lapang, maka akan mengalami kekurangan dalam pemahaman. Mengapa para ilmuwan Eropa, Amerika, sampai melakukan blusukan ke desa-desa kita? Itu jelas dalam rangka memahami

apa yang sebenarnya terjadi, mengetahui sebab-musababnya, lingkungan, dan masyarakat yang mengalami perubahan.

Banyaknya buku bacaan saya rasa memberi pengaruh terhadap keilmuan di IPB yang berkembang cukup lumayan. Akan tetapi yang saya sayangkan sekali lagi adalah IPB mulai menjauh dari pedesaan. Buku-buku teori yang dibaca semakin menjadikannya abstrak. Padahal melihat perubahan sosial perlu menghayati betul-betul masyarakat pedesaan.

Dari segi kelimuan telah semakin berkembang, misalnya ekologi manusia sudah menjadi mata pelajaran.Tapi yang paling luas sebenarnya adalah lingkungan: bumi, air dan ruang angkasa. Ini yang seharusnya diatur dengan baik. Kenyataannya hal tersebut tidak menjadi perhatian. Bahkan terkesan adanya pemecahan fakultas di IPB malah merenggangkan dalam melihat persoalan lingkungan secara total. Pemahaman tentang lingkungan itu misalnya tercakup politik lingkungan, bagaimana mengatur resources (sumber daya alam dan manusia).

Demikain juga masalah gender, yakni peranan perempuan telah menjadi perhatian. Dulu bila menyebut masyarakat pedesaan yang terbayang adalah laki-laki. Sekarang peran perempuan banyak dikaji.

Singkatnya, dari segi teoritis keilmuan di IPB sudah berkembang positif. Akan tetapi ilmu yang menjauh dari kenyataan masyarakat pedesaan kita sesungguhnya, meskipun untuk kajian perkotaan masih lumayan. Yang tidak saya sambut dengan baik adalah perenggangan antar bidang ilmu dan gap antara desa-kota. Bacaan teoritis yang berdasarkan realitas di Barat tentu saja tidak cocok. Jangan sampai kita terlihat lebih bodoh dibanding bangsa Barat dalam memahami masyarakat kita sendiri.

Penutup

Di penghujung tulisan ini, izinkan penulis untuk memberi pernyataan bahwa keberadaan ilmu Sosiologi yang mempelajari hubungan, tatanan dan interaksi kelompok-kelompok manusia atau warga dalam kehidupan bermasyarakat erat keterkaitan dan implikasinya dengan bidang-bidang ilmu sosial dan humaniora lain, seperti ekonomi, politik, dan hukum. Bahkan ilmu Ekologi Manusia lebih merapatkan keterkaitan antara Sosiologi Umum dan Sosiologi Pedesaan, karena interaksi antara sumberdaya manusia dan sumberdaya alam juga dipelajari dan diteliti.

Biodata Singkat
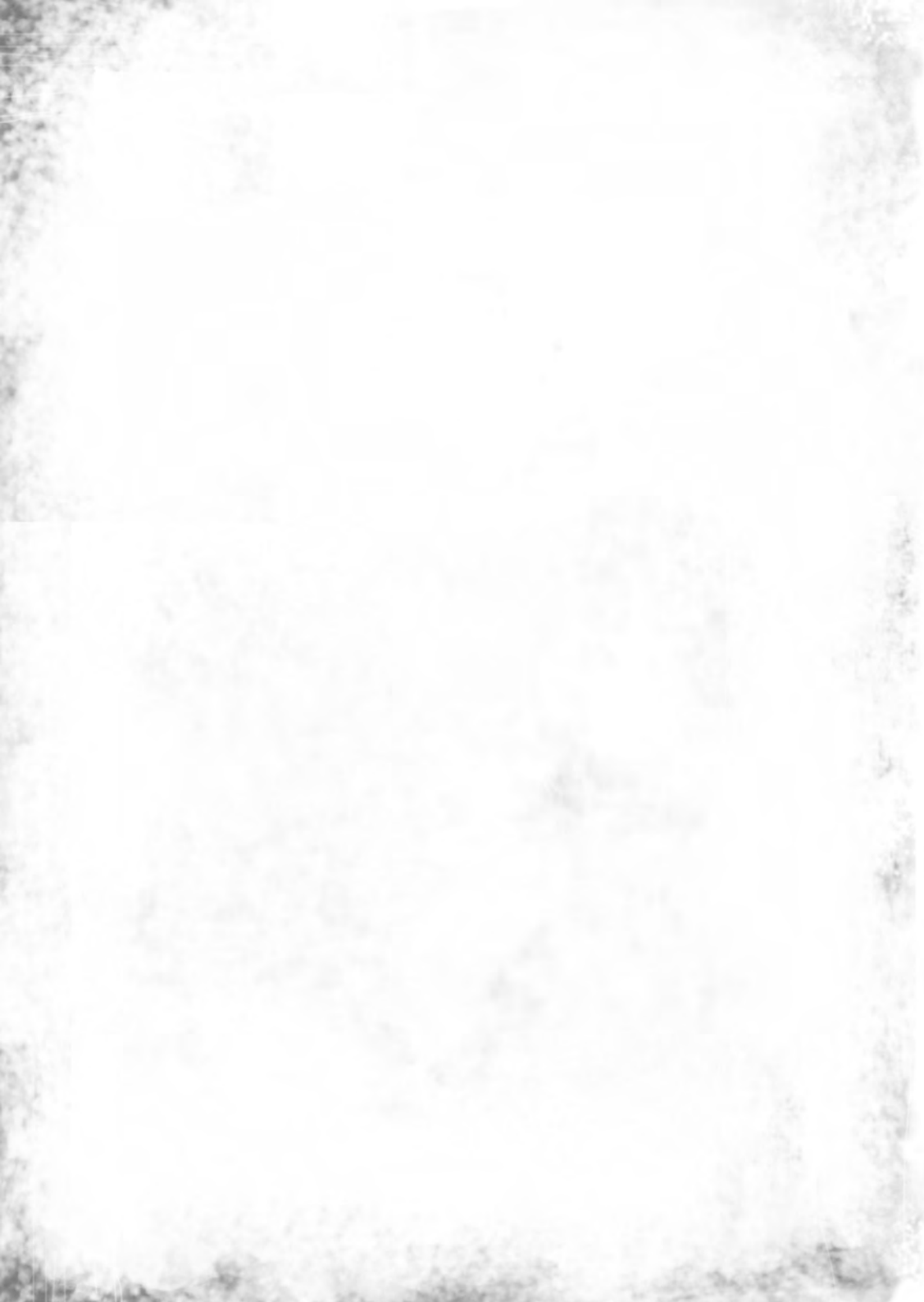
Prof. Dr. Soediono M. P. Tjondronegoro

Sediono Mommy Poerwodo Tjondronegoro, dilahirkan di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa tengah, pada tanggal 4 April 1928 sebagai putra ketiga dari Bapak R. M. Soetiyoso Tjondronegoro dan Ibu R. A. Soemilah S. Setelah menyelesaikan pendidikan di Europe Lagere School (ELS) Purwokerto dan Tegal pada tahun 1940, berdasarkan rata-rata kelulusan ELS, pada tahun yang sama beliau diterima tanpa ujian di Hogere Burger School (HBS) Malang Jawa Timur.

Pendidikannya di HBS sempat terputus ketika pecah perang pasifik dan pendudukan Indonesia oleh tentara Jepang. Pada tahun 1943 ia melanjtkan sekolah lagi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta. Selama mengikuti pendidikan, Profesor Tjondronegoro kecil sering mengikuti latihan-latihan militer di sekolah dengan baik, sehingga beliau pernah ditunjuk sebagai Kepala Regu (peleton). Kegiatan ini terus diikuti sampai di Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya pada tahun 1945, berbarengan dengan saat meletusnya Revolusi Fisik pada bulan Agustus. Di samping terus bersekolah, beliau pernah bergabung dalam anggota barisan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia (1945-1947).

Setelah lulus SMA pada tahun 1948, dua tahun berikutnya Profesor Tjondronegoro melanjutkan studi ke Universitas Amsterdam pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia (melalui Korps Demobilisasi Pelajar). Studinya di Amsterdam sempat terganggu lagi, karena putusnya hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Belanda (1958-1962).

Selama sekitar dua tahun (1961-1963), beliau bekerja di Universitas Amsterdam sebagai asisten Prof. Wertheim. Kemudian pada tahun 1963 kembali ke Indonesia. Beliau lan-

tas bergabung sebagai staf pengajar di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Sosial Ekonomi bagian Sosiologi Pedesaan. Pada tahun 1966-1968 Profesor Tjondro mendapat kesempatan memperluas pengetahuanya di University of Kentucky dan University of Wisconsin si Amerika Serikat. Gelar doktornya di bidang Sosiologi diperoleh dari Universitas Indonesia pada tahun 1977 dengan predikat Cum Laude. Disertasi itu diterbitkan oleh Oxford University Press. Fellowship untuk pengembangan kurikulum Ekologi Manusia diperoleh dari USAID (1982).

Karirnya sebagai dosen IPB sebagai pendidik dan peneliti, dirintisnya mulai dari jabatan Asisten sampai Guru Besar Sosiologi pada tahun 1979. Selama perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Ekonomi (1966-1968), Ketua Jurusan (1979-1981), anggota Senat Fakulatas Pertanian dan anggota Senat Guru Besar IPB (1979-1993). Beliau juga staf pengajar pada Program Pasca Sarjana IPB (sejak 1975 sampai sekarang) dan ikut serta dalam mempersiapkan Program Pasca Sarjana di Universitas Kristen Satya wacana (UKSW) Salatiga, serta membantu program Pasca Sarjana pada Fakultas Ekonomi, Sosiol Politik, Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada sebagai Komisi Pembimbing.

Profesor Tjondronegoro pernah pula menjabat sebagai konsultan dan fellow, di antaranya sebagai fellow pertama di Institute of Development Studies (1971); Sussex; Konsultan ECAFÉ, Social Development Division (1972); Konsultan Bank Dunia (1974-1976) di Jakarta; FAO untuk transmigrasi (1975-1976); penasehat Internasional Labor Organization untuk Rural Development Division (1975-1980).

Beliau adalah Guru Besar Sosiologi pertama yang menempati jabatan Guru Besar J. Tinbergen (Pemenag Hadiah Nobel) di Universiteit Eramus Rotterdam (1981). Juga pernah menjadi

Guru Besar tamu di University of Winconsin, Universitas California, Cook College New Brunswick dan East West Center, Hawaii. Pada tahun 1990-an, beliau juga pernah menjadi konsultan Asian Development Bank, Manila, membantu menyelesaikan studi Rural Poverty in Indonesia, dan juga membantu UNEP di Nairobi sebagai anggota Science and Technology Panel of Biodiversity Feasibility.

Dalam perjalanan karirnya di jajaran pemerintah, sejak tahun 1974 pernah menjadi Direktur di Pusat Latihan dan Penelitian Transmigrasi, departemen Tenaga Kerja Trasmigrasi dan Koperasi sampai tahun 1976, dilanjutkan dengan anggota Team Policy Research, Departemen tenaga Kerja dan Trasmigrasi (1978-1983). Antara tahun 1977-1978 pernah pula menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Masalah Pertanahan, membantu Menteri Negara EKUIN, Profesor Widjojo Nitisastro dan Menteri Negara Riset, Professor Soemitro. Semenjak Menteri Negara Riset dan Teknologi dijabat oleh Prof. Dr. B. J. Habibie (1978), beliau menjadi anggota Tim Penasehat Perumus Program Nasional, serta beliau untuk pertama kalinya dipilih menjadi Sekretaris DRN pada tahun 1984, merangkap sebagai Asisten V MenRistek bidang Kordinasi Perumusan program RISTEK.

Dalam kegiatannya yang berkaitan dengan Himpunan Profesi, beliau adalah seorang perintis bagi berdirinya Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (1964); Himpunan Peminat Ilmu-ilmu Sosial (1975) dan Ikatan Sosiologi Indonesia (1992). Di masing-masing himpunan, beliau pernah menjabat Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Umum, atau Anggota Dewan Pembina. Selain itu di tingkat Internasional, pernah menjadi anggota International Rural Sociology Association (1980-1984) dan 2nd Vice President (1984-1988) mewakili wilayah Asia.

Profesor Tjondronegoro sangat menaruh perhatian dalam pengembangan ilmu dan riset. Hingga saat ini, beliau adalah

anggota Dewan riset nasional (DRN) Kelompok V, serta anggota Komisi Ilmu-ilmu Sosiologi akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), suatu pengangkatan kehormatan di bidang ilmu pengetahuan dengan masa jabatan seumur hidup.

Prof. Tjondronegoro menikah dengan Ibu Dr. Puspa Dewi Natalia yang telah meninggal tahun 2000 lalu. Dalam pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 putra: Myrza Tjondronegoro dan Irvan Tjondronegoro. Dari putra pertama yang menikah dengan Vivi Selfvia telah lahir seorang putra, Riska. Dari putra kedua yang menikah dengan Dina Andini Rohali telah lahir 2 orang cucu: Abipraya dan Maura.

Saat ini Prof. Tjondronegoro mendiami rumahnya yang sejuk dan asri di Jl. Pakuan Indah 3, Bogor. Di tempat itulah beliau senantiasa melahirkan karya-karyanya.

Prof. Tjondronegoro menikah dengan Ibu Dr. Puspa Dewi Natalia yang telah meninggal tahun 2000 lalu. Dalam pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 putra: Myrza Tjondronegoro dan Irvan Tjondronegoro. Putra pertama yang menikah dengan Vivi Sylvia telah memberinya seorang cucu perempuan: Riska. Sedangkan dari putra kedua yang menikah dengan Dina Andini Rohali telah lahir 2 orang anak: Abipraya dan Maura.

Saat ini Prof. Tjondronegoro mendiami rumahnya yang asri di Jl. Pakuan Indah 3, Bogor. Di tempat itulah beliau senantiasa melahirkan karya-karyanya.

Lampiran

P R A K A T A

Kumpulan judul karya tulis dalam empat dasawarsa ini dimaksudkan sebagai arsip pribadi untuk dapat mengenang kembali pertumbuhan pemikiran mengenai berbagai masalah kemasyarakatan.

Tulisan yang berselang-seling dalam bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris adalah akibat dari tempat tinggal penulis di 3 negara tersebut. Ada tulisan yang dapat diterbitkan dalam majalah, surat kabar atau buku, tetapi cukup banyak yang disumbangkan dalam lokakarya atau seminar.

Penulis sayangkan juga bahwa tidak semua karya tulis dapat disimpan dalam arsip pribadi.

Tentu saja penulis masih punya harapan semoga tulisan yang belum dicetak dapat dikumpulkan dalam satu buku sebagai warisan untuk keluarga.

Bogor, 1 Januari 2007.

Sediono M.P. Tjondronegoro

DAFTAR
JUDUL TULISAN, MAKALAH DAN BUKU
1958 – 2006
Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro

1. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembangunan Daerah Pedesaan Bali dalam PJPT II". Bogor, 11 hal. 19...
2. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "DRN; Pengembangan Prasaran IPTEK dalam Menyongsong Abad ke-21". Bogor, 14 hal. 19...
3. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Rakyat Jalan Panjang, Menanjak dan Berliku-liku" Bogor, 14 hal. 19...
4. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Warisan Ilmu-ilmu Sosial Barat dan Tantangan untuk Golongan Profesional Menegakkan Demokrasi di Negara Dunia Ketiga" Bogor, 14 hal. 19...
5. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kebijaksanaan Bank Tanah" Bogor, 3 hal. 19...
6. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Bagi Hasil di Indonesia: Masa Lampau dan Perspektif Hari Depan" Bogor, 16 hal. Kata Pengantar. 19...
7. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sektor Pertanian Industri dan Kesempatan Kerja Sebagai Jembatan dalam Struktur Ekonomi Kita" Dermaga, 18 hal. 19...
8. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesian Social Science Agenda: A Personal View" Bogor, 29 hal. 19...
9. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Metode Partisipasi; Pengertian Pokok dan Cara Pendekatan" Bogor, 5 hal. 19...
10. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Revolusi Liberal Kedua" Bogor, 4 hal. 19...
11. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sumbangan Humaniora dan Ilmu Sosial Kepada Riset Unggulan Terpadu/Kemitraan?" Bogor 6 hal. 19...
12. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "An Extented Outline of a Series of Three Lectures on Human Ecology; An Introduction" Bogor, 4 hal. 19...

13. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P."Pemetaan Pemikiran Mengenai Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia." Bogor, 4 hal. 19...
14. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Regenerasi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi" Bogor, AIPI. 5 hal. 19...
15. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pemikiran Ekonomi-Politik Indonesia" Bogor, 14 hal. 19...
16. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tentang Tolok-ukur Kemerdekaan." Bogor, 5 hal. 19...
17. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Aspek Sosial dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi"Bogor, 6 hal. 19...
18. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Socio-Economic Aspects of Rural Java and Problems of Development; A General Outline" Bogor 8 hal. 19...
19. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Jalur-jalur Penelitian" Bogor, 4 hal. 19...
20. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menghayati Masyarakat Pedesaan Sepintas Kilas" Bogor, ... hal. 19...
21. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Aspek Sosial dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi." Bogor, 3 hal. 19...
22. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pelita dan Monitoring" Bogor, 3 hal. 19...
23. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "IPB dan Perspektif Transmigrasi dalam Tahun 1980-an." Bogor, 18 hal. 19...
24. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sapta Marga a Form of Military Resettlement" Bogor, 15 hal. 19...
25. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Citra Era Tinggal Landas di ambang Repelita VI" Jakarta, Harian Kompas. 19...
26. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ekologi Manusia; Suatu Penjajagan Menentukan Ruang Lingkupnya" Bogor, IPB. 22 hal. 19...
27. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Alternatif dalam. Krisis Ekonomi dan Sosiologi Dunia Barat". Bogor, 17 hal. 19...
28. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Segi-segi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir". Bogor, AsMen RISTEK. 19...
29. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Future Population Estimates by Sex and Age. Report III" The Population of Southeast–Asia (Including Ceylon and China:Taiwan) 1950-1980 New York, UN Dept of Economic and Social Affairs ST/SOA/Series A/30. Particular reference to Indonesia 166 p., maps, graphs 1958
30. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Nederlands Nieuw-Guinea in Winkler Prins van deze Tijd; Encylopaedisch Stan-

daardwerk over de jaren 1950-1960". Amsterdam & Brussel, Elsevier. p., 512-514. 1961

31. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Keerpunt in de Nederlands–Indonesische Verhoudingen" dalam Maj. Wending Amsterdam . 1962
32. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kemungkinan Pembukaan Wilayah Secara Cepat Bagi Produksi Tanaman Pangan di Daerah Way Jepara–Rawa Sragi (Daswati I, Lampung)" Bogor, Badan Koordinasi Survey. 178 hal., peta, graf., tabs. Contrib. Chp. IV, V dan VI. 1964
33. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kemungkinan Pertanian Mekanisasi di Dataran Kalaena (Sulawesi Selatan/Tenggara)" Bogor, Badan Koordinasi Survey. 197 hal., peta., Tabs. Contrib. Chp. II, IV, VI dan VII. 1964
34. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Laporan 10 Kecamatan Jatiluhur," Bogor, Dept. Sosek IPB. 1964
35. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Laporan Survey Perluasan Areal Bahan Pangan di Daerah Way Jepara dan Rawa Sragi, Lampung". Bogor, BPU, Mekatani. 1964
36. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Het Poerwokerto Effect Amsterdam", Seminarium voor Z.O. Azie, Universiteit van Amsterdam. 1964
37. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membangun Pusat Dokumentasi di Bidang Sosial Ekonomi Pertanian". Bogor, Survey Agro Ekonomi, dalam Antara Scientific Bulletin, 1965.
38. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Grenswijzigingen in Regentschappen op Java, 1940-1950-1960". Amsterdam, Seminarium voor Z.O. Azie, Universiteit v. Amsterdam. 1965
39. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Bookreview on Cindy Adam's Sukarno" dalam Antara Scientific Bulletin, 1965.
40. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Daftar Kepustakaan Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi". Bogor, Fakultas Pertanian IPB. 1965
41. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menghayati Masyarakat Pedesaan Sepintas Kilas" Bogor, 8 hal. 1965
42. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menuju ke Pengertian Struktur di Daerah Pedesaan". Bogor, Symposium Modernisasi Pedesaan di Indonesia. 1968
43. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Way Pengubuan Irrigation Project; Agricultural Survey Report". Bogor, IPB. Directorate of Irrigation, Ministry of Public Works and Power. 234 p., tabs, maps, graphs., photos, Contrib. Chp. II & V G. 1969

44. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Way Umpu Irrigation Project Agricultural Survey Report”. Bogor, IPB. Directorate of Irrigation, Ministry of Public Works and Electric Power. 252 p., graphs., Tabs., Contrib. Chp. IV G & K. 1969
45. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “The System of Finance in Indonesia; Credit Institutions and their Functions in Agriculture”. Bogor, INDOCONSULT – Jakarta (type written, Confidential) 48 p. 1969
46. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Perubahan Struktur Sosial di Indonesia” dalam Komunikasi, 1969.
47. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Laporan Survey Pendahuluan Pembangunan Pertanian, Irian Barat; Inventarisasi Bidang Sosial Ekonomi”. Bogor, IPB. 57 hal., bibliog., peta. 1970
48. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Report on a Little Survey on Mass Comunication Media in Rural Areas; A Case Study of two villages. Bogor, Dept. Sosek. IPB. 1970
49. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kesan-kesan dari Seminar LIPI tentang peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Indonesia” dalam Majalah. Komunikasi, 1970
50. ”Survey Pendahuluan Pembangunan Pertanian Irian Barat. Lembah Baliem.. Kabupaten Jaya Widjaya. Bidang: Teknik & Sosial Ekonomi Pertanian”. Bogor, Fakultas Petanian I PB. Progress Report 15 hal. & 3 Lampiran 26 hal.
51. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Survey Iuran Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukabumi”. Bogor, Biro Pengabdian Masyarakat, IPB. Mimeo graf. Collaboration IPB – Kabupaten Sukabumi. 1971
52. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kebijaksanaan/Program Pembangunan Pertanian di Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Irian Jaya”. Jakarta, Departemen Pertanian, Biro Perencanaan. 4 vols., tab., map., photo, annex A reconnaissance survey covering agronomic, cultural anthropological, health and nutritional aspects. Chief Editor & Co-Author. 1971
53. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Survey Sosial Ekonomi Daerah Pengairan Way Seputih, Lampung Tengah”. Bogor, IPB-Proyek Irrigasi-IDA Paging by Chapter, tabs, map, bibliog. Contrib. Chp.I&III. 1971
54. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Agricultural Survey of Teluk Lada Irrigation Project”. Bogor, IPB-Directorate of Irrigation, Ministry of Public Works and Electric Power. Paging by Chapter, graphs, tabs, bibliog. Contrib. Chp.V. 1971

55. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Landreform or Landsettlement; Shifts in Indonesia’s Land Policy, 1960-1970”. Madison, Wis., Land Tenure Center, Univ of Wisconsin. Land Tenure Center Paper Series no.81. 1972
56. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Economic and Social Situation in the ECAFE Region; Review of the Social Economic Situation in the ECAFE Region 1970-1972: Some Problems and Recomendations”. Bangkok, ECAFE Report by UN Secretariat no.E/CN.11/L.362. 1972
57. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Agricultural Survey of Batang Pane Irrigation Project (Report)”. Bogor, IPB-Directorate of Irrigation, Ministry of Public Works and Electric Power. Paging by chapter, maps, tabs, graphs. Contrib. Chp. V Part II, Part I. 1973
58. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pembangunan Daerah dalam Hubungannya dengan Koordinasi, Serta Masalah Mendorong Partisipasi Kelembagaan”. Dalam. Kerjasama Kab. Sumedang-IPB. 10 hal. 1974
59 . TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Rural Leaders and Developmental Events” dalam Ekonomi & Keuangan Indonesia, Vol. XXII, no.1, March 1974, pp. 65-74. 1974
60. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pemimpin Pedesaan dan Peristiwa Pembangunan: Beberapa Catatan Penelitian Mengenai Penemuan Suatu Survey Penjajakan Potensi Masyarakat Desa”, dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia , Vol. XXII, no.1 Maret 1974. 1974
61. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Report on Pemali Comal Rehabilitation Project: Findings of a Quick Survey”. Bogor, IBRD, 1974. (Confidential typewritten Report). 28 p. 1974
62. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “The Role of Transmigration in National and Regional Development: Proceedings of the 1971”. Transmigration Workshop. Jakarta, Transmigration Training and Research Center, Directorate General for Transmigration. Ed. 186p. 1974
63. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Supplementary Report to the NEDECO-Snowy Mountaions Engineering CO”. Report on the Cirebon Irrigation Rehabilitation Project: Agricultural Aspects. Bogor, LPSP-IPB (unpubl.mimeo). Ed. 60 p. 1974
64. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Tentative Report on the Irrigation Benefits of the Rehabilitated Cisadane Irrigation Scheme”. Bogor, IBRD-Jakarta, 1974 (typewritten, confidential). 27 p. 1974

65. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Transmigration in the Context of Area Development”. Jakarta, Transmigration Training and Research Center, Directorate General for Transmigration. Ed. 178 p. Proceedings of a Mobile Workshop (TTRC-ACCARD/FAO BANGKOK) Lampung (Southern Sumatra-Luwu (South Sulawesi)-Surakarta (Central Java) and Jakarta, 1974
66. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Indonesia, Irrigation Program Survey”. Washington, IBRD. (Confidential Report) approx. 30 p Mimeo, Contrib. 1974
67. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Cisadane Summary Report”. Bogor, IBRD. (Confidential Typewritten Report) 14 p. 1974
68. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Basic Problems of Rural Development: A Plea for a More Unified Approach to Planning”. New York. SEADAG. Presented at a Seminar of SEADAG at Ujung Pandang. 1974
69. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Tinjauan buku: SOERJONO SOEKANTO, Sosiologi; Suatu Pengantar dalam Masyarakat Indonesia” dari Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Vol.2, no.2 hal 241-45. Des. 1975. 1975
70. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Punggur-Way Abung Two Case Studies in Irrigated and non-irrigated Transmigration Settlement Areas of Lampung”. Jakarta, Transmigration and Co-operatives. 75 p. Mimeo. (Transl. From Indonesian by Mrs. J. Hardjono) Based on a workshop in Kota Gajah, Lampung. 1975
71. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Himpunan Kertas Kerja Pada Seminar Transmigrasi tentang Peningkatan Kegiatan Transmigrasi dalam Rangka Pengembangan Wilayah”. Jakarta, Pusat Latihan dan Peneltian Transmigrasi Dept. Nakertranskop. Mimeo (Ed.) 1975
72. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Promotion of Transmigration Activities in the Context of Area Development (Ujung Pandang South Sulawesi Seminar)” Jakarta, Transmigration Training and Research Center. Dept. Manpower, Transmigration and Cooperatives. 120 p. mimeo, maps, graph. (Ed.) 1975
73. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Beberapa Segi Potensi Sosial Daerah Pedesaan”, dalam Journal Penelitian Sosial, No.1, Th.1, 1976. hal. 1-28. Terbitan FIS – UI. 1976
74. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “A Grassrot Level Development Strategy; The Role of Java’s VIllages re-examined”. Bogor. 24 hal. 1976
75. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “The Organizational Phenomenon and Planned Development in Rural Communities

of Java: A Case Study of Kec. Cibadak West Java and Kec. Kendal, Central Java". Jakarta, FIS. Univ. Indonesia. 410 pp. Bibliog., glossary , Annex. Doctoral dissertation, mimeo, unpubl. 1977

76. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesia's Rural Development in The Mid-seventies; Apparent of a Top-Down Approach" Bogor, 20th September. Singapore , ISEAS, 1978. 29 hal. 1977
77. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Proses Kemasyarakatan di Daerah Transmigrasi : Segi-segi Pembangkitan dan Pembinaan Koperasi" Bogor-IPB., 12 hal. 1977
78. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Purnawirawan ABRI dan Transmigrasi" Bogor, 13 Juni 1977, 12 hal. 1977
79. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mencari Pola Transmigrasi Baru; Penjajagan Konsep". Bogor, Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan IPB. Mimeo, grof.,bibliog. 22 hal. Disusun atas permintaan Dept. Nakertrans. 1977
80. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mencari Pola Baru Transmigrasi". Bogor, LPSP-IPB. mimeo. 1977
81. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menyambut Kampus IPB Darmaga Tahun 1990". Dalam 15 Tahun Institut Pertanian Bogor1963 – 1978. Bogor, IPB. hal 11 – 18. 1978
82. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Socio-Economic Aspect of Rural Java and Problem of Development; A General Outline". Bogor, IPB. 8 hal. 1978
83. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Faktor-Faktor Alam yang Perlu Diperhatikan dalam Rangka Penyempurnaan Klasifikasi Tipologi Desa. (Pembahasan)" Jakarta, Puslit Pengembangan Daerah, Depdagri. 7 hal. 1978
84. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gagasan Membangun Pusat-Pusat Pengembangan Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah". Jakarta, Seminar ISPI. 10 hal. 1978
85. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Bibliografi SOSEK, 20 Tahun , 1957-1977". Bogor, Dept. Sosek, Faperta. IPB. 178 p. (Chief Editor). 1978
86. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Recent Indonesian Development: Dilemma of Top-Down Approach" in Southeast Asian Affairs (Editorial Committe Chaired by Kernial S. Sandhu, Singapore, Heinemann Educational Books (Asia) Ltd. Hal. 139 – 150. 1978
87. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Elite and Masses: Trends in Recognition and Alienation" in Haryati Soebadio and Carine A. du Marchie Sarvaas (eds.), Dynamic of Indonesian History, Amsterdam, New York etc. North Holland Publ. 10 p.377-395. 1978

88. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Pertanahan; Laporan Interim Menteri Negara Ekuin dan Menteri Negara Riset. (Executive Secretary)". Jakarta, Kantor Menteri Riset 161 p, Confidential. (disusun berdasarkan penugasan Presiden R.I. pada Sidang Dewan Stabilitasi Ekonomi Nasional tgl. 8 Nopember 1977). 1978
89. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. & DUNDAWA. "Bawon dan faktor-faktor penentu sosial ekonominya; Suatu penelitian kasus cepat dan mendalam di Kewakilan Kedungmundu Kabupaten Krawang", dalam Masyarakat Indonesia, Vol. 5, no.2, p.139-60. 1978
90. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Basic Human Needs as a Development Strategy". Cambridge, John R. Kennedy School of Government, Harvard University. Working Paper for Colombo Plan Conference in Washington D.C. 1978
91. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Grassroat Level Development Strategy: The Role of Java's Villages Re-examined", dalam Ekonomi & Keuangan Indonesia. Vol. XXVI, no.4, December 1978, pp. 457-469. 1978
92. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pengembangan Desa Transmigrasi; Suatu Pendekatan Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya di Sepanjang Jalan Raya Lintas Sumatera". Bogor, IPB, 11 hal. 1979
93 TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sumbangan Pendekatan Sejarah dalam Penelitian Survey Di Daerah Pedesaan. (Pembahasan)" Bogor, IPB. 10 hal. 1979
94. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Monitoring and Evaluation systems for Rural Development in Asia; the Indonesian Case" (Original Paper). Referred to as source material in Kuldeep Mathur & Inayatullah (eds). Monitoring and Evaluation on Rural Development; Some Asian Experiences (1980. Kuala Lumpur, Asian & Pacific Development Administration Centre (APDAC). 1979
95. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup" Jakarta, BKKBN. 21 hal. 1979
96. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Profile of Rural Conditions in Indonesia" in Staff Summary Report: Workshop on Technology for Increasing Rural Productivity in Indonesia. (Jakarta, Indonesia), June, 5-8,1979. Washington D.C. , National Academy of Sciences. P.107-142. 1979
97. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Social Aspects of Rural Development; The Micro Scene. Bandung, UNESCO-ITB. 1979
98. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat Pedesaan di

Jawa" dalam Masyarakat Indonesia, TH.VI, no.1. hal 13-16. 1979

99. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tuntutan Penataan Kembali Sistim Pertanahan" Medan, PERHEPI. Makalah untuk Konperensi Nasional Ekonomi Pertanian 9-12 September 1980) hal. 5-19. 1980
100. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Strategi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang; Latar Belakang, Permasalahan dan Pilihan; Beberapa Segi Sosiologi". Bogor, IPB. 10 hal. 1981
101. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Basic Human Needs". Jakarta, Man & The Bio Sphere. Training Course on The Practical Aspect of Human Ecology. 1981
102. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Feasibility Study on Palawija Development Pilot Project". Lampung, South Sumatera, South Sulawesi & East Java . Bogor, IPB-USAID. Paging by chapter. 1981
103. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "In Search of an Institutional Frame Work and Appropriate Curricular Structures in the Development of a Human Ecological study Direction". Jakarta, Yogyakarta, dan Denpasar ASAIHL Seminar on Human Ecology 4- 9 November 1982. 21 hal. 1982
104. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "An extended Outline of a Series of Three Lectures On Human Ecology; An Introduction" Bogor, UNESCO-BIOTROP Seminar on Environmental Science and Management. 17 Nov – 14 Dec. 1982. 12 hal. 1982
105. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Transmigration Problems Affecting Population Mobility in South Sumatera" in Population Resettlement Programs in Southeast Asia, edited by G.W. Jones and H.V. Richter. pp.53-62. Canberra, The Australian National University Monograph no.30. 1982
106. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sistim Ekonomi Tradisional; Beberapa Pokok Pengarahan". Bogor, Proyek Inventarisasi & Dokumentasi Kebudayan Daerah Pengarahan/Penataran Tenaga Peneliti/Penulis Daerah Seluruh Indonesia, Dep P&K., bibliog. Tik, mimeo 11 hal. 1982
107. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "National Development, Transmigration Models and Recent Demographic Trends in Indonesia". 22 pp., mimeo (revised draft in print) Paper submitted at the Canadian Council for Southeast Asian Studies (CCSEAS-ISEAS) 2nd International Conference in Singaporee (21-24 June,1982). 1982
108. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Human Ecology Course Development at Institute Pertanian Bogor; In Search

of an Institutional Framework and Appropriate Curricular Structures in the Development of a Human Ecology Study Direction" in a compilation of articles and abstracts submitted at on ASAIHL Seminar on Human Ecology, Jakarta, Yogyakarta and Denpasar. Indonesia, November 4-9, 1982. 1982

109. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana di Daerah Pedesaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed), Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan. Jakarta, LP3ES, pp. 214-241. 1982
110. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesia in 1981: Facing the Problems of Succession" dalam Southeast Asian Affairs, 1982. Singapore, ISEAS-Heineman Asia, pp. 135-148. 1982
111. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Tantangan dan Pilihan Sumbangan dalam Pembangunan". Jakarta , 24-26 Nop. 1982, mimeo 7 hal. Makalah untuk Diskusi Panel Dewan Veteran Indonesia, R.I. 1982
112. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Population Pressure and Social Economic Development in Rural Indonesia" New York, UNITAR. 1982
113. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Penelitian Ilmu Sosial dan Penentu Kebijakan" dalam Prisma, thn. XII no.6 Juni 1983. pp 54-63. 1983
114. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "National Development, Trasmigration Models and Demographic Trends in Indonesia" dalam The Indonesian Quarterly, Vol.XI, no.2, 1983. pp. 41-55 1983
115. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sekelumit Kaitan antara Budaya Agraris dan Norma Pembangunan Dewasa ini", dalam Analisis Kebudayaan, Th. II, no. 2, 1981/82. hal. 28-31. Jakarta, Dept. P&K. 1983
116. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Institutional Development in Composite Report of the Watershed Assessment Team". Assembled by the GOI and USAID between March 28 and May 7, (1983). Jakarta, USAID, 3 vols. 1983
117. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Pemikiran tentang Pola dan Pembinaan Proyek Transmigrasi Repelita IV". Bogor, IPB, 1983. Makalah pada Lokakarya Transmigrasi Menuju Program yang lebih Terarah di Biotrop. Bogor, 8-10 Agustus 1983, 19 hal. 1983
118. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beyond Transmigration/Resettlement; The Indonesian Case". Bogor, IPB, 40 pp. Typewritten. Paper presented at workshop SEASP-Dept. of Geography, Univ of Malaya (8 Agustus 1983). 1983

119. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Meraba-raba Industri Pertanian. Nasib Indocorn. Opec Turun, Turun-Naik" 1983
120. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sidang Umum MPR 1983" Bogor, 6 Maret, 3 hal. 1983
121. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Swasembada Pangan Harus Dirumuskan Lebih Jelas", Kompas, 5 Januari, 2 hal. 1983
122. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Social Research and the Policy Maker (Sociology)", Dermaga, 31 Januari, 16 hal. 1983
123. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pamong Desa dan Pengelolaan Lingkungan" Bandung, Kelompok Kerja Ekologi Manusia. 1 April 1983, 4 hal. Pertemuan 14-15 April 1983. 1983
124. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Catatan Mengenai Kharisma dan Perkembangan Ilmiah; Suatu Tinjauan dengan Perspektif Sejarah" Dermaga, 1 Mei, 6 hal. 1983
125. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Segi Sosial Budaya Disiplin Nasional; Suatu Penjajagan Mengenai Suatu Pranata dalam Proses Pendewasaan Bangsa." Deramaga, 15 September, 14 Hal. 1983
126. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Penataan Tenaga Peneliti 'Type A'", Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerjasama dengan Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian , IPB dengan PUSDIKLAT Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Studi Desa. Bogor, 24 Februari, 8 hal. 1983
127. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pertanian Nusantara 2000; Segi-segi Sumberdaya Manusia dan Lingkungan". Bogor, Pusat Studi Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan IPB. Pertemuan Ilmiah Pembangunan Pertanian Berwawasan Lingkungan di Indonesia 23 – 24 Maret 1984. Jakarta, Sinar Harapan, hal 51 – 54. 1984
128. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tanah" (Bab III) dalam Bondan Winarno (ed.) Neraca Tanah Air; Rekaman Lingkungan Hidup, 1984. Jakarta, Sinar Harapan, hal. 51-54. 1984
129. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. & GUNAWAN WIRADI (eds) . Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta, penerbit PT. Gramedia. XVII, 344 hal., tab., grafik. 1984
130. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Segi Sosial Utama Kerangka Landasan Pembangunan" Bogor, 25 Pebruari., 20 hal. 1984
131. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mengantarkan Dua Abad Penguasaan Tanah di Jawa" Bogor, Gramedia 21 September, 5 hal. Dalam Dua Abad Penguasaan Tanah di Jawa. 1984

132. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mulai dari Titik yang Tidak Spektakuler" Bogor, Scientiae Mei., 3 hal. 1984
133. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dilema Tekno-Birokrasi dan Wiraswasta Kita: Renungan", Jakarta Harian Kompas, Senin 13 Pebruari, 5 kolom. Menjelang Pelita IV, 2 hal. 1984
134. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kelembagaan Tingkat Dukuh Sebagai Pelaksana Pembangunan" Jakarta, 26 Septem-ber., 2 hal. 1984
135. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kependudukan dalam Rangka Pembangunan Berwawasan Lingkungan" Bogor, 21 Maret., 15 hal. 1984
136. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Penghapusan BIMAS; Dari Revolusi Teknologi ke Polarisasi di Pedesaan?" Bogor (untuk Harian Kompas) 7 hal. 1984
137. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Pertanahan Menjelang Pemantapan Kerangka Landasan" Bogor. Makalah untuk PAIS-FISIP.UI 3-4 Oktober. 18 hal. 1984
138. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P "Pemuda Tani Sebagai Pelopor Pembangunan di Sektor Pertanian". Bogor. (Ceramah untuk HKTI. 28 Agustus 1984). 8 hal. 1984
139. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Catatan Ten-tang Penduduk dan Sumber Daya Alam" Bogor, 13 September. 5 hal. 1984
140. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Timbangan Buku – Pri-yono, Yumiko M. Dan P. Tjiptoherjanto (1983) 'Demokrasi di Pedesaan Jawa'" Jakarta, Penerbit Sinar Harapan. Bogor, 16 April. 5 hal. 1984
141. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Himpunan Professional dan Professionalisme di Indonesia; Mengenal Kebutuhan, Sifat dan Peranannya" Bogor, Diskusi dengan Pimpinan P.J.J. di Ja-karta. 7 Mei 1984, 16 hal. 1984
142. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Migrasi Berencana, Tolok Ukur Keberhasilan dan Misi Departemen di Hari De-pan", Bogor, U.I. Press. 7 September. Dalam S.E. Swasono (ed). Transmigrasi. Memperingati Transmigrasi 80 Tahun. 18 hal. 1985
143. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ex-Military Settlements and the Emergence of Social Differentiation in Frontier Areas". Kuala Lumpur, United Nations University Workshop on Re-source Use of Frontiers and Pioneer Settlements, 16-20 Septem-ber 1985. 20 hal. 1985
144. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "GUNNAR K. MYRDAL (1968) Asian Drama; An Inquiry Into the Poverty of Nations"

A Pelican Book, 3 Jilid, 2284 hal (Timbangan Buku) Bogor, 2 April, 5 hal. 1985

145. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sektor Pertanian, Sektor Industri dan Kesempatan Kerja Sebagai Jembatan dalam Struktur Ekonomi Kita", Dermaga, 25 Nopember, 18 hal. 1985
146. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Pokok Utama dalam Konsep Organisasi, Kepemimpinan dan Management", Dermaga, 5 hal. 1985
147. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah-masalah Sosial Budaya Penduduk Daerah Pantai Indonesia" 18-20 Mei 1985, Makalah Seminar Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia, Bogor. 11 hal. 1985
148. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Pokok Pemikiran Mengenai Manajemen Pembangunan Desa"Bogor, 1 Oktober, 15 hal. Lokakarya dengan BAPPEDA Tk.I, Jawa Barat, Oktober 1985. 1985
149. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Notes on Tenure and Agroforestry in Indonesia" Paper ICRAF Consultative Meeting on Land, Trees and Tenure, Nairobi Kenya. May 1985, 11 hal. 1985
150. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. G.J. VINK (1985) "Dasar-dasar Usaha Tani di Indonesia". Jakarta Yayasan Obor Indonesia XV, 244 hal. Tabel, Lampiran, Daftar Pustaka. Dermaga, 5 Pebruari, (Kata Pengantar) 3 hal. 1985
151. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah-masalah Sekitar Penentuan Prioritas dalam Program Penelitian Utama Nasional" Bogor, 12 Pebruari, 7 hal. 1985
152. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ilmu-ilmu Sosial dan Penataran Institusional" Bogor, 13 April, 20 hal. Lampiran. 1985
153. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Notes for Discussion Submitted to the World Committee on Environment", held in Jakarta, 22 March, 7 hal. Kantor Meneg KLH. 1985
154. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Lintasan dan Jangkauan Pemikiran Seorang Ahli Ekonomi". Bogor, 28 Desember, 16 hal. Prof. Soemitro; Pemikiran "Ekonomi Politik" Indonesia. Jakarta, U.I. Press (Buku Peringatan),. 14 hal. 1985
155. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pengantar Strategi Pengembangan dan Operasionalisasi Konsep Kualitas Berkemasyarakatan dan Kualitas Berbangsa Indonesia". Dermaga, 22 Nopember, 11 hal. Diskusi Pembahasan Rumusan Awal KNF Kualitas Bermasyarakat dan Kualitas Berbangsa. Tanggal 29-30 Nopember 1985. 1985
156. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tahun 1984, Ambang Lepas Landas?" dalam Anwar Nasution (ed.), Peluang dan

Tantangan Pembangunan sampai 1989. Jakarta, Penerbit Sinar Harapan. Hal. 154 s/d 163 . 1985
157. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Persepsi Mengenai Pelapisan Sosial dalam Perkembangan Sosiologi di Indonesia" Bogor, 15 Mei., 15 hal. 1986
158. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mengenal Sosiologi Untuk Pembangunan Pedesaan" Bogor, 8 Januari, 7 hal. 1986
159. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Rentangan Antara 'ANOMIE' Sosial dan Pemantapan Kerangka Landasan" Jakarta, Kompas, 8 April. 2 hal. 1986
160. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menggalakkan Transmigrasi Swakarsa dan Implikasinya Pada Pembinaan Masyarakat Baru demi Kesatuan Budaya" Dermaga, 25 Agustus, 16 hal. 1986
161. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tenurial and Labour Conditions on the Margin of Food Selfsufficiency" Bogor, 12 hal . 1986
162. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Hi-tech, Lo-tech dan Perlambangan dalam alih Teknologi". Bogor, 14 Pebruari, 6 hal. 1986
163. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menghadapi Alih Teknologi di Bidang Pangan Menjelang Repelita V". ogor, 4 Pebruari, 12 hal. 1986
164. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Iptek untuk Pembangunan Nasional" Jakarta, 17 Januari, 5 hal. 1986
165. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Peranan Pemuda dalam Perkembangan Teknologi Menuju Teknologi Canggih". dalam Peranan Pemuda dalam Era Profesionalisasi Menuju Pembangunan Bangsa. Jakarta, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 58 th. 1986
166. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menimbang dan Memproyeksikan Sistim Nilai Utama Bangsa Berdasarkan Perspektif Sejarah". Bogor, 15 hal, bibliog. Penggerak diskusi Atas Permintaan Panitia Telstranas, Dewan HANKAMNAS. September 1986. 1986
167. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Warisan Ilmu Sosial Barat dan Tantangan untuk Golongan Professional Menegakkan Demokrasi di Negara Dunia Ketiga". Jakarta, 405 – 431 hal. Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo. 1986
168. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dari Tahap Agraria Meraih teknologi Canggih; Sikap dan Tugas Pemuda Menjelang Abad ke-21" Jakarta, HMI. 12 hal. Memperingati Sumpah Pemuda ke-58. 1986

169. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Masalah Transformasi Indonesia dari tahap Agraris ke Era Industrialisasi; Suatu Tinjauan Umum dari Sudut Pandang Sosiologi”. Bogor , 15 hal. 1986
170. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Environmental Impact Analysis; Some Socio- Cultural Aspects”. Bogor. Lecture Notes. Pp. 29 – 46. 1986
171. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Beberapa Implikasi dan Keterbatasan Pembangunan Pertanian dalam Menjangkau Golongan Lemah” Bogor, PERHEPI. 12 hal. 1987
172. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Warisan Ilmu Sosial Barat dan Tantangan untuk Golongan Profesional Menegakkan Demokrasi di Negara Dunia Ketiga “. Dalam Hendra Esmara (ed), Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan; Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo. Jakarta, P.T. Gramedia, hal. 322-344. 1987
173. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Laporan Saguling dan Cirata; Suatu Gagasan untuk Penyempurnaan Model Analisa Dampak Lingkungan”. Bogor, PSL-UNPAD. 1987
174. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Policy Issues and Policies” Bogor, 5 hal. 1987
175. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Environmental Sciences and Human Ecology” Bogor, 14 hal. 1987
176. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Technology Change in Asian Agriculture; Some Social Implications”, akan terbit dalam Cultural, Structural, and Technological Change in World Agriculture, sebagai nomor khusus Revue International de Sociologie. 1987
177. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Transformasi Indonesia dari Tahap Agraris ke Era Industrialisasi”, dalam Majalah bulanan EKSEKUTIF, no.91. Januari 1987, hal. 19-22 (rubrik essay). Berasal dari makalah ceramah Satu Windu BPPT, 20 Agustus 1986. 1987
178. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kendala Pembangunan Pedesaan dan Tuntutan Pembaharuan Strategi”, dalam majalah 2 mingguan AMANAH, no.25. 19 Juni-2 Juli 1987. hal. 24 & 26. 1987
179. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Environmental Science and Human Ecology” Bogor, IPB Graduate School. Symposium “ Environmental Education and Studies, 18 – 21 Jan. 1988. pp. 30 – 45. 1988
180. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “”Dimensi Sosial” dalam Alfian dan Mely G. Tan. Kerangka Landasan Pembangunan dan Lepas Landas. Jakarta, Sinar Harapan. Hal. 65 – 74. 1988

181. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Terms of Reference Musyawarah dan Seminar Adat Kabupaten Kampar, Riau"Bogor, 6 hal.Seminar di Bangkinang Riau. 1988
182. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dimana Kerangka Landasan Mu?"Bogor, 8 hal. 1988
183. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P.Pembahasan Makalah Dr. Yulfita Rahardjo: "Perancangan di Tiga Pemukiman Transmigrasi; Suatu telaah Adaptasi".Jakarta, LIPI. 5 hal. 1988
184. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P."Masalah-masalah Kelembagaan di Daerah Pedesaan". Kerangka Ceramah. Bogor, 3 hal.Disusun untuk Pendidikan Non-Gelar Anggota DPRD Tk.I. diselenggarakan oleh FISIPOL-UI. 1988
185. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P."Technology Change in Asian Agriculture, some Social Implications".Bogor, 34 hal. Draft Publication. (terbit 2006). 1988
186. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Sociological Evaluation of Participatory Approaches in Planned Rural Development, Some Experiences from Selected Third World Countries". Bologna, Italy, 16 hal. Guest Speaker as 2nd Vice President of International Sociology Association 26 June-1 Juli 1988 at VII th World Congress for Rural Sociology; Published. 1988
187. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pemukiman Kembali Penduduk Saguling dan Cirata Melalui Pembangunan Perikanan". Bogor, 10 hal. 1988
188. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membangun Prasarana untuk Menunjang Kebijakan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi". Bogor, 11 hal. 1988
189. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Kongres Sosiologi Pedesaan Sedunia. Bogor, 5 hal. 1988
190. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Norma Ilmiah, Universitas dan Staf Akademis" Naskah untuk Panitia Normatif, FakultasPertanian IPB. Rapat Senat. 1988
191. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Kata Pengantar, dalam Karl-Heinz W Bechtold (ed.), Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian. Hal. X-XVIII. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 1988
192. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Prakata" untuk buku Reader Agricultural Economics, Agricultural Policy and Development (terjemahan kedalam bahasa Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor. 1988
193. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Faktor Sosial Budaya dalam Transformasi Menuju Industrialisasi". Jakarta, terbit dalam Harian SUARA KARYA Maret 1988. Asalnya karangan makalah untuk Rapat Koordinasi RISTEK, 1988. 1988

194. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Environmental Sciences and Human Ecology" Bogor, Pusat Antar Universitas, IPB. 1988
195. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Arti Penelitian bagi Hari Depan Kehidupan Bangsa" Jakarta, Harian KOMPAS 21 Juli 1988. Wawancara Tajuk Rencana. 1988
196. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tanah Negara; Beberapa Catatan Mengenai Latar Belakangnya" Bogor, 22 Nov. 1989. 4 hal. 1989
197. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Koperasi Pertanian di Indonesia dan dari Sudut pandang Organisasi dan Swakelola". Bogor, 14 hal. 1989
198. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Metoda Partisipasi: Pengertian Pokok dan Cara Pendekatan". Bogor, LPEM-IPB, 6 hal. Pelatihan Metodologi Pengabdian pada Masyarakat Perguruan Tinggi se-Indonesia. 6 hal. 1989
199. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Peranan Faktor-faktor Non-Ekonomi dalam peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Ekonomi". Jakarta, Temu Karya Nasional wanita Indonesia dalam Pembangunan Nasional 22-23 Maret 1989. 12 hal. 1989
200. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tenaga Kerja dan Transmigrasi" Jakarta, Harian Suara Karya. 5 hal + lampiran . 1989
201. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Faktor Sosial Budaya dalam Pengembangan Agroindustri" Bogor, 11 hal. 1989
202. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Misi Pembangunan; Potensi dan Jangkauannya. Bogor, suatu sumbangan. 1989
203. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menerawang Masa Depan Ilmu, Teknologi dan Seni dalam Pengembangan Budaya". Bogor. Tanggapan atas ceramah Prof. Dr. J.A. Katili dan Prof. Dr. I. Alisyahbana. Symposium dalam Lustrum ke-VI ITB. Bandung, 11 hal. 1989
204. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mampukah Deregulasi Pemerintah?; Subuh untuk Otonomi Daerah?" Bogor, 12 hal. 1989
205. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Rekrutmen dan Pengembangan Kepemimpinan Desa" Semarang, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Symposium Pengembangan Pemerintahan Desa Sebagai Basis Pembangunan Nasional Dalam Rangka Tinggal Landas. 7 hal. 1989
206. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menyusulkah Deregulasi Pemerintahan? Subuh untuk Otonomi Daerah?." Semarang,

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Symposium Pengembangan Pemerintahan Desa Sebagai Basis Pembangunan Nasional Dalam Rangka Tinggal Landas. 8 hal. 1989

207. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Seminar Penumbuhan Kesadaran Bela Negara. Bogor, 9 hal. 1989
208. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kerangka Masalah Umum Pembangunan (Pemukiman) Pedesaan dalam Kaitan dengan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Pedesaan". Bogor. 15 hal. 1989
209. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Problem of Re-Entry: Personal and Institutional; An Early Indonesian Case-Study". Mineapolis/ St. Paul, Minnesota, Nasional Association for Foreign Student Affairs (NAFSA) Jakarta, 16 hal. Kerjasama OTO/BAPPENAS-NAFSA . 1989
210. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Peranan Kesatuan Adat Tradisional dalam Pembangunan Daerah." Bogor, 10 hal. 1989
211. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Benturan Pembangunan dengan Peri-Kemanusiaan." Bogor, 4 hal. 1989
212. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Angin Sepoi-sepoi Deregulasi, Debirokratisasi dan Demokrasi". Bogor, harian Kompas 15 hal. 1989
213. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Koperasi Pertanian di Indonesia; Suatu Telaah dari Sudut Pandang Organisasi dan Swakelola". Dalam INFOKOP. No.8, Juli 1989, hal 63-69. 1989
214. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Land Resource Utilisation and Management in Indonesia's New Order: Past, Present, Future". 4-8 December 1989. Canberra, Australian National University. 1989
215. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Beberapa Segi Sosial PIR Tebu di Pelaihari, Kalimantan Selatan." 16 hal. Pasuruan, P3GI. Makalah Pertemuan Teknis Budidaya Tebu Lahan Kering, 21-22 Desember 1989. 1989
216. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan." Yogyakarta, PAU Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada. Temu Ilmiah Perubahan Sosial dan Demokrasi di Pedesaan, 11-13 Desember 1989. 1989
217. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pokok-pokok Pikiran untuk Diskusi Panel Harian Kompas". Jakarta, Harian Kompas. 12 hal. 1990
218. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa". Dalam Prisma, no.2, th. XIX, 1990. hal. 3-14. 1990

219. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Dimensi Kesetiakawanan dalam Pelapisan Sosial.” Dalam Bina Darma, no.29, thn.8, 1990, hal.20-29. 1990
220. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kemiskinan dan Kesenjangan di Tengah Pertumbuhan.” Bogor, 3 hal. 1990
221. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Membangun Indonesia Bagian Timur.” Jakarta, Harian Suara Pembaruan, ... hal. IV. Oleh-oleh dari Seminar PERHEPI, 12 Pebruari 1990. 1990
222. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kaum Kolonis dan Transmigrasi dalam Pembangunan Pertanian; Pemukiman Kembali Secara Berencana dan Terpimpin”. Dalam Bunga Rampai Transmigrasi dari Sabang – Dili – Merauke, 1990. hal. 258-280, Jakarta, Persatuan Pegawai Transmigrasi. (P3T). 1990
223. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Cities; Life in the world’s 100 Largest Metropolitan Areas” (Contributor). New York, Population Crisis Committee. Sharon l. Camp-Editor Mary Barberis-Director of Research Judith Hinds-Managing Director Result: big poster and statistical Appendix. 1990
224. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P., IRLAN SOEJONO & JOAN HARDJONO. “Rural Poverty in Indonesia”. In M.G. QUIBRIA (ed.) dalam Rural Poverty in Developing Asia (Vol.2) pp.73-242. Jakarta . Draft for ADB Manila. 1990
225. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Land Tenure and Sustainable Hillslope Farming”. Solo, Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Indonesia (HKTI). Pada kesempatan International Workshop on Conservation Policies for Sustainable Hillslope Farming. Solo, March 11-15, 1991. 1991
226. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Ethos Kerja Masyarakat” Jakarta, KIPNAS/LIPI V, 22 hal. 1991
227. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Benarkah Swastanisasi?” Bogor, 6 hal. 1991
228. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “The Utilization and Management of Land Resources in Indonesia, 1970-1990.” Dalam J. Hardjono (ed.), Indonesia; Resources, Ecology and Environment. Kuala Lumpur, Oxford University Press. 1991
229. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pengkajian Sumberdaya Manusia.” Bogor, 4 hal. 1991
230. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Peranan Kelompok-kelompok Sosial di Pedesaan dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional.” Bogor, 9 hal. 1991
231. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui IPTEK dan Keterampilan Sebagai Kunci Utama Bagi Pembangunan Nasional.” Bogor, Seminar Golkar di Bukit Tinggi, 11 Juni 1991. 9 hal. 1991

232. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Poverty Alleviation in Indonesia; Adminstrative and Institutional Problems". Dalam F. HUSKEN dkk. (eds.), Indonesia's Experiences under the New Order. The Hague, Dutch Ministry of Development Cooperation. 44 hal. 1991
233. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembahasan Makalah Prof. Hasan Poerbo. Pengelolaan Pembangunan Fisik dan Lingkungan Perkotaan". Bogor, 9 hal. Lokakarya Pembangunan Desa Perkotaan DKI Jakarta, 8-9 Januari 1991. 1991
234. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dinamika Golongan Lemah Pedesaan; Refleksi atas Karya Tulis dan Pemikiran Dr. Sajogyo. Bogor, 20 hal. 1991
235. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Korupsi; Perilaku dan Gaya Hidup Melembaga". Bogor, 20 hal. 1991
236. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "International Education to Mitigate the World's Differences." Jakarta, 17 hal. (untuk NAFSA di Minesota, AS.) 1991
237. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Konteks dan Sifat Arah Perubahan Sosial di Indonesia Memasuki Transisi Industrial." Bogor, 11 hal. 1991
238. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Faktor Sosial Budaya dalam Pengembangan Agroindustri" dalam Saswinadi Sasmojo dkk. (eds.), Menerawang Masa Depan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni dalam Perkembangan Budaya Masyarakat Bangsa Indonesia. Bandung, ITB. Hal. 285-292. Diterbitkan dalam rangka memperingati 30 th. Berdirinya ITB. 1991
239. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Peranan Kelompok-kelompok Sosial di Pedesaan dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional". (8 hal.) Bogor, Departemen Penerangan RI. Seminar Peranan Kelompok Komunikasi Sosial Dalam Upaya Memacu Pembangunan di Kawasan Pedesaan. 19-20 Juni 1991 di Evergreen, Tugu. 1991
240. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Colonists and Transmigrants in Agricultural Development: Planned and Sponsored Settlement in Indonesia." In J.A. Mollet (ed.), Migrants in Agricultural Development; A Study of Intrarural Migration. London Mac Millan, 1991. pp. 132-152. 1991
241. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Pembahasan Makalah A.M. Satari dan B. Haryanto. "Peranan Pengusahaan Hutan Sagu dalam Menunjang Swasembada Pangan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". Jakarta. 10 hal. 1992
242. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gempa Tektonik dan Gejolak Sosial" Jakarta, Harian Kompas 22 Maret 1992. 1992

243. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Transmigrasi; Beberapa Segi Kemasyarakatan”. Bogor, 9 hal. 1992
244. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Guru Besar Sosiologi IPB Minta Pedagang Kaki Lima (K5) Jangan Diperangi”. Jakarta, Suara Pembaruan, 25 Oktober 1992. 1992
245. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pembahasan Tentang Pengembangan Wilayah Kalimantan Timur dalam Kaitannya dengan Pembangunan I.B.T. dalam PJPT III”. Bogor, 5 hal. 1992
246. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Komentar atas Pola Pikir Penyelenggaraan Ekonomi dan Demokrasi Pancasila”. Bogor, 9 hal. 1992
247. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kebijakan Penelitian dalam Rangka Menyongsong Pembangunan Jangka Panjang II, 1994-2019”. Bogor, 17 hal. 1992
248. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Aspek Sosial Ekonomi dalam Mengembangkan Hukum Pertanahan Nasional Menyongsong PJP II, 1994-2019”. Jakarta, Badan Pertanahan Nasional. 15 hal. Seminar BPN HUT. UUPA/1960 ke-32. 1992
249. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pengembangan IPTEK dalam Pembangunan Industrialisasi; Suatu Tinjauan Sosiologis ”. Jakarta, Kantor Meneg. Ristek. 13 hal. 1992
250. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pembangunan Bidang Pemukiman dan Perumahan”. Bogor, 5 hal. 1992
251. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pembahasan atas Makalah May. Jen. Soekarto. Strategi Penyelidikan Pangan Nasional dalam Ketahanan Nasional pada PJP II”. Jakarta, BULOG. 9 hal. Lokakarya BULOG 29 April 1992. 1992
252. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Inter-University Post-Graduate (S-3) Study in the Social Sciences” A Draft Proposal. Bogor, 7 hal. 1992
253. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Dasar-dasar Pemikiran Prof. Sadli yang Bertahan” (draft) Bogor, 17 hal. Diterbitkan (buku M. Sadli 70 Thn.) 1992
254. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kependudukan dan Sumberdaya Alam. Masalah-masalah Kemiskinan dan Pemerataan”. Bogor, 14 hal. 1992
255. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Institutional Aspects of Sustainable Water Resource Development”. Bogor, 9 hal. 1992
256. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Evaluasi Kondisi Kemampuan Tenaga Peneliti di Perguruan Tinggi untuk Menanggapi Kebutuhan Pembangunan”. Bogor, 5 hal. 1992

257. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pemikiran Prof. Sadli yang Bertahan” dalam M. Arsyad Anwar dkk.(eds.), Pemikiran, Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi. Jakarta, Gramedia, hal. 19-29. 1992
258. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Land Tenure and Sustainable Hillslope Farming” dalam S. Arsyad dkk (eds. 1992) Conservation Politics for Sustainable Hillslope Farming. Andeney, Iowa, Soil & Waterconservation Society. 1992
259. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “A Sociological Evaluation of Participatory Approaches in Planned Rural Development” dalam Mimbar SOSEK no.4 Juli 1992. 1992
260. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Rural Poverty in Indonesia; Trends, Issues and Policies” in Asian Development Review. Manila, ADB. 1992
261. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Words of Thanks at The Tail-end of a Seminar Held in My Honour”. Amsterdam, KNAW. Univ Amsterdam, 20 Nov. 1993. 41 p. 1993
262. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Beberapa Komentar Mengenai; Research Support to Perhutanan Sosial; Program on Forestland in Java 1984-1992” Bogor, 5 hal. 1993
263. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Asia in Globalising Persfective” Berlin, European Association of Development Research and Training Institutes (EADI) 15 – 18 Sept 1993. VIIth EADI. International Conference. 9 p. 1993
264. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Dari Masalah Pertanahan Sampai Tantangan Baru Pengembangan Wilayah”. Bogor, IPB. Pidato Akhir Jabatan Prof. Dr. SMP Tjondronegoro, 20 Oktober 1993. 10 hal. 1993
265. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Arah Kajian Sosiologis Menunjang Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam PJPT II” Bogor, IPB (Masa Memasuki Purnabakti IPB) 14 hal. 1993
266. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kebijaksanaan Penelitian Dalam Jangka Panjang II, 1994 – 2019” Bulletin Dewan Riset Nasional No.27 Desember 1993. 24 – 30 hal. 1993
267. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Sumbangan Kajian Sosiologi dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Selama PJP II”. Palembang, ISI. Komisariat Palembang. Seminar ISI 10-11 Pebruari 1993, 14 hal. 1993
268. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Mencari Landasan untuk Menyusun Paradigma Ilmiah Menyatu” (Paradigm For a Unified Science) Bogor, 20 April 1993. 1993
269. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pandangan Sosio-Kultural tentang Dampak Pembangunan Pengairan Selama PJP

I". Bogor, 10 hal. Seminar Pembangunan Pengairan dalam Kerangka Pengembangan Sumberdaya Air di Indonesia. 1993
270. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Birokrasi, Feodalisme dan Penyelewengan." Bogor, 10 hal. 1993
271. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Training for Development; Asia in Globalizing Perspective". Berlin, FADI VII th International Conference 15-18 September 1993. hal 27-36. 1993
272. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Buat Sahabat Lama". Jakarta, Maj. Editor. No.14/th. VII, 30 Des. 1993. Seminar Internasional di Universitas Amsterdam. 3 hal. (Tokoh Pekan Ini). 1993
273. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dewan Riset Nasional Membidani Suatu Jaringan IPTEK Nasional". Semarang, Univ. Diponegoro, Fak. Teknik. 11 hal. Seminar Jaringan Informasi IPTEKNET serta Manfaatnya bagi pendidikan, Riset, Industri dan Bisnis. 1993
274 TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembahasan Makalah Herman Soewardi; Dasar-dasar Sosiologi Koperasi". Bogor, 13 hal. 1993
275 TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gejala Konflik dalam Ilmu Sosiologi Indonesia". Bogor, 20 hal. 1993
276. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Perangkat Kelembagaan Sosial Ekonomi Dikalangan Petani Tanah Marjinal" Bogor, 10 hal. 1993
277. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Negara dan Dilema Koperasi dalam Swastanisasi" dalam Tim Nasional Pengkajian Perkoperasian, Dept. Koperasi, Jakarta. 1993
278. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Datang dan Pergi 1993" Bogor, IPB. Wakil Pegawai IPB Purna Bhakti, September 1993. 6 hal. 1993
279. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kata Sambutan Edisi Khusus DRN" Serpong, Sekretariat DRN. Edisi Khusus Dasawarsa DRN, 1984 –1994. 1 hal. 1994
280. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Program Riset Unggulan Terpadu (RUT.) untuk Memacu Pembangunan IPTEK Nasional", dalam Buku I Kebijakan dan Hasil Utama Penelitian. Bogor, Puslit Tanaman Pangan. 1994
281. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kebijaksanaan Bank Tanah" Bogor. 3 hal. 1994
282. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "DRN Sepuluh Tahun"Bogor, Sekretariat DRN. 5 Agustus 1994. 5 hal. 1994
283. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Berbahaya; Kalau Konversi Tanah Ditentukan Presiden" Jakarta, Dynamica No.2 Th. 1994 hal 6. 1994

284. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Citra Era Tinggal Landas di Ambang Repelita VI" Jakarta, Kompas, Maret 1994. 1994
285. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sosiologi Terapan dan Metodologi" Bogor, 13 hal. Ceramah di Univ. Udayana Denpasar, Bali. 1994
286. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembatasan Penguasaan Tanah Perkotaan" Bogor, 3 hal. 1994
287. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P "Ethnicity in Political and Economic Development; A Southeast Asian 2 Regional Overview". Bangkok, Chulalongkom Univ-UN Uiversity. 20 hal. 1994
288. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P "Masalah Tanah dalam Tinjauan Sosiologi". Bogor, Univ. Muhamadiyah Yogya, 21 hal. Seminar Nasional Masalah Tanah dan Stabilitas Politik Masa Depan, 6-7 April 1994. 1994
289. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sukses Si ! dan Sukses" Bogor, 3 hal. 1994
290. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Organisasi dan Manajemen dalam Kaitan dengan Sosial Budaya". Jakarta, 10 hal. 1994
291. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Peranan Dewan Riset Nasional dalam Pengarahan dan Pengembangan IPTEK serta Mekanisme Kerja". Jakarta, Sekretariat DRN. 9 hal. 1994
292. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Segi/Aspek Kelembagaan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Pertanian". Bogor, 14 hal. 1994
293. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Butir-butir Penilaian atas Perkembangan Sosiologi dan Sosiologi Pedesaan". Bogor, 8 hal. 1994
294. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gejala Konflik Pertanahan di Indonesia" Bogor, 18 hal. 1994
295. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dilemma Pangan 1996" Bogor, Diskusi Panel Ekonomi Harian Kompas, 4-5 Des 1995. 7 hal. 1995
296. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Transformasi ke Ekonomi Pasar" Bogor, Diskusi Panel Ekonomi Harian Kompas, 4-5 Des 1995. 1 hal. 1995
297. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesia's Cooperative Movement: Dilemma's Faced" Bogor. 20 July 1995. 8 p. 1995
298. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Metode Penelitian Sosial" Bogor/Cisarua. 13 hal. Penataran Metode Penelitian 25 Sept - 1Okt 1995. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Dept. P&K. 1995

299. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Penguasa 'Can Do No Wrong'" Jakarta, Harian Kompas. 7 Oktober 1995. 1995
300. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kenyataan, Impian dan Harapan". Jakarta, Bulletin Mas Trip No. 104, Thn XIX. Agustus 1995. hal. 22-24. 1995
301. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kita dan Revolusi". Jakarta, Harian Kompas, 28 Agustus 1995. 1995
302. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P . "Pengembangan Sumberdaya Manusia; IPTEK dan Masyarakat". Bogor, 16 hal. 1995
303. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sketchy Memories of a Republican Partisan". Bogor, 3 Juni 1995. 16 hal. Terbitan T. Abdullah (ed.) Denyut Nadi Revolusi Indonesia (RI. 50 thn.) Internasional Conference on the National Revolution, 11-14 Juli 1995. 1995
304. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Dinamika Sosial dalam Pembangunan Berkelanjutan" Bogor, 10 hal. 1995
305. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Rice Cultivation and Cultural Landscapes; The Impact of Rice on Human Civilization". Manila, UNESCO-ICOMOS, 9 hal. 1995
306. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Questioning Today's Development Model". Bogor, 11 hal. 1995
307. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Impacts of Asian Development Bank Financed Projects on Poverty Reduction in Two Provinces of Indonesia: MUDP II, North Sumatera and NTDAP, West Nusa Tenggara. Manila, ADB. 30 hal.+ Lampiran+ Peta 1995
308. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Social Science in Agricultural Research; Beyond Hard-Life Sciences and Tangible Products". Bogor, 16 hal. 1995
309. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tantangan Menjunjung Tinggi Etika". Karya tulis Ilmiah , Bogor, 6 hal. 1995
310. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "A Macro Rationale for Multi-Disiplinarity and Teamwork; A Contribution to CGPRT-ESCAP Course". Bogor, 11 hal. 1995
311. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesia's Social Science Agenda" dalam N.G. Schulte Nordholt & Leontine Visser (eds. 1995), Social Studies in S.E. Asia. Amsterdam, Vrije Univ. Press. 1995
312. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ethnicity in Political and Economic Development: A S.E. Asian Regional Overview" dalam K. Theeravit & G.B. Stillman (eds. 1995) Regional Cooperation and Culture in Asia-Facific. Tokyo, U.N. University 1995.

313. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Social Economic Challenges in Conserving Indonesia's Flora". Dalam Suhirman & J. Pfeiffer (eds. 1995), The Role of Flora in the World Economy and its Conservation. Bogor, Kebun Raya. 1995
314. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "L.I.P.I.: Revaluasi Ilmu Dasar dan Devaluasi Ilmu Sosial" Bogor, dalam Kompas. 3 hal. 1996
315. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P."Poverty in Indonesia". dalam M.G. Quibria (ed. 1996), Rural Poverty in Developing Asia, Vol.2 Kuala Lumpur dll. Oxford University Press for ADB. , pp. 73-242. 1996
316. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pak Sajogyo; Pekerja Keras, Ilmuwan Bebas" dalam Mubyarto (ed. 1996), Sajogyo, Bapak, Guru dan Sahabat. Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika. 1996
317. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Suasana Keprihatinan Mengiringi Masyarakat Kita Memasuki Era Globalisasi" Bogor, 7 hal. 1996
318. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Suatu Tinjauan Ringkas Mengenai Perkembangan Penelitian di Indonesia", dalam Mimbar Sosek Vol.9/No.1. Bogor, Jurusan Sosek IPB, hal. 66-78. 1996
319. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Laporan Pelaksanaan Tugas Local Short Term Advisor", di PSL Institut Teknologi Surabaya, dan PSL Institut Teknologi Bandung. 60 hal + Lampiran. 1996
320. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Laporan Penilaian Pengembangan Pusat Studi Lingkungan", Institut Teknologi Surabaya 10 November. Jakarta. Dit. jen DIKTI. 1996
321. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "De Leeuw en de Banteng" Dalam P.J. Grooglever & MBJ Schauden De Leeuw en de Banteng. Pp 235 – 249. Den Haag, Institut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997. 1997
322. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Demokratisasi Menghadapi Era Globalisasi". Yogyakarta, Kel. V, DRN. 7 hal. (Diskusi Panel, 19-20 Pebruari 1997). 1997
323. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Perpanjangan BUP Pegawai Negeri Sipil" Jakarta. Men.Pan. 4 hal. 1997
324. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tanah: Asset Utama Pembangunan" Bogor, 9 hal. Maj. Analisis, Yayasan AKATIGA. 1997
325. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kampanye 1997 dan Theori Permainan" Bogor, 3 hal. 1997

326. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Rural Development and Poverty Eradication in the ASEAN Region: Experience, Issues, Challenges and Prospects from the Social Perpective" Kuala Lumpur. 1St ASEAN Senior Officials Meeting on Rural Development and Poverty Eradication 20-21 October 1997. 24 hal. 1997
327. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menuntut Kemandirian MPR, 1998-2001" Bogor, 3 hal. 1997
328. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Memberdayakan Kelembagaan Guna Mengurangi Kemiskinan" Bogor, 14 hal. 1997
329. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Wertheim: Buitengewone Hoogleraar" Bogor, 2 hal. Bijdrage aan Wertheim-Boek (boek niet gedrukt voor distributie). 1997
330. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Desa dan Pembangunan Pertanian (Beberapa Propinsi)". Bogor, Jur. Sosek Faperta IPB. 4 hal.1997
331. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Program-program Intervensi Upaya Pengembangan Pedesaan yang Ditujukan untuk Mengentaskan Kemiskinan". Bogor, Jur. Sosek, Faperta IPB. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Pedesaan Indonesia 8-9 Juli 1997. 5 hal. 1997
332. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Alternatif Models of Development". Jakarta, The Jakarta Post 11 April 1997. 1997
333. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Faktor-faktor Sosiologi Politik" Bogor, 7 hal. 1997
334. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Social-Economic Aspects of Floral Conservation in Nusantara Archipelago". Bogor, Kebun Raya . 12 hal. 12 Juni 1997. Seminar on Floral Conservation in Nusantara Archipelago Commemoration 180th Anniversary 2-3 July 1997. 1997
335. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Undang-undang Statistik Nasional Mau Diarahkan Kemana ?. Butir-butir Komentar atas RUU Statistik (Versi 1997). Bogor, ECCNIT. 5 hal. 1997
336. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Lebih Jauh dengan Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. Jakarta, Harian Kompas, 25 Mei 1997. Pewawancara: Ninuk Mardiono P., Manuel Kaisiepo, St. Sularto. 1997
337. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Lampung: "Memberdayakan Lembaga Sosial-Ekonomi dan Petani Lampung". Bogor, 30 Mei 1997, 10 hal. Ceramah di UNILA, Bandar Lampung. 1997
338. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Gempa Tektonik Gejolak Sosial" Jakarta, Harian Kompas 22 Maret 1997. 1997

339. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Sumbangan Kepada Panel Ekonomi II. Kompas. Jakarta, Harian Kompas, 9 Desember 1997, 6 hal. 1997
340. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Kata Pengantar untuk buku J. Breman, Menjinakkan Sang Kuli Bogor, 17 Agustus 1977, 3 hal. 1997
341. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Segi-segi Sosial-Ekonomi Konversi Keanekaragaman Hayati di Nusantara; Ringkasan yang Diperluas". Bogor, 3 hal. 1997
342. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mahasiswa dan Pemberdayaan Menuju AFTA 2003". Bogor, 6 hal. 1997
343. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "NGO-University Linkages; An Overview". Bandung, Yayasan AKATIGA. 5 hal. 13 Desember 1997. 1997
344. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "To Feed The World into the Next Century: An Ethical Issue. (Input for a Panel Discussion)". Jakarta, LIPI Center for Biology. 5 hal. International Seminar on Culture and Biodiversity. 1997
345. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Orientasi Penelitian Sosial dan Policy Pemerintah" Bogor, 1 Maret, 9 hal. Cipayung, IPSK LIPI (Pelatihan) 1 Maret 1998. 1998
346. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pokok-pokok Kuliah PPS 702 Filsafat Sains" . Bogor, PPS-IPB. 1998
347. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "RT /RW Batu Bangunan Demokrasi". Bogor. 1998
348. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mulailah Reformasi" Bogor, 7 Mei 1998, 6 hal. 1998
349. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Towards the Establishment of a Strong National S & T. Base". Bogor, 5 Juli 1998. 1998
350. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kiat-kiat Penyusunan Usul Riset Unggulan Terpadu: Khususnya Bidang X; Sosial – Ekonomi dan Budaya". Bogor, DRN. 26 Mei 1998, 5 hal. 1998
351. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Impact of the Economic-Monetary Crisis in Search of Vulnerable Groups" Ciawi, IFAD & Dept. of Agriculture ROL. 1 September , 16 hal. 1998
352. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Sekitar Hutan 'I'". Bogor, Direktorat BKPA., Dept Kehutanan. Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Penyangga, 12,20,21 Maret 1998 di Cisarua. 10 hal. 1998
353. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Prakata dalam Buku F. HUSKEN, Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman ". Bogor, 2 Mei 1998, 5 hal. 1998
354. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "People Power" Jakarta, Harian Kompas, 22 April 1998. Diterbitkan GRAMEDIA. 1998

355. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Angkatan Bersenjata Menjadi Angkatan Perang. Memang Pertumbuhan BKR ke ABRI”. Bogor, 5 Oktober 1998, 6 hal. Harian Kompas, 5 Oktober 1998. 1998
356. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Reformasi Agraria untuk Pembangunan Ekonomi Rakyat (pokok-pokok diskusi)”, Bogor, 5 Juli, 5 hal. 1998
357. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Peran Pertanian Menghadapi Krisis Ekonomi; “Refleksi Kebijaksanaan di Sektor Pertanian dari Zaman ke Zaman “. Bogor, Himpunan Alumni IPB Cabang Jakarta. 5 Mei 1998, 5 hal. 1998
358. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Pembahasan Makalah Ir. Kusubandio. “Sistem Perencanaan dan Pemrograman Transmigrasi” Bogor, 5 Juni, 8 hal. 1998
359. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “De P.S.F. in Mijn Herinnering” dalam ANNIE GEVERS (ed) Nit de Zevende; Vyftig vaar Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam” Amsterdam, Het Spinhuis. 3 – 10 p. 1998
360. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Social Economic Apects of Floral Conservation in the Indonesian Archipelago” Bogor. UPT Kebun Raya – LIPI. Proceedings. 6 p. 1999
361. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “KEMBALI: Bagaikan Ikan Dalam Air” Bogor, KOMPAS 30 September 1999, 3 hal. 1999
362. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “PEOPLE POWER” dalam F. PERERA dkk. (ED.) Masyarakat Versus Negara; Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara. Jakarta, Penerbit Kompas. Hal. 152-156. 1999
363. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan” Jakarta, DitJen Dikti, Dept. P&K.. 1999
364. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Kuliah Perdana pada Acara Pembukaan Kuliah Pascasarjana”, UniBraw, th. 1999/2000 Malang, Program Pascasarjana. UNIBRAW. 1999
365. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “PPS. 702 Filsafat Sains (Kutipan)”, Bogor, PPS-IPB. 6 hal. 1999
366. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Menelusuri Benih-benih Disintegrasi Demi Memacu Reintegrasi.” Bogor, 12 Mei, 24 hal. 1999
367. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Evolusi dan Revolusi, Gelombang Pasang Emansipasi” Jakarta, 20 Mei 1999, 10 hal. 1999
368. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. “Beberapa Kendala Dalam Pembangunan Pertanian Berwawasan Agribisnis, Suatu Tin-

jauan Sosiologi". Bogor, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 7 hal. Seminar Nasional Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah. 1999

369. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Comments to the Emergence of a National Economy" Bogor, 20 Juli, 10 hal. 1999
370. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Komentar Buku Prof. Dr. H. Soleh Solahudin, "Pembangunan Pertanian Era Reformasi" Bogor, Sosek – IPB. 6 hal. 1999
371. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pendidikan Tinggi: Menguasai Ilmu Demi Profesionalisme". Malang , Pascasarjana UNIBRAW. 1 September 1999, 113 hal. 1999
372. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Aspek Sosial-Budaya Pariwisata Alam yang Ramah Budaya dan Pelestarian Lingkungan". Bogor, 22 Maret, 9 hal. 1999
373. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Landreform dan Pembangunan Pertanian". (butir-butir diskusi) Bogor, 17 Juli , 2 hal. 1999
374. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembaharuan Agraria demi Menghindari Revolusi Anarkis dan Memasuki Era Industrialisasi". Bogor, 10 September, 10 hal . 1999
375. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tahun Obral Besar: 17 Agustus 1999" Bogor, 13 Agustus, 3 hal. 1999
376. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Accelerated Evaluation: Perlambat Penggeseran Status Quo" Jakarta, Harian Kompas, 26 Mei. 1999
377. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Segi-segi Budaya Transmigrasi" Bogor, 1 Juni, 11 hal. 1999
378. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Prof. Dr. H. Soleh Solahuddin, Pembangunan Pertanian Era Reformasi. Bogor. 1999
379. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Agribisnis di Masa Depan" Bogor, 3 hal (tik); 3 hal cetak. Penerbit dalam AGRIMEDIA Vol. 6 No.1 Maret 2000. 2000
380. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sambutan Menjelang Semiloka Metodologi Penelitian Agraria." Bogor, PKA-IPB., 11 hal. Semiloka PKA-IPB-YAYASAN AKATIGA-P3PK-UGM. Bogor, 13-15 September 2000. 2000
381. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Hasil Riset Sering Tak Digubris" Jakarta, Harian Republika, 3 April 2000. 2000
382. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Academic Journeys Between Amsterdam", Gujarat India and Cirebon, Indonesia. Bogor (Festschrift J.C. Breman). 2000
383. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kelembagaan dan Penanggulangan Kemiskinan; Analisa Kemiskinan" Jakarta, KI-

KIS, 20 hal. Seminar Dialog Nasional Penanggulangan Kemiskinan Struktural. 29 Feb-1Maret 2000. 2000

384. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ulasan atau Kepedulian Masa Depan" Bogor, 2 Pebruari 2001, 6 hal. 2001
385. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Disintegrasi, Pengaruh Elit Cukup Besar" Pontianak, Pontianak Post, 13 Februari 2001. 2001
386. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tumbuhnya Kemandirian Sosiologi" Bogor, 12 hal. Kuliah Perdana Pasca Sarjana FISIP Univ.Tanjung Pura, Pontianak, Kalbar. 2001
387. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Teknologi di Indonesia; Perspektif Dua Puluh Lima Tahun"(Sudut Pandang Sosiologi)". 10 Maret 2001. Bandung, LAPI-ITB, 16 hal. Lamp. Agenda Riset Nasional 2000-2025. 2001
388. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sosiologi RUKK. (RISTEK)" Bogor. 5 hal., 31 Maret 2001. Kerjasama LIPI-RISTEK. 2001
389. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membangun Kerukunan dan Kebersamaan Masyarakat Perkebunan Guna Meningkatkan Daya Saing Agribisnis Perkebunan Indonesia" 15 Juli 2001 Bogor. Lokakarya Dit.Jen. Perkebunan di Medan. 20 hal. 2001
390. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sumbangan Pendapatan kepada Semiloka Kelompok Studi Pembaharuan Agraria". Bandung, 20-22 Agustus 2001, (5 hal.) 2001
391. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Research Policy; Sumbangan untuk Diskusi" 2001
392. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Padi, Tanaman Ekspansif dari Timur ke Barat" 6 hal., Jakarta, Yayasan Padi Indonesia. Diskusi Panel dan Pameran Budidaya Padi, Univ Slamet Riyadi, Surakarta, 28 Agustus 2001. 2001
393. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Indonesia in Transition; Coping with the 1997-Crisis and its Aftermath", Yogyakarta, UGM. Agustus / September 2001 Summary. (2 hal.). 2001
394. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sejarah Struktur Agraria Sejak Zaman Kolonial Hingga Lahirnya UUPA 1960". Bandung, UNPAD-MPR-ITB. (14 hal.). Semiloka Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan dan Pembaruan Agraria untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat. 14-16 September 2001. 2001
395. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kebijakan Pangan untuk Menangkal Jebakan Pangan (Food Trap)". Bogor, IPB. 20 Oktober 2001. (7 hal.). Diskusi Panel Jur. TPG, FATETA-IPB. 1 November 2001, Lampiran. 2001

396. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Etika Ilmiah dan Etika untuk Kebijaksanaan" Bogor, Untuk AIPI. 2001
397. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Budaya Ilmu, Etika dan Masalah Pembangunan Bangsa". Bogor, untuk AIPI. 2001
398. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pengelolaan Sumberdaya Agraria; Kelembagaan dan Reforma Agraria". Bandung, Yayasan AKATIGA. (Dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 6, No. 2, Juli 2001, hal.1-10). 2001
399. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masyarakat Kehilangan Norma Berbangsa dan Bernegara". Pontianak, Pontianak Pos 13 Pebruari 2001 (Kuliah Perdana Program Studi Sosiologi di Universitas Tanjungpura, Kalbar. Pasca S-2). 2001
400. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Penunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) dan Faktor Sosial". Bogor, (kepada Harian Kompas) 8 hal. 21 Pebruari 2001. 2001
401. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Preface to Hiroyoshi Kano et. al (eds)", dalam Beneath the Smoke of The Sugar Mill; Javanese Communities During the Twentieth Century. Bandung (Yayasan AKATIGA) dan Yogya (UGM Press) 6 p. 2001
402. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Teknologi di Indonesia; Persfektif Dua Puluh Lima Tahun (Sudut Pandang Sosiologis)", dalam DRN. Peluang dan Tantangan Riset dan Teknologi Menuju Demokrasi dan Integrasi Nasional Persefektif Sosial Budaya" Jakarta, DRN. (Ristek) hal. 33 – 53. 2002
403. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kebijaksanaan Penelitian Ilmiah dan Advokasi" Bogor, 9 hal. 2002
404. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menelusuri Pengertian Istilah Agraria" Bogor. 2 hal. (draft awal sebelum terbit bersama G. Wiradi). Buku G. Wiradi 70 tahun. 2002
405. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Komentar atas R.U.U. Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi". 5 hal., Bogor, DRN., RISTEK. 2002
406. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Dari Ancang-ancang ke Undang-undang" Bogor. 15 hal. 2002
407. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Growth, Equity and Poverty" (up dated August 2002). Bogor, CESS Training Session, October 2002. 6 hal., Annexes. 2002
408. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Perlunya Reorientasi Sosiologi di Indonesia". Bogor, I.S.I. Pusat, 20 Agustus 2002, 10 hal. 2002

409. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menuju Pengaturan Terpadu Sumberdaya Agraria Baru". 10 September 2002. Bogor, 15 hal. 2002
410. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Introspeksi Budaya Manusia Indonesia dan Ekonomi". Bogor, 20 Juli 2002, 16 hal. 2002
411. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sejarah Struktur dan Pengelolaan Sumberdaya Agraria Sampai Politik Pertanian" (Suatu Rangkuman). Bogor. 5 Juli 2002. 7 hal. 2002
412. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Komentar atas Pembangunan Indonesia Berkeadilan Sosial (Prof. Dr. Mubyarto)" Bogor, 27 Juni 2002. 4 hal. 2002
413. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Manifesto Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" Jakarta, YAE., 15 April 2002, 4 hal. Akhir Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Juni 2002. 2002
414. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menggapai Demokrasi Sosial Versi Indonesia". Bogor, 20 Maret 2002. 27hal. Terbit dalam buku Prof. Dr. Moeljanto Soemardi, 65 tahun. 2002
415. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ringkasan Sejarah Politik Pertanian" Jakarta. YAE., 10 Maret 2002. 16 hal. Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, 19 Maret 2002. 2002
416. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "WTO Food Politics; Demand on SCO National and Regional Leadership". Kuala Lumpur, General Assembly Asia DHRRA. Bina Desa, 2002. 9 hal. 2002
417. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Keterpaduan Ilmu Mengangkat Roda Pembangunan dari Keterpurukan". Bogor, untuk buku DRN., November 2002, 5 hal. 2002
418. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Agraria Penggerak Roda Ekonomi"Bogor, untuk diskusi DRN., 2002. 2002
419. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tantangan Sistim Pendidikan Antara Konflik Ethnik dan Budaya Global." Jakarta, Univ. Negeri Jakarta (ex-IKIP) Seminar pada Dies Natalis UNJ., 25 Juni 2003. 10 hal. 2003
420. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Ethos Kerja Masyarakat" Jakarta, DRN Forum Kerja Sosial Budaya. 16 Desember 2003.; 13 – 27 hal. 2003
421. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Menggagas Dewan Riset Nasional Pasca Reformasi" (1998) Bogor, 13 Januari 2003,5 hal.2003
422. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Land Policies in Indonesia" An Evaluation Report for the World Bank, Jakarta Office Indonesia. 1st Draft 22 p, 2nd draft 31 p. 2003

423. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kerangka Pelaksanaan Reforma Agraria; Rekomendasi untuk Calon Republik Indonesia" Bandung, 15 Juni 2004 6 hal. (Bersama Pimpinan KPK). 2004
424. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Reforma Agraria dalam Rangka Pelaksanaan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Periode 2004-2009". Bogor, 20 Oktober 2004. 3 hal. 2004
425. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kebutuhan Penyusunan Undang-Undang dan Pembentukan Komisi Pengendalian Alih guna Lahan Pertanian di Indonesia" Jakarta, Round Table II Pengendalian Konversi dan Pengembangan Lahan Pertanian 14 Desember 2004. 3 hal. 2004
426. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "From Colonization to Transmigration: Changing Policies in Population Resettlement" In Furukawa Hisao et al. (eds), Ecological Destruction, Health and Development. Kyoto, Kyoto University Press, 2004. p. 89 – 108. 2004
427. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Politik dan Kebijakan Pembangunan Pertanian." Bogor, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat-IPB., 2004. 2004
428. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Studi Penyuluhan Pembangunan Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Menuju Kemandirian". Bogor, Semiloka Pengembangan Masyarakat Mandiri., 5 hal. 2004
429. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tanggapan atas RUU-RI tentang Kementerian Negara (DPR) dan RUU tentang Kementerian Negara (Menpan)". Bogor, (untuk diskusi AIPI-DRN), 2 hal. 2004
430. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembangunan Berbasis Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa". Jakarta, 30 juni 2004, 6 hal. Sambutan pada Seminar Sehari di Departemen Dalam Negeri. Kerjasama dengan Himpunan Profesi Ikatan Sosiologi Indonesia Pusat dan daerah. 2004
431. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sistem Pendidikan indonesia; Tantangan dan Harapan. Jakarta, Komisi Ilmu-ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 124 hal. 2005
432. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pembangunan Berbasis Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa", Sambutan pada Seminar Sehari I.S.I. Jakarta, I.S.I., 6 hal. 2005
433. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Technology Change in Asian Agriculture; Some Social Implications" (dalam Six Decades of Science and Scientists in Indonesia, Section II; Building the Strength in Science). Bogor, Naturindo. 2005, Hal. 379-394. 2005

434. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Rural Development and Rural Poverty Reduction; Promisses Between 1st UN Development Decade and Millenium Development Goals (1960-2005)". Bangkok, UN ESCAP Expert Meeting 19-20 May 2005. 11 hal. 2005
435. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Between WCARRD Rome and ICARRD Porto Allegre" Italy, July 1979 and Brazil, March 2006 Porto Allegre, Conference on Agrarian Reform, March 2006. 14 p. 2006
436. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Masalah Pertanahan dalam Konteks Kebijakan dan Strategi Pembangunan Dewasa ini" Bogor, Departemen Dalam Negeri, 10 Juni 2006. 10 hal. Perencanaan Strategis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Manajemen Pertanahan (Stakeholders Meeting LMPD Komponen 5). 2006
437. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pemerintah, Pembangunan-Kebudayaan dan Ilmu Sosial". Bogor. 6 hal. 2006
438. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kata Pengantar" dalam buku J.C. Breman & G. Wiradi, Masa Cerah dan Masa Suram di Daerah Pedesaan, (Good Times and Bad Times in Rural Java). Jakarta, LP3ES – KITLV., hal. VII-X.. 2006
439. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membentuk Jati Diri Bangsa Yang Kuat" Bogor, Yayasan Jati Diri , 16 Juni 2006. 5 hal. 2006
440. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Panca Sila, Kesatuan Bangsa dan Keadilan". Bogor, FISIP-UI. 19 hal. (Untuk Symposium Hari Panca Sila di Kampus UI Depok, 31 Mei 2006). 2006
441. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Hari Air Dunia". 11 hal. Jakarta, J.K.I. Indonesia. Sarasehan J.K.I. di LP3ES (17 April 2006). 2006
442. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Swa-Sembada Pangan Berkelanjutan: Apakah Realistis?". Jakarta, 20 September 2006, 7 hal. & 3 Lamp. Diskusi dikantor Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID). 2006
443. WEYT Team (Includes TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P.). "Revisiting Villages in Java: A Study of Long Term Dynamics in Socio Economic Indicators (Step-1 Exploration)". Bogor, 38 hal. & Lamp. BPS 2006
444. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Strategi Implementasi Program Pembaruan Agraria Nasional". Makasar/ Bogor., 11 hal + 5 hal., 14 power points. Badan Pertanahan Nasional, Symposium Agraria Nasional ke II di Makasar, 4 Desember 2006. 2006

445. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Saran-saran Setelah Menghadiri Symposium Agraria Nasional I, II dan III di Medan, Makasar, Jakarta". Bogor, 2 hal. Round Table Discussion, 14 Desember 2006. 2006
446. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pengembangan Partisipasi Warga Bandung", ITPI/IPGI No.1, Vol. 1, 2006. 5 hal. 2006
447. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Foreword (kata pengantar buku)" in The Nagari Community, Business and the State; The origin and the process of contemporary agrarian protests in West Sumatra. Bogor, Sawit Warch, 4 hal. 2007
448. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Kata Pengantar" dalam Nabiel Fuad al Musawah, Sosiologi Islam: Paradigma Islam Terhadap Berbagai Aspek Sosiokultural Dalam Masyarakat Modern. 1 Maret 2007, Bogor, 5 hal. 2007
449. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Agenda Riset 2006 – 2009" Bogor, DRN, 5 hal. 2007
450. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Pemerintah dan Pembangunan Kebudayaan dan Ilmu Sosial" Bogor. 6 hal. 2007
451. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membangun Masyarakat Berbudaya IPTEK" (MMBI). Jakarta, DRN – RISTEK. 10 hal. 2007
452. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Desa: Retrospeksi ke-1800 Menuju Prospek 2030" Bogor, IPB. 27 hal. Seminar 9 – 10 Mei 2007. 2007
453. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Sambutan atas Dies Natalies ke-2 Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor" (Peluncuran buku dan diskusi, 27 Juli 2007). Darmaga, FEMA-IPB. 4 hal. 2007
454. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Merintis Pengembangan Ilmu Gizi" (Karangan untuk Biografi Prof. Dr. Darwin Karyadi) Bogor, 2 hal. 2007
455. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Tanggapan atas RUU Lahan Pertanian Abadi" Bandung, Departemen Pertanian. Seminar 9 Oktober 2007. 3 hal. 2007
456. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Renungan Spontan 1 Syawal 1428 H" Bogor, 13 Oktober 2007. 2 hal. 2007
457. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Membangun Negara dan Mengembangkan Demokrasi" Jakarta, AIPI. 168 hal. 2007
458. TJONDRONEGORO, SEDIONO M.P. "Mengatasi Keterpurukan Bangsa dan Menyelamatkan Martabat Manusia Indonesia" Jakarta, Komisi Ilmu-Ilmu Sosial. AIPI. 8 hal. 2007

Lampiran Foto

Prof Tjondro dan anak istri. Ki-ka: Irvan, Puspa Dewi Natalia, dan Myrza

?
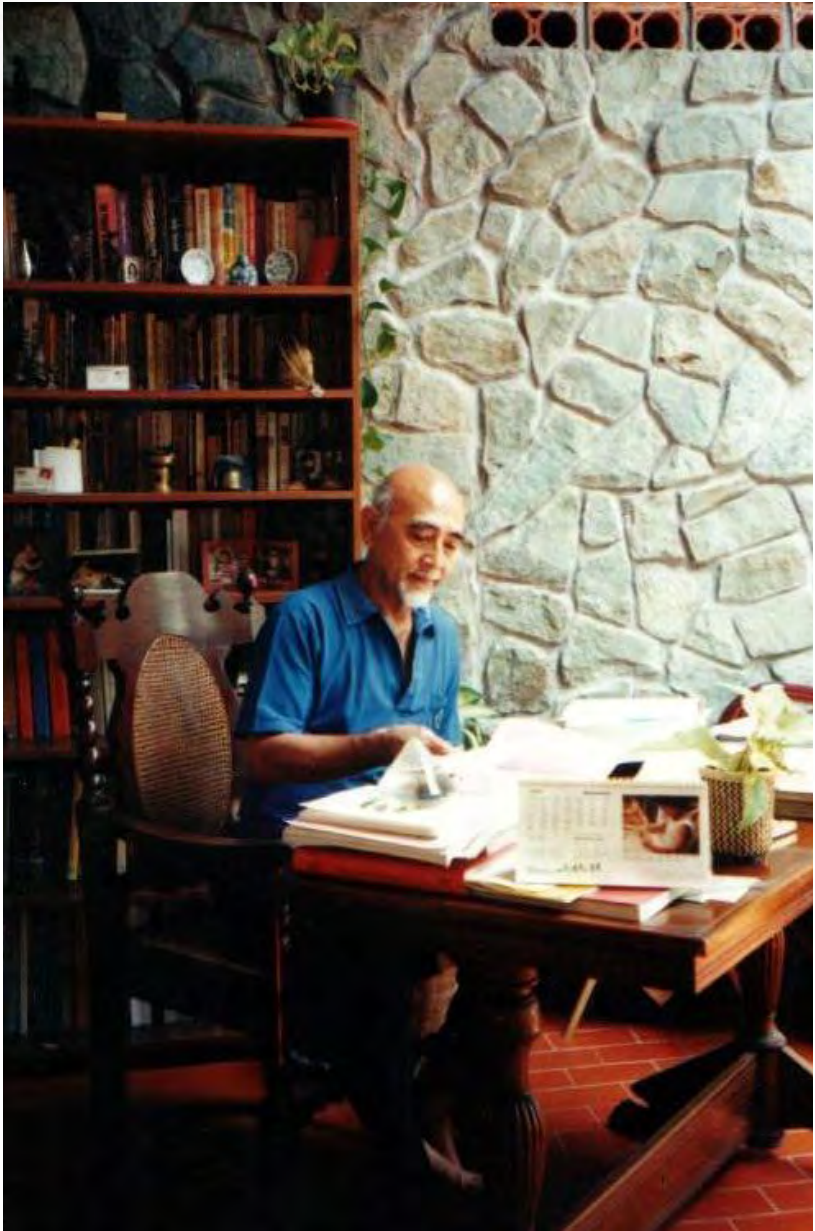
Prof. Tjondro di meja kerjanya

Prof. Tjondro sedang berpose di halaman rumahnya berkebun merupakan salah satu kegiatannya di hari tuanya

Prof. Tjondro sedang berpose di halaman rumahnya

Sungkeman menjelang pernikahan putra pertama, Myrza.
Sragen 14 Oktober 2000.

Prof. Tjondro sekeluarga dalam busana Jawa pada saat menghadiri pernikahan keponakan, Reeza Tjoindronegoro di Jakarta.

Hasil latihan melukis berbagai sketsa yang dibuat ketika di negeri Belanda (1955-1957)

MS
vis wijr.

MS-